



KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

2023 AUDITED

Laporan Keuangan



Laporan Realisasi Anggaran



Neraca



Laporan Operasional



Laporan Perubahan Ekuitas



Catatan Atas Laporan Keuangan

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 8 Mei 2024

Pengguna Anggaran,



Henry Silka Innah

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran	vi
Pernyataan Telah Direviu	vii
Pernyataan Tanggung Jawab	viii
Penyampaian Laporan Keuangan	ix
Ringkasan	
I. Laporan Realisasi Anggaran	
II. Neraca	
III. Laporan Operasional	
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	1
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	13
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	37
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	46
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	49
VI. Lampiran dan Daftar	

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komnas HAM	1
Tabel 2.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komnas Perempuan	4
Tabel 3.	Perhitungan Penyisihan Piutang	9
Tabel 4.	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	11
Tabel 5.	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	12
Tabel 6.	Rincian Perubahan DIPA TA 2023	13
Tabel 7.	Postur DIPA Komnas HAM menurut Jenis Belanja	14
Tabel 8.	Capaian Output per Fungsi APBN Komnas HAM	14
Tabel 9.	Capaian Output per Fungsi APBN Komnas Perempuan	15
Tabel 10.	Capaian Output PN Komnas HAM	16
Tabel 11.	Capaian Output PN Komnas Perempuan	16
Tabel 12.	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2023	17
Tabel 13.	Rincian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2023	17
Tabel 14.	Rincian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan TA 2023	18
Tabel 15.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Komnas HAM berdasarkan Sumber Dana TA 2023	19
Tabel 16.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Komnas HAM berdasarkan Jenis Belanja TA 2023	19
Tabel 17.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Komnas HAM berdasarkan Program TA 2023	19
Tabel 18.	Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022	20
Tabel 19.	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022	20
Tabel 20.	Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022	20
Tabel 21.	Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2023	21
Tabel 22.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022	21
Tabel 23.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022	22
Tabel 24.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan 2022	22
Tabel 25.	Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022	23
Tabel 26.	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember TA 2023	24
Tabel 27.	Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	24
Tabel 28.	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	25
Tabel 29.	Perbandingan Rincian Beban Dibayar Dimuka TA 2023 dan 2022	25
Tabel 30.	Perbandingan Rincian Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 2022	25
Tabel 31.	Rincian Mutasi Tanah TA 2023	26
Tabel 32.	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin TA 2023	26

Tabel 33.	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2023	28
Tabel 34.	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya TA 2023	29
Tabel 35.	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2023	30
Tabel 36.	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2023	30
Tabel 37.	Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi TA 2023	31
Tabel 38.	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2023	31
Tabel 39.	Rincian Aset Tak Berwujud TA 2023	32
Tabel 40.	Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud TA 2023	32
Tabel 41.	Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	33
Tabel 42.	Rincian Aset Lain-Lain TA 2023	33
Tabel 43.	Rincian Mutasi Aset Lain-lain TA 2023	33
Tabel 44.	Rincian Aset Lain-Lain TA 2023	34
Tabel 45.	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya TA 2023	35
Tabel 46.	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2023 dan 2022	35
Tabel 47.	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023 dan 2022	37
Tabel 48.	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023	37
Tabel 49.	Perbandingan PNBP-LO dengan PNBP-LRA	37
Tabel 50.	Rincian Selisih PNBP-LO dengan PNBP-LRA	37
Tabel 51.	Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan 2022	38
Tabel 52.	Perbandingan Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA	38
Tabel 53.	Rincian Selisih Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA	38
Tabel 54.	Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022	39
Tabel 55.	Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022	40
Tabel 56.	Rincian Beban Barang dan Jasa Penanganan COVID-19 TA 2023	40
Tabel 57.	Perbandingan Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang dan Jasa-LRA	41
Tabel 58.	Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022	41
Tabel 59.	Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA	42
Tabel 60.	Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022	42
Tabel 61.	Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA	42
Tabel 62.	Rincian Selisih Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA	43
Tabel 63.	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022	43
Tabel 64.	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TA 2023 dan 2022	43
Tabel 65.	Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022	44
Tabel 66.	Rincian Transaksi Antar Entitas TA 2023	46
Tabel 67.	Rincian Transfer Masuk TA 2023	47

Tabel 68.	Rincian Mutasi Transfer Masuk TA 2023	47
Tabel 69.	Rincian Transfer Keluar TA 2023	47
Tabel 70.	Rincian Mutasi Transfer Keluar TA 2023	47
Tabel 71.	Rincian Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung TA 2023	48
Tabel 72.	Transaksi Resiprokal TA 2023	50

DAFTAR GAMBAR

	Hal
GAMBAR 1. Struktur Lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	3
GAMBAR 2. Struktur Lembaga Komnas Perempuan	6

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1. Rincian Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
- LAMPIRAN 2. Rincian Pengembalian Belanja Lewat Tahun
- LAMPIRAN 3. Rincian Penyetoran Pengembalian Belanja Barang Tahun Berjalan
- LAMPIRAN 4. Lampiran Belanja Penanganan Covid Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pengungkapan Yang Memadai Pada LKKL Komnas HAM
- LAMPIRAN 5. Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas
- LAMPIRAN 6. Rekapitulasi Hibah Komnas HAM
- LAMPIRAN 7. Lampiran Beban Penanganan Covid Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pengungkapan Yang Memadai Pada LKKL Komnas HAM
- LAMPIRAN 8. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023



**SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax. 021-3925227
Jl. Cisadane No.25, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330
website: www.komnasham.go.id email: info@komnasham.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2023
*AUDITED***

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk tahun anggaran 2023 *Audited* berupa Neraca per 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu yang telah kami lakukan, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 6 Mei 2024
Plt. Kepala Biro Perencanaan dan
Pengawasan Internal



Kurniasari Novita Dewi
NIP. 197311072005022001



**SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax. 021-3925227
Jl. Cisadane No.25, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330
website: www.komnasham.go.id email: info@komnasham.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 8 Mei 2024

Pengguna Anggaran,



Henry Silka Innah



**SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310. Telp. 021-3925230, Fax. 021-3925227
Jl. Cisadane No.25, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330
website: www.komnasham.go.id email: info@komnasham.go.id

Nomor : 356/KU.02.01/0.3.1N/2024 Jakarta, 8 Mei 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Softcopy Laporan Keuangan Komnas HAM TA 2023 *Audited*
Tingkat Kementerian/Lembaga
Hal : **Penyampaian Laporan Keuangan Komnas HAM TA 2023 *Audited***

Yang Terhormat

1. Menteri Keuangan
c.q. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan
u.p. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
2. Auditor Utama Keuangan Negara I
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
di Jakarta

Merujuk Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.5/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Komnas HAM Per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 yang berupa *softcopy* atas Laporan Keuangan Komnas HAM dengan Format PDF, Kode Bagian Anggaran: 074 dan Kode Satker: 650236 (termasuk Komnas Perempuan).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Pengguna Anggaran,

Henry Silka Innah

Laporan Keuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2023 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 *Audited* adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp318.412.191,00 dengan persentase pencapaian tidak dapat ditentukan karena tidak adanya estimasi nilai anggaran sebagai pembanding.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 *Audited* adalah sebesar Rp118.214.807.714,00 atau mencapai 98,65 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp119.831.945.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp94.796.343.887,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.472.043.118,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp91.196.395.958,00; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp3.737.867,00; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp1.124.166.944,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp426.675.320,00 dan Rp94.369.668.567,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.453.076,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp116.331.808.984,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp116.327.355.908,00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa masing-masing adalah sebesar Rp399.372.928,00 dan Rp0,00, sehingga entitas

mengalami Defisit-LO sebesar Rp116.726.728.836,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp18.057.117.788,00, ditambah Defisit-LO sebesar Rp116.726.728.836,00, ditambah koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp23.634.568,00 ditambah dengan transaksi antar entitas sebesar Rp193.062.914.183,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp94.369.668.567,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



LAPORAN REALISASI ANGGARAN (FACE)
UNTUK PERIODE PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023				TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI	Realisasi di Atas (Di Bawah)	%	REALISASI
A. PENDAPATAN NEGARA						
1. Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1	-	318.412.191,00	318.412.191,00	-	371.151.539,00
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA		-	318.412.191,00	318.412.191,00	-	371.151.539,00
B. BELANJA						
BELANJA OPERASI	B.2					
1. Belanja Pegawai	B.3	41.330.422.000,00	40.659.841.459,00	(670.580.541,00)	98,38%	39.186.070.491,00
2. Belanja Barang	B.4	74.295.316.000,00	73.354.536.821,00	(940.779.179,00)	98,73%	61.208.731.537,00
Jumlah Belanja Operasi		115.625.738.000,00	114.014.378.280,00	(1.611.359.720,00)	98,61%	100.394.802.028,00
BELANJA MODAL	B.5					
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	B.5.1	2.091.692.000,00	2.086.042.416,00	(5.649.584,00)	99,73%	1.729.745.364,00
2. Belanja Modal Lainnya	B.5.2	2.114.515.000,00	2.114.387.018,00	(127.982,00)	99,99%	1.147.734.400,00
Jumlah Belanja Modal		4.206.207.000,00	4.200.429.434,00	(5.777.566,00)	99,86%	2.877.479.764,00
JUMLAH BELANJA		119.831.945.000,00	118.214.807.714,00	(1.617.137.286,00)	98,65%	103.272.281.792,00

Jakarta, 8 Mei 2024
Pengguna Anggaran,

Henry Silka Innah

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



NERACA (FACE)
UNTUK PERIODE PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

II. NERACA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1	2.175.219.857,00	4.136.753,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.2	19.598.628,00	22.863.204,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.3	(97.993,00)	(114.316,00)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		19.500.635,00	22.748.888,00
Beban Dibayar Dimuka	C.1.4	113.925.273,00	13.490.098,00
Persediaan	C.1.5	163.397.353,00	190.092.445,00
JUMLAH ASET LANCAR		2.472.043.118,00	230.468.184,00
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	78.324.273.000,00	-
Peralatan dan Mesin	C.2.2	28.374.184.059,00	28.606.325.064,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	6.587.052.160,00	13.663.103.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.4	2.959.766.855,00	1.495.517.998,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.5	477.116.500,00	477.116.500,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6	(25.525.996.616,00)	(26.242.953.371,00)
JUMLAH ASET TETAP		91.196.395.958,00	17.999.109.191,00
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	166.119.650,00	181.961.216,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.3.2	(162.381.783,00)	(162.460.991,00)
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		3.737.867,00	19.500.225,00
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		3.737.867,00	19.500.225,00
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	2.627.377.400,00	1.805.914.700,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.4.2	254.452.000,00	-
Aset Lain-lain	C.4.3	1.729.433.172,00	3.339.937.897,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.4	(3.487.095.628,00)	(4.453.696.113,00)
JUMLAH ASET LAINNYA		1.124.166.944,00	692.166.484,00
JUMLAH ASET		94.796.343.887,00	18.941.234.084,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5.1	426.675.320,00	884.116.296,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		426.675.320,00	884.116.296,00
JUMLAH KEWAJIBAN		426.675.320,00	884.116.296,00
EKUITAS	C.6		
Ekuitas	C.6.1	94.369.668.567,00	18.057.117.788,00
JUMLAH EKUITAS		94.369.668.567,00	18.057.117.788,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		94.796.343.887,00	18.941.234.084,00

Jakarta, 8 Mei 2024
Pengguna Anggaran,

Henry Silka Innah

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



LAPORAN OPERASIONAL (FACE)
UNTUK PERIODE PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	4.453.076,00	2.146.792,00
JUMLAH PENDAPATAN		4.453.076,00	2.146.792,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	40.619.728.512,00	39.126.365.641,00
Beban Persediaan	D.3	1.030.988.931,00	1.689.449.318,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	36.316.453.789,00	33.493.405.106,00
Beban Pemeliharaan	D.5	3.208.701.426,00	2.773.252.104,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	31.963.078.906,00	24.676.716.779,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	3.192.952.951,00	2.960.337.347,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	(95.531,00)	212.307,00
JUMLAH BEBAN		116.331.808.984,00	104.719.738.602,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(116.327.355.908,00)	(104.717.591.810,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	(574.602.622,00)	(28.016.224,00)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		125.713.521,00	56.777.776,00
		(700.316.143,00)	(84.794.000,00)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		175.229.694,00	328.858.247,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		177.601.244,00	329.215.247,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(2.371.550,00)	(357.000,00)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(399.372.928,00)	300.842.023,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(116.726.728.836,00)	(104.416.749.787,00)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) - LO		(116.726.728.836,00)	(104.416.749.787,00)

Jakarta, 8 Mei 2024
Pengguna Anggaran,

Henry Silka Innah

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (FACE)
UNTUK PERIODE PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	18.057.117.788,00	21.281.131.772,00
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(116.726.728.836,00)	(104.416.749.787,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI		-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		-	-
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Selisih Revaluasi Aset		-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3	(23.634.568,00)	(10.585.226,00)
Koreksi Lain-lain		-	-
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		(23.634.568,00)	(10.585.226,00)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	193.062.914.185,00	101.203.321.029,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		76.312.550.779,00	(3.224.013.984,00)
EKUITAS AKHIR	E.5	94.369.668.567,00	18.057.117.788,00

Jakarta, 8 Mei 2024
Pengguna Anggaran,

Henry Silka Innah

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

A.1.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didirikan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Komnas HAM berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM kemudian mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menjadikan Komnas HAM sebagai lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran HAM yang berat serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang Nomor 7 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Entitas Komnas HAM sendiri berkedudukan di:

- Kantor Komnas HAM Menteng, Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310,
- Kantor Komnas HAM Cikini, Jalan Cisadane Nomor 25-25A, Cikini, Jakarta Pusat 10330, serta
- Kantor Komnas HAM Hayam Wuruk, Hayam Wuruk Plaza Lantai 18, Jalan Hayam Wuruk Nomor 108, Taman Sari, Jakarta Barat 11160.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Komnas HAM berkomitmen memberi penekanan pada terciptanya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, dimana segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, hal ini tertuang dalam visi "**Terwujudnya Komnas HAM yang Kredibel untuk Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**".

Sebagai penjabaran dari visi Komnas HAM terlihat dalam tabel berikut.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Tabel 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
Terwujudnya Komnas HAM yang kredibel untuk kemanusiaan yang Adil dan Beradab	1) Mengarusutamakan norma HAM dalam penyelenggaraan negara	1) Menguatnya norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negara	S.S.1.1 Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM S.S.1.2 Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia S.S.1.3 Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000)
	2) Membangun keadaban HAM masyarakat	2) Meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakat	S.S.2.1 Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat



Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
	3) Memperkuat peran strategis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional	3) Menguatnya kerja sama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti	S.S.3.1 Meningkatnya kerja sama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti
	4) Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam memastikan pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM	4) Terwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM	S.S.4.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tanggal 29 Desember 2020, Sekretariat Jenderal Komnas HAM terdiri dari 5 Biro yaitu:

1. Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal
Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan evaluasi penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi program dan anggaran, serta pelaksanaan pengawasan intern.
2. Biro Umum
Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan dukungan kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM, melaksanakan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia, penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana, pengembangan dan penerapan teknologi informasi, penatausahaan lembaga, persidangan dan protokol, pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
3. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama
Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
4. Biro Dukungan Penegakan HAM
Biro Dukungan Penegakan HAM mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan kegiatan teknis pelayanan pengaduan, pemantauan, pengawasan dan penyelidikan, serta mediasi HAM dan penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat.
5. Biro Dukungan Pemajuan HAM
Biro Dukungan Pemajuan HAM mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan HAM.

Serta kelompok jabatan fungsional, berupa sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Terdapat 6 kantor sekretariat perwakilan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 tanggal 29 Desember 2020, Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Provinsi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM.



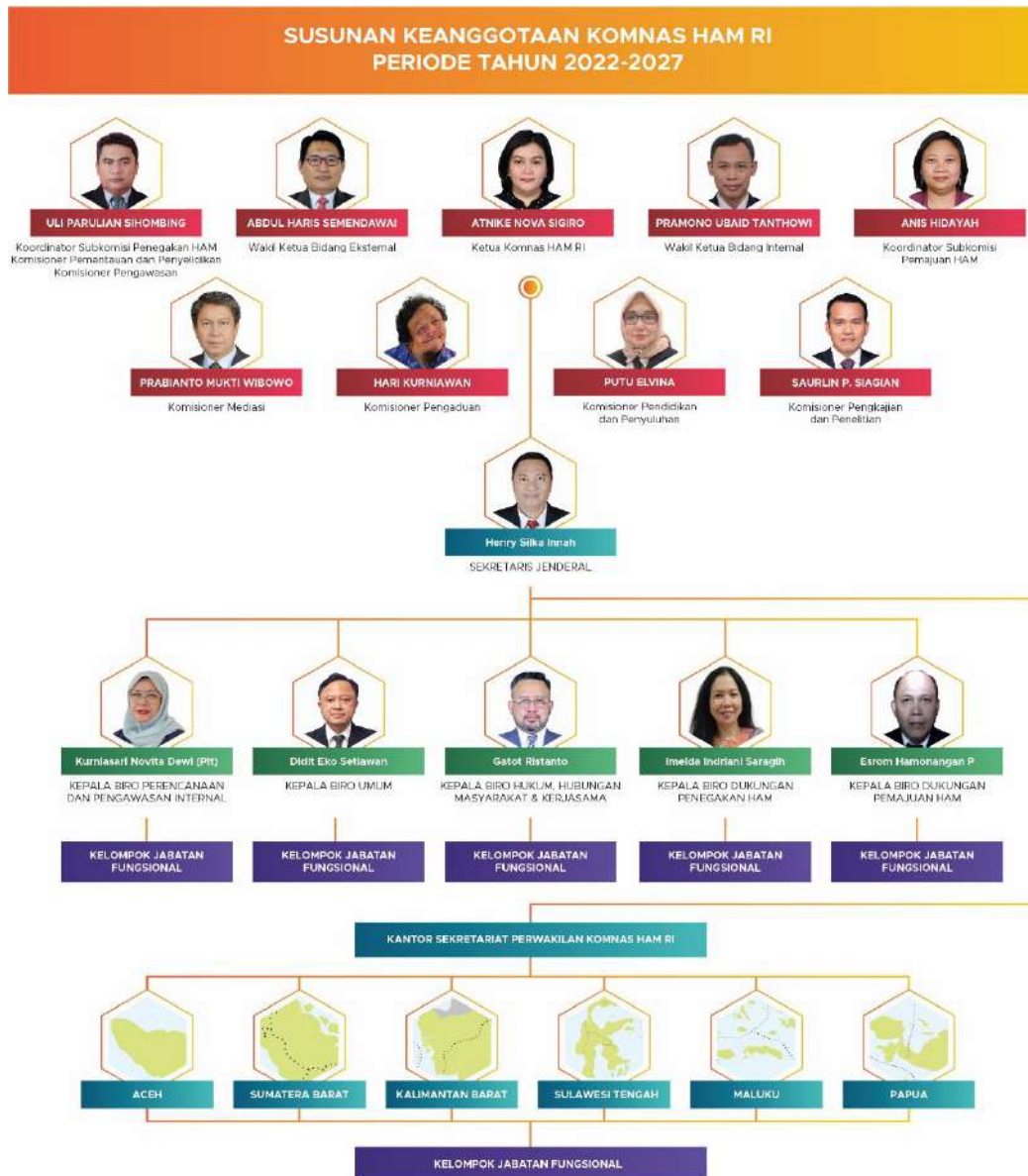
Sekretariat Komnas HAM di Provinsi menyelenggarakan fungsi:

1. Pelayanan dukungan teknis operasional;
2. Pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, dan urusan umum lainnya;
3. Pelaksanaan urusan di bidang pelayanan pengaduan pelanggaran HAM di daerah;
4. Pelayanan administrasi dalam kerja sama Komnas HAM dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di daerah;
5. Penyelenggaraan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi.

Kantor Sekretariat Perwakilan Komnas HAM terdapat pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua.

Susunan Keanggotaan dan Struktur Lembaga Komnas HAM Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut.

Gambar 1. Susunan Keanggotaan dan Struktur Lembaga Komnas HAM





Komnas HAM hanya mempunyai satu satuan kerja (satker), dan tidak mempunyai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W).

DIPA Komnas HAM dengan Bagian Anggaran kode 074 merupakan penggabungan anggaran dari dua lembaga yaitu Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

A.1.2. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan lembaga negara dengan mandat khusus untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 dan kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005. Tugas dan kewenangan Komnas Perempuan antara lain (a) melaksanakan pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan; (b) memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Sebagai penjabaran dari visi Komnas Perempuan terlihat dalam tabel berikut.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Tabel 2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
Terwujudnya bangunan dan konsensus nasional untuk pembaruan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan perempuan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan, dalam kerangka HAM yang peka <i>gender</i> dan lintas batas dengan kepemimpinan perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong lahirnya kerangka kebijakan negara dan daya dukung organisasi masyarakat sipil dalam mengembangkan model sistem pemulihan yang komprehensif & inklusif bagi perempuan korban kekerasan; 2. Membangun <i>standard setting</i> pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang akan digunakan oleh masyarakat, negara, dan korporasi; 3. Memperkuat infrastruktur gerakan lintas batas untuk peningkatan kapasitas sumber daya gerakan dan penyikapan bersama, untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan; 4. Meningkatkan dukungan negara dan masyarakat terhadap penguatan kepemimpinan perempuan di segala bidang, termasuk perlindungan bagi Perempuan Pembela HAM; 5. Memperkuat daya tanggap, daya pengaruh, dan tata kelola Komnas Perempuan, sebagai bentuk akuntabilitas 	<p>Terbukanya peluang yang lebih besar bagi perempuan korban kekerasan dan rentan kekerasan mengakses hak-hak Konstitusional, yang ditopang dengan kapasitas gerakan lintas batas dan kepemimpinan Perempuan Pembela HAM bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang semakin efektif dan terkonsolidasi dan mekanisme HAM khusus perempuan yang semakin kuat daya pengaruhnya</p>	<p>S.S. 1.1 Menguatnya sistem pencegahan kekerasan terhadap perempuan di ranah negara, korporasi dan masyarakat</p> <p>S.S. 1.2 Menguatnya sistem penanganan kekerasan berbasis <i>gender</i> dan sistem pemulihan bagi perempuan korban kekerasan</p> <p>S.S. 1.3 Berkembangnya <i>platform</i> bersama gerakan penghapusan KtP yang mengadopsi perspektif interseksionalitas dan jaringan kerja lintas batas berbasis pengetahuan tentang akar masalah, dampak dan perkembangan penanganan KtP</p> <p>S.S. 1.4 Meningkatnya daya tanggap, daya pengaruh, dan tata kelola Komnas Perempuan sebagai bentuk akuntabilitas mekanisme HAM khusus penghapusan KtP, dalam upaya mendorong perlindungan dan pemajuan HAM perempuan & pemenuhan</p>



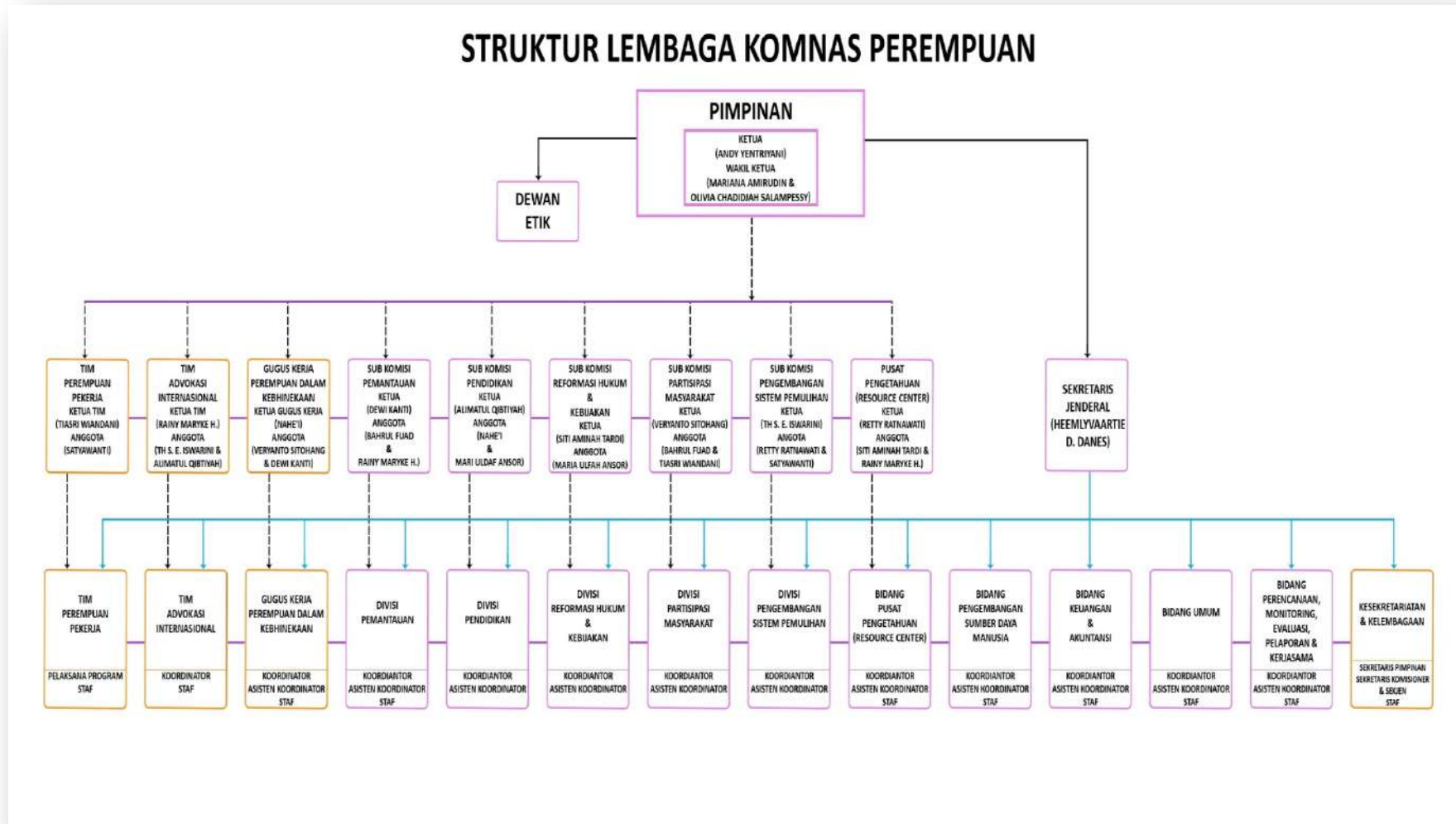
Catatan atas Laporan Keuangan Komnas HAM
Untuk Periode per 31 Desember 2023 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2022
(*Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain*)

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
	mekanisme HAM khususnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dalam upaya mendorong perlindungan dan pemajuan HAM perempuan.		hak perempuan korban kekerasan berbasis <i>gender</i>



Struktur Lembaga Komnas Perempuan adalah sebagai berikut.

Gambar 2. Struktur Lembaga Komnas Perempuan





A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, SAI dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Aplikasi ini adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. SAI yang dilaksanakan dengan menggunakan SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Komnas HAM termasuk Komnas Perempuan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu, SAKTI juga sebagai sistem yang digunakan untuk menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk diperbandingkan dengan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Komnas HAM menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komnas HAM dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat senilai pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau senilai nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat senilai nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 *Audited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Komnas HAM. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komnas HAM adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan – LO

- a. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Komnas HAM adalah sebagai berikut.
 - 1) Penerimaan Hibah diakui setelah sumber daya ekonomi diterima di rekening.
 - 2) Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL diakui setelah disetorkan ke Kas Negara.
 - 3) Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) diakui setelah sumber daya ekonomi diterima di rekening.
 - 4) Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi diakui setelah disetorkan ke Kas Negara.
 - 5) Pendapatan anggaran lain-lain diakui setelah sumber daya ekonomi diterima di rekening/disetorkan ke Kas Negara.
- b. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

3. Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- c. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



4. Beban

- a. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi; atau potensi jasa.
- b. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

- a. Aset lancar
 - 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
 - 2) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - 3) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
 - 4) Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan perhitungan penyisihannya sebagai berikut.

Tabel 3. Perhitungan Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo yang ditetapkan	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	100%

- 5) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- 6) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) Harga pembelian terakhir apabila diperoleh melalui pembelian



- dengan metode penilaian barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama keluar (FIFO).
- b) Harga pokok produksi apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - c) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- b. Aset tetap
- 1) Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
 - 2) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut.
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
 - 3) Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
 - 4) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
- c. Penyusutan aset tetap
- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
 - 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
 - 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.



Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Penggolongan Masa Manfaat Aset tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

- d. Piutang jangka panjang
- 1) Piutang jangka panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - 2) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan senilai nilai yang dapat direalisasikan.
- e. Aset Lainnya
- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
 - 2) Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual, disajikan senilai nilai tercatat netto yaitu senilai harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
 - 3) ATB disajikan senilai nilai tercatat netto yaitu senilai harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
 - 4) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
 - 5) Masa Manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.



Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- 6) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan senilai nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

- a. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- b. Kewajiban dicatat senilai nilai nominal, yaitu senilai nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2023, Komnas HAM telah melakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu:

1. Revisi DIPA pertama Komnas HAM Nomor SP DIPA-074.01.1.650236/2023 disahkan pada tanggal 26 Desember 2022.
2. Revisi DIPA kedua Komnas HAM Nomor SP DIPA-074.01.1.650236/2023 disahkan pada tanggal 20 Februari 2023.
3. Revisi DIPA ketiga Komnas HAM Nomor SP DIPA-074.01.1.650236/2023 disahkan pada tanggal 30 Maret 2023.
4. Revisi DIPA keempat Komnas HAM Nomor SP DIPA-074.01.1.650236/2023 disahkan pada tanggal 05 Juni 2023.
5. Revisi DIPA kelima Komnas HAM Nomor SP DIPA-074.01.1.650236/2023 disahkan pada tanggal 18 Juli 2023.
6. Revisi DIPA keenam Komnas HAM Nomor SP DIPA-074.01.1.650236/2023 disahkan pada tanggal 08 September 2023.
7. Revisi DIPA ketujuh Komnas HAM Nomor SP DIPA-074.01.1.650236/2023 disahkan pada tanggal 17 Oktober 2023.
8. Revisi DIPA kedelapan Komnas HAM Nomor SP DIPA-074.01.1.650236/2023 disahkan pada tanggal 02 November 2023.
9. Revisi DIPA kesembilan Komnas HAM Nomor SP DIPA-074.01.1.650236/2023 disahkan pada tanggal 01 Desember 2023.
10. Revisi DIPA kesepuluh Komnas HAM Nomor SP DIPA-074.01.1.650236/2023 disahkan pada tanggal 20 Desember 2023.

Pada tahun 2023, terdapat perubahan signifikan anggaran Komnas HAM melalui revisi DIPA ke 7 (tujuh) dan ke 9 (sembilan). Penyesuaian ini berupa penambahan anggaran yang dikarenakan adanya hibah langsung luar negeri senilai Rp10.758.515.000,00. Pagu anggaran setelah revisi terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Rincian Perubahan DIPA TA 2023

PROGRAM	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Program Dukungan Manajemen (074.01.WA)	81.176.782.000,00	85.228.210.000,00
Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan Internal (3335)	2.287.271.000,00	2.060.364.000,00
Penyelenggaraan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, Keuangan (3336)	61.428.555.000,00	62.614.292.000,00
Dukungan internal Komnas Perempuan (6387)	14.974.057.000,00	17.750.635.000,00
Penyelenggaraan Layanan Hukum, Humas, dan Kerjasama (6594)	2.486.899.000,00	2.802.919.000,00
Program Pemajuan dan Penegakan HAM (074.01.BG)	29.783.708.000,00	34.603.735.000,00
Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara (5679)	6.612.995.000,00	6.379.774.000,00
Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM (5680)	13.929.542.000,00	11.345.408.000,00
Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban (5681)	9.241.171.000,00	16.878.553.000,00
Total Belanja	110.960.490.000,00	119.831.945.000,00

Sedangkan apabila dilihat dari jenis belanja, postur anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 7. Postur DIPA Komnas HAM menurut Jenis Belanja

URAIAN	ANGGARAN SETELAH REVISI		
	KOMNAS HAM	KOMNAS PEREMPUAN	TOTAL
Belanja Pegawai	32.502.557.000,00	8.827.865.000,00	41.330.422.000,00
Belanja Barang	48.900.295.000,00	25.395.021.000,00	74.295.316.000,00
Belanja Modal	3.799.905.000,00	406.302.000,00	4.206.207.000,00
Total	85.202.757.000,00	34.629.188.000,00	119.831.945.000,00

Pengungkapan Capaian Output per Fungsi APBN

Pelaksanaan APBN pada Komnas HAM dapat diklasifikasikan dalam 11 fungsi. Berikut ini disampaikan capaian output utama per fungsi APBN sebagai berikut:

Ketertiban dan Keamanan (03)

1. Komnas HAM

Tabel 8. Capaian Output per Fungsi APBN Komnas HAM

No	Kode RO	Uraian RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Tar get	Rea lisa si	Satuan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BG.5679 ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Hasil Pengkajian/Penelitian atas Peraturan Perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM	192.653.000	192.438.750	99,89	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00
2	BG.5679 ABD.002	Rekomendasi Kebijakan Hasil Pengkajian/Penelitian atas Instrumen HAM Internasional	275.370.000	272.735.040	99,04	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00
3	BG.5679 ABD.003	Rekomendasi Kebijakan Hasil Pengkajian/Penelitian atas Permasalahan HAM	479.656.000	475.597.987	99,15	2	2	Rekomendasi Kebijakan	100,00
4	BG.5679 AEF.001	Penyebarluasan Wawasan HAM	1.580.225.000	1.577.909.267	99,85	9.000	9.106	Orang	101,18
5	BG.5679 AEF.002	Diseminasi Nilai-Nilai HAM di Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh	68.950.000	68.950.000	100,00	160	283	Orang	176,88
6	BG.5679 AEF.003	Diseminasi Nilai-Nilai HAM di Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat	74.931.000	74.918.000	99,98	130	165	Orang	126,92
7	BG.5679 AEF.005	Diseminasi Nilai-Nilai HAM di Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat	62.470.000	62.457.300	99,98	100	125	Orang	125,00
8	BG.5679 AEF.006	Diseminasi Nilai-Nilai HAM di Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah	31.672.000	31.660.000	99,96	100	85	Orang	85,00
9	BG.5679 AEF.007	Diseminasi Nilai-Nilai HAM di Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku	65.000.000	64.945.500	99,92	50	65	Orang	130,00
10	BG.5679 AEF.008	Diseminasi Nilai-Nilai HAM di Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua	60.300.000	59.946.500	99,41	15	33	Orang	220,00
11	BG.5679 AFA.001	Standar Norma dan Pengaturan HAM	896.722.000	895.119.587	99,82	2	2	NSPK	100,00
12	BG.5679 FAB.001	Sistem Informasi Diseminasi Nilai-nilai HAM	88.400.000	88.316.040	99,91	4	4	Sistem Informasi	100,50
13	BG.5679 UAB.001	Pusat Sumber Daya HAM Nasional	2.503.425.000	2.497.136.557	99,75	1	1	Sistem Informasi	100,00
14	BG.5680 BCC.001	Layanan Pengaduan Perkara Dugaan Pelanggaran HAM	1.103.665.000	1.099.140.711	99,59	3.360	3.131	Perkara	93,18
15	BG.5680 BCC.002	Perkara Pelanggaran HAM yang ditangani melalui mekanisme pemantauan, penyelidikan dan pengawasan HAM	1.831.984.000	1.810.919.673	98,85	595	508	Perkara	85,38
16	BG.5680 BCC.003	Perkara pelanggaran HAM yang ditangani melalui mekanisme mediasi	1.409.453.000	1.407.556.708	99,87	100	125	Perkara	125,00
17	BG.5680 BCC.004	Penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat	272.459.000	252.155.118	92,55	1	1	Perkara	92,00
18	BG.5680 BCC.005	Perkara Pelanggaran HAM atas Isu-isu aktual dan nasional di Indonesia	247.815.000	245.145.980	98,92	1	1	Perkara	100,00
19	BG.5680 BCC.006	Perkara Mediasi HAM atas Isu-isu aktual dan nasional di Indonesia yang ditangani secara cepat tanggap	57.742.000	56.068.940	97,10	1	1	Perkara	100,00
20	BG.5680 BCC.007	Perkara Dugaan Pelanggaran HAM yang ditangani Kantor Perwakilan Aceh	98.003.000	97.982.750	99,98	10	15	Perkara	150,00
21	BG.5680 BCC.008	Perkara Dugaan Pelanggaran HAM yang ditangani Kantor Perwakilan Sumatera Barat	108.522.000	108.209.000	99,71	10	10	Perkara	100,00
22	BG.5680 BCC.009	Perkara Dugaan Pelanggaran HAM yang ditangani Kantor Perwakilan Kalimantan Barat	122.018.000	121.946.717	99,94	45	39	Perkara	86,67
23	BG.5680 BCC.010	Perkara Dugaan Pelanggaran HAM yang ditangani Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah	153.360.000	153.344.000	99,99	15	14	Perkara	93,33
24	BG.5680 BCC.011	Perkara Dugaan Pelanggaran HAM yang ditangani Kantor Perwakilan Maluku	120.950.000	120.947.873	100,00	30	27	Perkara	90,00
25	BG.5680 BCC.012	Perkara Dugaan Pelanggaran HAM yang ditangani Kantor Perwakilan Papua	124.954.000	135.158.500	108,17	6	13	Perkara	216,67
26	BG.5680 BCC.013	Pengelolaan Arsip Berkas Perkara Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Pusat dan Perwakilan (Berkas Perkara)	198.331.000	196.813.430	99,23	3.361	3.808	Berkas Perkara	113,30
27	BG.5680 BKA.001	Laporan Pengamatan Situasi terhadap Isu-isu HAM Strategis	367.716.000	355.050.688	96,56	2	2	Laporan	100,00



Catatan atas Laporan Keuangan Komnas HAM
 Untuk Periode per 31 Desember 2023 (*Audited*)
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

No	Kode RO	Uraian RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	Satuan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	BG.5680 BKA.002	Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara	403.341.000	401.090.705	99,44	1	1	Laporan	100,00
29	BG.5680 BKA.004	Laporan Pengamatan Konsultasi atas isu HAM Strategis Mediasi	239.260.000	237.426.585	99,23	1	1	Laporan	100,00
30	BG.5680 BKA.005	Laporan Pengamatan Situasi terhadap Isu-isu HAM Strategis di Kantor Perwakilan Aceh	20.000.000	20.000.000	100,00	1	1	Laporan	100,00
31	BG.5680 FAB.001	Sistem Database Pengelolaan Penanganan Pelanggaran HAM yang terintegrasi	258.027.000	257.963.375	99,98	2	2	Sistem Informasi	100,00
32	BG.5680 FAB.002	Sistem Layanan Informasi Data Aduan HAM yang terintegrasi melalui Sentra Layanan Informasi Pengaduan (SeLIP) Pelanggaran HAM	222.893.000	219.863.244	98,64	1	1	Sistem Informasi	100,00
33	BG.5680 PBD.001	Penanganan pelanggaran ham yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban	2.402.500.000	2.395.436.922	99,71	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00
34	BG.5680 QKA.001	Pengamatan Situasi HAM di Papua menuju Dialog Kemanusiaan sebagai Strategi Penyelesaian HAM yang Komprehensif	1.582.415.000	1.576.979.364	99,66	2	2	Laporan	100,00
35	WA.3335 EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	644.139.000	644.011.672	99,98	4	4	Dokumen	100,00
36	WA.3335 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	763.512.000	763.359.343	99,98	4	4	Laporan	100,00
37	WA.3335 EBD.965	Layanan Audit Internal	494.331.000	492.858.059	99,70	18	19	Dokumen	105,56
38	WA.3335 FAB.001	Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran	158.382.000	158.317.993	99,96	1	1	Sistem Informasi	100,00
39	WA.3336 BMA.001	Layanan SPBE Komnas HAM	100.073.000	99.894.500	99,82	1	1	Layanan	100,00
40	WA.3336 CAN.001	Layanan Sarana TIK	544.239.000	540.373.898	99,29	74	67	Unit	90,54
41	WA.3336 CCL.001	Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang TIK	231.647.000	231.459.840	99,92	4	4	Unit	100,00
42	WA.3336 EBA.956	Layanan BMN	272.400.000	272.020.613	99,86	1	1	Layanan	100,00
43	WA.3336 EBA.959	Layanan Protokoler	1.008.426.000	1.000.696.796	99,23	1	1	Layanan	100,00
44	WA.3336 EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	437.950.000	437.900.621	99,99	1	1	Layanan	100,00
45	WA.3336 EBA.962	Layanan Umum	656.180.000	652.748.854	99,48	1	1	Layanan	100,00
46	WA.3336 EBA.963	Layanan Data dan Informasi	170.086.000	169.560.300	99,69	1	1	Layanan	100,00
47	WA.3336 EBA.994	Layanan Perkantoran	54.854.320.000	54.144.748.333	98,71	1	1	Layanan	100,00
48	WA.3336 EBB.951	Layanan Sarana Internal	929.071.000	927.634.018	99,85	356	338	Unit	94,94
49	WA.3336 EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.485.722.000	1.477.116.307	99,42	2	2	Unit	100,00
50	WA.3336 EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1.104.009.000	1.103.196.129	99,93	1	1	Layanan	100,00
51	WA.3336 EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	501.792.000	501.740.161	99,99	1	1	Layanan	100,00
52	WA.3336 EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	242.467.000	240.976.152	99,39	1	1	Layanan	100,00
53	WA.3336 FAB.001	Layanan Sistem Manajemen Keuangan	75.910.000	75.877.900	99,96	1	1	Sistem Informasi	100,00
54	WA.6594 BMA.001	Layanan Data dan Informasi Publik	6.230.000	6.160.500	98,88	1	1	layanan	100,00
55	WA.6594 EBA.957	Layanan Hukum	150.044.000	144.961.750	96,61	1	1	Layanan	100,00
56	WA.6594 EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	2.477.527.000	2.433.049.013	98,20	1	1	Layanan	100,00
57	WA.6594 EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	94.406.000	90.253.344	95,60	1	1	Layanan	100,00
58	WA.6594 FAB.001	Sistem Informasi Kerja Sama	74.712.000	73.846.850	98,84	2	2	Sistem Informasi	100,00

2. Komnas Perempuan

Tabel 9. Capaian Output per Fungsi APBN Komnas Perempuan

No	Kode RO	Uraian RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	Satuan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BG.5681 ABD.001	Rekomendasi perangkat standar pencegahan kekerasan terhadap perempuan	236.427.000	235.210.986	99,49	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00
2	BG.5681 ABD.003	Rekomendasi Konsep Pendidikan Perdamaian (Pendidikan Center of Peace) tentang penanganan dan pencegahan konflik terhadap perempuan	145.500.000	145.455.672	99,97	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00
3	BG.5681 ABD.004	Rekomendasi harmonisasi kebijakan dan/atau perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban	1.537.323.000	1.529.544.043	99,49	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00
4	BG.5681 ABD.005	Rekomendasi kebijakan/regulasi yang mengadopsi SPPT-PKKTP	1.145.164.000	1.133.815.032	99,01	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00
5	BG.5681 ABD.006	Rekomendasi penerapan mekanisme keadilan dan pemulihan bagi perempuan korban pelanggaran HAM masa lalu	68.409.000	68.382.975	99,96	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00
6	BG.5681 ABD.007	Rekomendasi hasil Pemantauan serta Penyidikan Pengaduan Kasus KIP sebagai Pelanggaran HAM Perempuan	1.999.956.000	1.993.160.787	99,66	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00



Catatan atas Laporan Keuangan Komnas HAM
 Untuk Periode per 31 Desember 2023 (*Audited*)
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2022
 (*Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain*)

No	Kode RO	Uraian RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	Satuan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	BG.5681 ABD.009	Rekomendasi penyikapan bersama kekerasan terhadap perempuan berbasis data, informasi dan pengetahuan KIP	6.427.048.000	6.359.224.957	98,94	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00
8	BG.5681 ABD.010	Rekomendasi penerapan konsep standar pengaturan mekanisme respon cepat untuk perlindungan Perempuan Pembela HAM	23.876.000	23.865.000	99,95	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00
9	BG.5681 PBD.002	Rekomendasi Instrumen pengukur penyelenggaraan kawasan bebas kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti	927.189.000	923.169.954	99,57	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00
10	BG.5681 PBD.008	Rekomendasi Penguatan Regulasi Mendukung Restorative Justice dalam Penanganan Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan	1.767.265.000	1.762.411.299	99,73	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00
11	BG.5681 PBD.011	Penguatan Kebijakan Hukum di Sektor Ekonomi Terkait Perempuan Korban Kekerasan dan Pekerja Rumah	620.000.000	609.172.402	98,25	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00
12	BG.5681 PBD.012	Rekomendasi Penguatan Hak Kebebasan Sipil-Politik dan Penataan Regulasi dalam Konteks Pada Pencegahan dan Penanganan Intoleransi, Diskriminasi dan Tindakan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan mengarah terorisme	1.000.000.000	975.535.762	97,55	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00
13	BG.5681 PBD.013	Penyusunan rekomendasi penyikapan kebijakan/perda yang diskriminatif terhadap perempuan	980.396.000	954.438.241	97,35	10	10	Rekomendasi Kebijakan	100,00
14	WA.6387 CAN.001	Layanan Sarana TIK Komnas Perempuan	304.661.000	304.629.000	99,99	19	19	Unit	100,00
15	WA.6387 EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3.213.319.000	3.152.523.782	98,11	1	1	Layanan	100,00
16	WA.6387 EBA.994	Layanan Perkantoran	14.131.014.000	14.051.973.175	99,44	1	1	Layanan	100,00
17	WA.6387 EBB.951	Layanan Sarana Internal	101.641.000	101.440.200	99,80	31	31	Unit	100,00

Rincian Capaian Output per Fungsi APBN dikelola dalam dokumen manajerial pada kementerian yang digunakan dalam rangka proses penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan.

Pengungkapan Capaian Output per Prioritas Nasional (PN)

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Komnas HAM terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) VII. Rincian pagu anggaran, realisasi anggaran, dan target serta pencapaian output dari PN tersebut adalah sebagai berikut.

PN VII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pelaksanaan PN VII oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan dengan alokasi anggaran senilai Rp11.783.190.000,00 (Komnas HAM senilai Rp6.488.340.000,00 dan Komnas Perempuan senilai Rp5.294.850.000,00) dan realisasi senilai Rp11.694.280.501,00 (Komnas HAM senilai Rp6.469.552.843,00 dan Komnas Perempuan senilai Rp5.224.727.658,00) dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

1. Komnas HAM

Tabel 10. Capaian Output PN Komnas HAM

No	Kode RO	Uraian RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	Satuan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BG.5679. UAB.001	Pusat Sumber Daya HAM Nasional	2.503.425.000,00	2.497.136.557,00	99,75	1	1	Sistem Informasi	100
2	BG.5680. PBD.001	Penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban	2.402.500.000,00	2.395.436.922,00	99,71	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100
3	BG.5680. QKA.001	Pengamatan Situasi HAM di Papua menuju Dialog Kemanusiaan sebagai Strategi Penyelesaian HAM yang Komprehensif	1.582.415.000,00	1.576.979.364,00	99,66	2	2	Laporan	100

2. Komnas Perempuan

Tabel 11. Capaian Output PN Komnas Perempuan

No	Kode RO	Uraian RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	Satuan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BG.5681. PBD.002	Penyusunan rekomendasi penyikapan kebijakan/perda yang diskriminatif	980.396.000,00	954.438.241,00	97,35	10	10	Rekomendasi Kebijakan	100



Catatan atas Laporan Keuangan Komnas HAM
 Untuk Periode per 31 Desember 2023 (*Audited*)
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2022
 (*Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain*)

No	Kode RO	Uraian RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ta rg et	Rea li sa si	Satuan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	BG.5681.PBD.008	Rekomendasi Penguatan Regulasi Mendukung Restorative Justice dalam Penanganan Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan	1.767.265.000,00	1.762.411.299,00	99,73	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100
3	BG.5681.PBD.011	Rekomendasi Penguatan Hak Kebebasan Sipil-Politik dan Penataan Regulasi dalam Konteks Pada Pencegahan dan Penanganan Intoleransi, Diskriminasi dan Tindakan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan mengarah terorisme	1.000.000.000,00	975.535.762,00	97,55	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100
4	BG.5681.PBD.012	Rekomendasi Instrumen pengukur penyelenggaraan kawasan bebas kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti	927.189.000,00	923.169.954,00	99,57	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100
5	BG.5681.PBD.013	Penguatan Kebijakan Hukum di Sektor Ekonomi Terkait Perempuan Korban Kekerasan dan Pekerja Rumah	620.000.000,00	609.172.402,00	98,25	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100

B.1. Pendapatan

Realisasi
 Pendapatan
 Rp318.412.191,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah senilai Rp318.412.191,00 dengan persentase pencapaian tidak dapat ditentukan karena tidak adanya nilai anggaran sebagai pembanding, yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Komnas HAM adalah sebagai berikut.

Tabel 12. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	318.412.191,00	-
Jumlah	-	318.412.191,00	-

Realisasi Pendapatan TA 2023 merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu berasal dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin serta Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu, diantaranya adalah Penerimaan Kembali Belanja Pegawai dan Belanja Barang dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 13. Rincian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2023

Kode	Akun	Realisasi		% Kenaikan/ (Penurunan)
		2023	2022	
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	125.713.521,00	56.777.776,00	121,41
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	4.028.284,00	2.916.705,00	38,11
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	19.106.142,00	10.894.580,00	75,37
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	35.680.800,00	(100,00)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	20.726.290,00	259.446.396,00	(92,01)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	140.770.766,00	276.425,00	50.825,48
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	8.067.188,00	5.158.800,00	56,38
425991	Penerimaan Kembali Persekol/Uang Muka Gaji	-	57,00	100,00
	Jumlah	318.412.191,00	371.151.539,00	(14,21)

Realisasi Pendapatan untuk periode TA 2023 dibandingkan dengan TA 2022 terdapat penurunan senilai 14,21 persen. Hal ini disebabkan adanya penurunan penerimaan kembali belanja pegawai TAYL.

Realisasi penerimaan negara bukan pajak TA 2023 berasal dari :

- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berasal dari Hasil bersih lelang RL-74/28/2023 sesuai NTPN 61F130N9VQT9TPMU senilai Rp41.599.999,00, hasil bersih lelang RL-107/53/2023 sesuai NTPN 2766F3CIFAKKCTAH senilai Rp1.992.000,00, hasil bersih lelang RL-333/28/2023 sesuai NTPN FAEAA3CIBF30R8AV senilai Rp21.000.090,00, dan hasil bersih lelang RL-693/28/2023 sesuai NTPN 14E2361QUR9IEUF8 senilai Rp61.121.432,00.



- b. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan yang berasal dari jasa giro rekening hibah *European Union* (EU) di Komnas HAM. Rincian atas penyetoran pendapatan jasa lembaga keuangan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 14. Rincian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan TA 2023

No	NTPN	Jumlah	Uraian
1	FC1173CIFANFL9HF	260.236,00	Jasa Giro EU Februari 2023
2	6112B55DEVV4RUFT	424.728,00	Jasa Giro EU Maret 2023
3	BFAE43CIFATA5PJD	411.073,00	Jasa Giro EU April 2023
4	880FE8N3EAEME6QD	424.806,00	Jasa Giro EU Mei 2023
5	817866U8ELDOM7GH	411.102,00	Jasa Giro EU Juni 2023
6	706697QLUG25LTS4	424.834,00	Jasa Giro EU Juli 2023
7	32C873CIFB9ANN6J	424.740,00	Jasa Giro EU Agustus 2023
8	AAE520N9VRL25NK8	411.102,00	Jasa Giro EU September 2023
9	372A755DF0JLM4FB	424.750,00	Jasa Giro EU Oktober 2023
10	75C591JNFMDCQCUT	410.913,00	Jasa Giro EU November 2023
Jumlah		4.028.284,00	

- c. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain berasal dari pembayaran ganti kerugian negara, yaitu TGR atas kehilangan kendaraan bermotor NUP3020104001.18 senilai Rp7.834.992,00 dan TGR pembayaran atas biaya perjalanan dinas an. NAN senilai Rp11.271.150,00 dengan rincian yang disajikan dalam **Lampiran 1**.
- d. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL yang berasal dari pembayaran selisih tunjangan fungsional setelah penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional Komnas HAM sesuai SP2D nomor 231751301001609 senilai Rp5.360.550,00, dan SP2D nomor 231751301024568 senilai Rp7.560.800,00. Serta penyetoran kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pegawai Komnas HAM TA 2022 sesuai NTPN FD60D1JNFLRE01GN senilai Rp87.810,00, NTPN 1194048VV5LFKSUE senilai Rp316.330,00, NTPN 1D10C3CIFBBUNFGH senilai Rp3.834.300,00 dan NTPN 01B1E2G4VGPLJO52 senilai Rp3.566.500,00 dengan rincian yang disajikan dalam **Lampiran 2**.
- e. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL berasal dari pengembalian belanja perjalanan dinas sesuai NTPN 201CA2G4VFUN9NSM senilai Rp19.815.800,00, NTPN 2371B55DEVLUPOHJ senilai Rp402.000,00, NTPN 5464A6U8ELOPOSLU senilai Rp100.400,00, pengembalian kelebihan pembayaran jasa langganan internet PT. Indonet sesuai NTPN A2EA70N9VQQCE108 senilai Rp112.924.043,00, penyetoran kelebihan pembayaran jasa pemeliharaan toilet sesuai NTPN 4AF6148VV5A7J16S senilai Rp1.044.124,00, dan penyetoran dari Biro Dukungan Pemajuan HAM atas LHP BPK 2017 sesuai NTPN CC0EF3CIFBIKHBT1 senilai Rp6.484.399,00 dengan rincian yang disajikan dalam **Lampiran 2**.
- f. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL yang berasal dari penyetoran kelebihan pembayaran atas pekerjaan renovasi Lobby Komnas HAM oleh PT. ARS sesuai NTPN 657F91JNFLJ2BTPD senilai Rp6.754.344,00, serta renovasi ruang konsultasi pengaduan Komnas HAM sesuai NTPN 570EB1JNFLJ2C2O5 senilai Rp754.792,00, dan penyetoran kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Renovasi *Record Center* Komnas HAM sesuai NTPN 8B02361QUQF0CUBC senilai Rp558.052,00 dengan rincian yang disajikan dalam **Lampiran 2**.



B.2. Belanja

Realisasi Belanja
 Negara
 Rp118.214.807.714,00

Realisasi Belanja Komnas HAM untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah senilai Rp118.214.807.714,00 atau mencapai 98,65 persen dari anggaran belanja yang ditetapkan senilai Rp119.831.945.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 15. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Komnas HAM Berdasarkan Sumber Dana TA

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA NEGARA			
RUPIAH MURNI			
Belanja Pegawai	41.330.422.000,00	40.659.841.459,00	98,38
Belanja Barang	63.575.002.000,00	62.733.949.501,00	98,68
Belanja Modal	4.168.006.000,00	4.162.260.434,00	99,86
HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI			
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	10.720.314.000,00	10.620.587.320,00	99,07
Belanja Modal	38.201.000,00	38.169.000,00	99,92
Total Belanja Negara	119.831.945.000,00	118.214.807.714,00	98,65

Realisasi Belanja TA 2023 berasal dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 16. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Komnas HAM Berdasarkan Jenis Belanja TA

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	41.330.422.000,00	40.667.060.712,00	98,39
Belanja Barang	74.295.316.000,00	73.770.556.878,00	99,29
Belanja Modal	4.206.207.000,00	4.200.429.434,00	99,86
Total Belanja Bruto	119.831.945.000,00	118.638.047.024,00	99,00
Pengembalian Belanja	-	423.239.310,00	-
Jumlah	119.831.945.000,00	118.214.807.714,00	98,65

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk TA 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 17. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Komnas HAM Berdasarkan Program TA 2023

Program	Tahun Anggaran 2023		%
	Anggaran	Realisasi	
Program Dukungan Manajemen (074.01.WA)	85.228.210.000,00	84.182.849.414,00	98,77
Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan Internal (3335)	2.060.364.000,00	2.051.955.527,00	99,59
Penyelenggaraan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, Keuangan (3336)	62.614.292.000,00	61.807.350.469,00	98,71
Dukungan Internal Komnas Perempuan (6387)	17.750.635.000,00	17.608.181.757,00	99,20
Penyelenggaraan Layanan Hukum, Humas, dan Kerjasama (6594)	2.802.919.000,00	2.715.361.661,00	96,88
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM (074.01.06)	34.603.735.000,00	34.031.958.300,00	98,35
Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara (5679)	6.379.774.000,00	6.306.607.895,00	98,85
Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM (5680)	11.345.408.000,00	11.077.610.257,00	97,64
Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban (5681)	16.878.553.000,00	16.647.740.148,00	98,63
Total Belanja	119.831.945.000,00	118.214.807.714,00	98,65

*Menggunakan data Realisasi Anggaran Belanja Netto

Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan senilai 14,47 persen dibandingkan pada TA 2022. Kenaikan ini salah satunya disebabkan oleh adanya penyerapan di belanja barang dan belanja modal, yang diantaranya untuk pengadaan peralatan diantaranya *laptop*, *printer*, furnitur, kamera serta jasa konsultan dan pengembangan *website* selama TA 2023.



Tabel 18. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	% Kenaikan/ (Penurunan)
Belanja Pegawai	40.659.841.459,00	39.186.070.491,00	3,76
Belanja Barang	73.354.536.821,00	61.208.731.537,00	19,84
Belanja Modal	4.200.429.434,00	2.877.479.764,00	45,98
Jumlah	118.214.807.714,00	103.272.281.792,00	14,47

B.3. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp40.659.841.459,00

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp40.659.841.459,00 dan Rp39.186.070.491,00 atau terjadi kenaikan senilai 3,76 persen dari tahun anggaran yang lalu. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan aktivitas kerja di luar jam kerja, penambahan pegawai PPPK dan belanja honorarium Anggota/Komisioner Komnas HAM dari semula 7 orang menjadi 9 Komisioner dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 19. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi		% Kenaikan/ (Penurunan)
	2023	2022	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	16.882.174.301,00	17.348.962.580,00	(2,69)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	156.456.834,00	-	100,00
Belanja Honorarium	11.565.361.350,00	9.866.936.950,00	17,21
Belanja Lembur	554.171.000,00	352.185.000,00	57,35
Belanja Tunjangan Khusus	11.508.897.227,00	11.617.986.801,00	(0,94)
Jumlah Belanja Kotor	40.667.060.712,00	39.186.071.331,00	3,78
Pengembalian Belanja Pegawai	7.219.253,00	840,00	859.334,88
Jumlah Belanja	40.659.841.459,00	39.186.070.491,00	3,76

B.4. Belanja Barang

Belanja Barang
Rp73.354.536.821,00

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp73.354.536.821,00 dan Rp61.208.731.537,00 atau terjadi kenaikan senilai 19,84 persen dari tahun anggaran yang lalu yang disebabkan antara lain:

- Kenaikan belanja pemeliharaan yang disebabkan meningkatnya belanja pemeliharaan sebagai penunjang sarana dan prasarana perkantoran bagi pegawai dan pimpinan dalam kegiatan operasional Komnas HAM dan Komnas Perempuan.
- Kenaikan belanja perjalanan dinas dalam dan luar negeri sehubungan dengan peningkatan kegiatan di Komnas HAM dan Komnas Perempuan, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 20. Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	% Kenaikan/ (Penurunan)
Belanja Barang Operasional	19.638.191.922,00	12.819.066.403,00	53,20
Belanja Barang Non Operasional	519.864.340,00	3.275.888.492,00	(84,13)
Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund	129.791.150,00	118.181.000,00	9,82
Belanja Barang Persediaan	1.115.643.899,00	1.176.212.683,00	(5,15)
Belanja Jasa	16.577.708.026,00	16.781.697.976,00	(1,22)
Belanja Pemeliharaan	3.184.773.473,00	2.597.232.309,00	22,62
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	30.590.839.794,00	22.916.067.585,00	33,49
Belanja Perjalanan Luar Negeri	2.013.744.274,00	1.863.411.047,00	8,07
Jumlah Belanja Kotor	73.770.556.878,00	61.547.757.495,00	19,86
Pengembalian Belanja Barang	416.020.057,00	339.025.958,00	22,71
Jumlah Belanja	73.354.536.821,00	61.208.731.537,00	19,84



Rincian terkait pengembalian belanja barang tahun berjalan pada tanggal pelaporan disajikan dalam **Lampiran 3**.

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia yang mulai berlaku tanggal 21 Juni 2023 dan sebagaimana diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023 hal Penggunaan Akun Khusus COVID-19, adanya himbauan untuk tidak lagi menggunakan akun belanja khusus COVID-19 mulai Semester II tahun 2023. Namun terdapat penggunaan Akun COVID-19 di Semester II TA 2023, yakni sebelum terbitnya surat dimaksud. Atas transaksi ini sudah dilakukan koreksi akun SPM pada Triwulan IV TA 2023.

Pada Realisasi Belanja Barang termasuk didalamnya Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi COVID-19 adalah senilai Rp237.637.271,00 dari anggaran senilai Rp238.541.000,00 disajikan dalam **lampiran 4** dengan ringkasan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 21. Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi COVID-19 TA 2023

NO	Akun	Alokasi Anggaran/DIPA	Realisasi	Keterangan
1	521131	63.626.000,00	63.574.170,00	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19
2	521241	14.700.000,00	14.700.000,00	Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19
3	521841	104.578.000,00	104.471.000,00	Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi Covid-19
4	522192	55.637.000,00	54.892.101,00	Belanja Jasa – Penanganan Covid-19
Jumlah Belanja		238.541.000,00	237.637.271,00	

B.5. Belanja Modal

Belanja Modal
Rp4.200.429.434,00

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp4.200.429.434,00 dan Rp2.877.479.764,00 atau terjadi kenaikan senilai 45,98 persen dari tahun anggaran yang lalu dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	% Kenaikan/ (Penurunan)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.086.042.416,00	1.729.745.364,00	20,60
Belanja Modal Lainnya	1.461.244.818,00	1.147.734.400,00	27,32
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya	653.142.200,00	-	100,00
Jumlah Belanja Kotor	4.200.429.434,00	2.877.479.764,00	45,98
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	4.200.429.434,00	2.877.479.764,00	45,98

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp2.086.042.416,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp2.086.042.416,00 dan Rp1.729.745.364,00 atau terjadi kenaikan senilai 20,60 persen dari tahun anggaran yang lalu. Kenaikan ini dikarenakan adanya keperluan pengadaan peralatan dan mesin pada TA 2023. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2023 diprioritaskan untuk pengadaan peralatan diantaranya *laptop* pimpinan, furnitur, dan kamera dengan rincian pada tabel berikut.



Tabel 23. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	% Kenaikan/ (Penurunan)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.086.042.416,00	1.729.745.364,00	20,60
Jumlah Belanja Kotor	2.086.042.416,00	1.729.745.364,00	20,60
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	2.086.042.416,00	1.729.745.364,00	20,60

B.5.2. Belanja Modal Lainnya

*Belanja Modal
Lainnya
Rp2.114.387.018,00*

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp2.114.387.018,00 dan Rp1.147.734.400,00 atau terjadi kenaikan senilai 84,22 persen dari tahun anggaran yang lalu. Kenaikan belanja modal lainnya dikarenakan adanya belanja jasa konsultan untuk renovasi ruang tunggu pengemudi, konstruksi ruang pemantauan dan mediasi, pengembangan *Website* Festival HAM dan Web Tanggap Rasa Komnas HAM serta aplikasi Publikasi HAM yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	% Kenaikan/ (Penurunan)
Belanja Modal Lainnya	1.461.244.818,00	845.134.400,00	72,90
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	653.142.200,00	302.600.000,00	115,84
Jumlah Belanja Kotor	2.114.387.018,00	1.147.734.400,00	84,22
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	2.114.387.018,00	1.147.734.400,00	84,22



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar
Rp2.472.043.118,00

Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp2.472.043.118,00 dan Rp230.468.184,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp2.175.219.857,00

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp2.175.219.857,00 dan Rp4.136.753,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut.

Tabel 25. Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022

KETERANGAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran - 111821	424.792,00	-
Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah - 111822	2.174.795.065,00	4.136.753,00
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan - 111827	-	-
JUMLAH	2.175.219.857,00	4.136.753,00

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran berasal dari Jasa Giro EU Komnas HAM bulan Desember 2023 yang disetorkan tanggal 03 Januari 2024 senilai Rp424.792,00. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah per 31 Desember 2023 senilai Rp2.174.795.065,00 terdiri dari:

1. Hibah EU Komnas Perempuan senilai Rp1.652.854.177,00 yang diterima dan sudah disahkan pendapatannya pada TA 2023 dan perjanjian hibah ini berlangsung sampai 31 Desember 2025 (bersifat *multiyear*);
2. Terdapat *Indirect Cost* Hibah EU Komnas HAM senilai Rp521.891.653,00 yang diterima pada tanggal 18 Januari 2024 namun tidak masuk ke dalam revisi DIPA TA 2023 karena tidak dilakukan belanjanya, sehingga dilakukan pengembalian ke kas negara sesuai NTPN 82EA81GCACKPUVFV, serta pengembalian sisa dana hibah EU senilai Rp49.235,00 yang juga telah dikembalikan ke kas negara sesuai NTPN 1F2410JUQI2DHVG8 tanggal 18 Januari 2024.



Tabel 26. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember TA 2023

NO	URAIAN	TUNAI	BANK	TOTAL
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 111821				
1	BPg175.KOMNASHAM	-	-	-
2	RPL 140 KOMNAS HAM 2C3SQYHA (UN-WOMEN)	-	-	-
3	RPL 140 KOMNAS HAM 2VEB1RVA (UNFPA)	-	-	-
4	RPL 140 KOMNAS HAM PDHL KOMNAS HAM - 2GM6ZCLA (EU Komnas Perempuan)	-	-	-
5	RPL 140 KOMNAS HAM PDHL KOMNAS HAM - 266FLDEA (EU Komnas HAM)	-	424.792,00	424.792,00
Total Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		-	424.792,00	424.792,00
Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah 111822				
1	RPL 140 KOMNAS HAM 2C3SQYHA (UN-WOMEN)	-	-	-
2	RPL 140 KOMNAS HAM 2VEB1RVA (UNFPA)	-	-	-
3	RPL 140 KOMNAS HAM PDHL KOMNAS HAM - 2GM6ZCLA (EU Komnas Perempuan)	-	1.652.854.177,00	1.652.854.177,00
4	RPL 140 KOMNAS HAM PDHL KOMNAS HAM - 266FLDEA (EU Komnas HAM)	-	521.940.888,00	521.940.888,00
Total Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah		-	2.174.795.065,00	2.174.795.065,00
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan 111827				
1	RPL 140 KOMNAS HAM 2C3SQYHA (UN-WOMEN)	-	-	-
2	RPL 140 KOMNAS HAM 2VEB1RVA (UNFPA)	-	-	-
3	RPL 140 KOMNAS HAM PDHL KOMNAS HAM - 2GM6ZCLA (EU Komnas Perempuan)	-	-	-
4	RPL 140 KOMNAS HAM PDHL KOMNAS HAM - 266FLDEA (EU Komnas HAM)	-	-	-
Total Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah yang Belum Disahkan		-	-	-
Jumlah		-	2.175.219.857,00	2.175.219.857,00

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan disajikan dalam Lampiran 5.

C.1.2. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan
 Tuntutan
 Perbendaharaan/Tuntutan
 Ganti Rugi (TP/TGR)
 Rp19.598.628,00

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp19.598.628,00 dan Rp22.863.204,00.

Tabel 27. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Debitur	Uraian	Saldo Piutang	Bagian Lancar
NAN	Piutang TGR atas Perjalanan Dinas	19.598.628,00	19.598.628,00
Jumlah	-	19.598.628,00	19.598.628,00

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak
 Tertagih – Bagian Lancar
 Tagihan Tuntutan
 Perbendaharaan/Tuntutan
 Ganti Rugi Rp97.993,00

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp97.993,00 dan Rp114.316,00.



**Tabel 28. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	19.598.628,00	0,50%	97.993,00
Kurang Lancar			
Diragukan			
Macet			
Jumlah	19.598.628,00		97.993,00

C.1.4. Beban Dibayar Dimuka

*Beban Dibayar
Dimuka
Rp113.925.273,00*

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp113.925.273,00 dan Rp13.490.098,00. Beban dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian beban dibayar dimuka Komnas HAM TA 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 29. Perbandingan Rincian Beban Dibayar Dimuka TA 2023 dan 2022

Akun	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
512411	Potongan Tunjangan Kinerja PNS	13.899.090,00	13.490.098,00
521111	Biaya Perpanjangan Zoom Komnas Perempuan, Lisensi Firewall, Antivirus, Mail Server dan SSL	79.662.400,00	
521131	Biaya Perpanjangan Zoom Komnas HAM	8.328.145,00	
521219	Biaya Hosting dan Google Storage	8.733.850,00	
522191	Biaya Lisensi Survey Mongkey, sertifikat keamanan website SSL	3.301.788,00	
	Jumlah	113.925.273,00	13.490.098,00

*Persediaan
Rp163.397.353,00*

C.1.5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp163.397.353,00 dan Rp190.092.445,00 merupakan persediaan bahan untuk operasional yaitu barang konsumsi dan barang untuk pemeliharaan dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 30. Perbandingan Rincian Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 2022

Persediaan	Tahun 2023	Tahun 2022
Barang Konsumsi	162.725.353,00	182.541.385,00
Barang Untuk Pemeliharaan	672.000,00	7.551.060,00
Suku Cadang	-	-
Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	163.397.353,00	190.092.445,00

Rincian Persediaan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap
Rp91.196.395.958,00*

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp91.196.395.958,00 dan Rp17.999.109.191,00.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Komnas HAM



termasuk Komnas Perempuan berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya.

Tanah
Rp78.324.273.000,00

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Komnas HAM per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp78.324.273.000,00 dan Rp0,00. Komnas HAM telah menerima transfer masuk tanah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional berdasarkan dengan BAST nomor 47/PI.02.09/0.3.1/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berlokasi di Jalan Cisadane Nomor 25-25A, Cikini, Jakarta Pusat 10330 dengan luas tanah 1.493 m².

Tabel 31. Rincian Mutasi Tanah TA 2023

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	-
Mutasi Tambah:	78.324.273.000,00
Pembelian	-
Hibah	-
Reklasifikasi Masuk	-
Transfer Masuk	78.324.273.000,00
Mutasi Kurang:	-
Revaluasi Aset	-
Penghapusan	-
Saldo per 31 Desember 2023	78.324.273.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	78.324.273.000,00

Peralatan dan Mesin
Rp28.374.184.059,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp28.374.184.059,00 dan Rp28.606.325.064,00. Rincian Mutasi peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 32. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin TA 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	28.606.325.064,00
Mutasi Tambah:	5.034.381.624,00
Pembelian	2.086.042.416,00
Belanja Modal Peralatan Mesin yang Masih Harus dibayar	-
Kapitalisasi	-
Hibah	-
Transfer Masuk	2.833.211.058,00
Reklasifikasi Masuk	106.425.150,00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	666.000,00
Perolehan Lainnya	8.037.000,00
Mutasi Kurang:	5.266.522.629,00
Penghentian Aset dari Penggunaan	5.053.394.479,00
Penghapusan	-
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	204.425.150,00
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	8.703.000,00
Peralatan dan Mesin yang Belum diregister	-
Saldo per 31 Desember 2023	28.374.184.059,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	23.360.111.453,00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	5.014.072.606,00



Mutasi tambah peralatan dan mesin senilai Rp5.034.381.624,00 yang terdiri atas:

1. Pembelian peralatan dan mesin senilai Rp2.086.042.416,00;
2. Transfer masuk senilai Rp2.833.211.058,00 sesuai dengan BAST nomor 47/PI.02.09/0.3.1/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
3. Reklasifikasi masuk senilai Rp106.425.150,00 berasal dari:
 - a. memorandum 005/PI.02/XI/2023 tanggal 10 November 2023 senilai Rp14.025.800,00;
 - b. memorandum 1/PI.02/II/2024 tanggal 11 Desember 2023 senilai Rp63.999.350,00;
 - c. memorandum 5/PI.02/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 senilai Rp28.400.000,00;
4. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah senilai Rp666.000,00 berasal dari:
 - a. memorandum 5/PI.02/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 senilai Rp180.000,00;
 - b. memorandum 1/PI.02/II/2024 tanggal 11 Desember 2023 senilai Rp486.000,00;
5. Perolehan Lainnya senilai Rp8.037.000,00 berasal dari:
 - a. memorandum 005/PI.02/XI/2023 tanggal 10 November 2023 senilai Rp1.599.000,00;
 - b. memorandum 1/PI.02/II/2024 tanggal 11 Desember 2023 senilai Rp6.438.000,00.

Mutasi kurang peralatan dan mesin senilai Rp5.266.522.629,00 yang terdiri atas:

1. Penghentian aset dari penggunaan berupa peralatan dan mesin karena rusak berat senilai Rp5.053.394.479,00 berasal dari:
 - a. Berita Acara nomor 008/PI.02.06/XI/2023 tanggal 17 November 2023 senilai Rp4.493.413.191,00;
 - b. Berita Acara nomor 027/KB/PI.02.06/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022 senilai Rp68.233.532,00;
 - c. Berita Acara nomor 07/PI.02.06/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 senilai Rp491.747.756,00.
2. Reklasifikasi Keluar senilai Rp204.425.150,00 berasal dari:
 - a. memorandum 005/PI.02/XI/2023 tanggal 10 November 2023 senilai Rp14.025.800,00;
 - b. memorandum 1/PI.02/II/2024 tanggal 11 Desember 2023 senilai Rp63.999.350,00;
 - c. memorandum 5/PI.02/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 senilai Rp28.400.000,00;
 - d. NKF-009/074/PB.6/2024 senilai Rp98.000.000,00.
3. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang senilai Rp8.703.000,00 berasal dari:
 - a. memorandum 005/PI.02/XI/2023 tanggal 10 November 2023 senilai Rp1.599.000,00;
 - b. memorandum 5/PI.02/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 senilai Rp180.000,00;
 - c. memorandum 1/PI.02/II/2024 tanggal 11 Desember 2023 senilai Rp6.924.000,00.

Rincian Peralatan dan Mesin beserta Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.



*Gedung dan
Bangunan
Rp6.587.052.160,00*

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp6.587.052.160,00 dan Rp13.663.103.000,00.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

Tabel 33. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2023

Saldo per 31 Desember 2022	13.663.103.000,00
Mutasi Tambah	3.835.823.160,00
Pembangunan Gedung	-
Koreksi Pencatatan	-
Transfer masuk	3.835.823.160,00
Mutasi Kurang:	10.911.874.000,00
Koreksi Pencatatan	-
Transfer keluar	10.911.874.000,00
Saldo per 31 Desember 2023	6.587.052.160,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	2.165.885.163,00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	4.421.166.997,00

Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Komnas HAM berupa 5 unit di Hayam Wuruk Plaza Lantai 18 dan di Jalan Cisadane Nomor 25-25A, Cikini, Jakarta Pusat dengan luas bangunan 1.076 M² (2 lantai).

Mutasi tambah gedung dan bangunan berasal dari transfer masuk Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp3.805.954.160,00, Gedung Pos Jaga Permanen senilai Rp14.353.000,00, dan Pagar Permanen senilai Rp15.516.000,00 sesuai dengan BAST nomor 47/PI.02.09/0.3.1/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Mutasi keluar gedung dan bangunan berasal dari transfer keluar Gedung dan Bangunan 18 unit senilai Rp10.911.874.000,00 sesuai dengan BAST nomor 66/PI.02.09/0.3.1/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 tentang Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara Dari Komisi Nasional Hak Asasi Nasional Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya
Rp2.959.766.855,00*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp2.959.766.855,00 dan Rp1.495.517.998,00. Aset Tetap Lainnya terdiri atas buku, serial, audio-visual, pahatan, dan alat bercorak kebudayaan lainnya dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 34. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya TA 2023

Saldo per 31 Desember 2022	1.495.517.998,00
Mutasi Tambah:	2.137.880.825,00
Pembelian	15.000.000,00
Transfer Masuk	659.534.400,00
Reklasifikasi Masuk	1.463.346.425,00
Mutasi Kurang:	673.631.968,00
Koreksi Pencatatan	673.631.968,00
Saldo per 31 Desember 2023	2.959.766.855,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	2.959.766.855,00

Mutasi tambah berasal dari:

1. Pembelian buku perpustakaan Komnas HAM senilai Rp15.000.000,00 sesuai dengan SP2D nomor 231751301018054;
2. Transfer masuk buku perpustakaan Komnas HAM senilai Rp657.034.400,00 dan lukisan senilai Rp2.500.000,00 sesuai dengan BAST nomor 47/PI.02.09/0.3.1/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
3. Reklasifikasi masuk Aset Tetap Renovasi yang belum dapat diserahkan ke instansi pemilik aset karena renovasi yang baru diselesaikan di akhir tahun 2023. Aset Tetap Renovasi tersebut terdiri dari:
 - a. Ruang tunggu driver wartawan dan kolaborasi sesuai BAST nomor 036/BASTP/PPK-SARPRAS/IX/2023 senilai Rp274.000.000,00;
 - b. Ruang HHK sesuai dokumen nomor RCP/056/KNHAM/XI/2023 senilai Rp174.000.000,00;
 - c. Ruang Pemantauan dan Mediasi sesuai BAST nomor 043/BASTP/PPK-SARPRAS/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 senilai Rp366.247.318,00, atas aset tetap renovasi ini terdapat koreksi BPK dengan menambahkan Partisi Geser Penyekat Ruangan senilai Rp98.000.000,00 dan Atap Kanopi senilai Rp40.008.618,00 dan senilai Rp47.413.489,00 sesuai dengan NKF-009/074/PB.6/2024;
 - d. Renovasi Gedung Kantor Perwakilan Papua sesuai BAST nomor 028/BASTP/PPK-SARPRAS/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 senilai Rp463.677.000,00;

Mutasi kurang berasal dari koreksi pencatatan senilai Rp658.034.400,00 terdiri dari penghentian aset dari penggunaan sesuai Berita Acara nomor 008/PI.02.06/XI/2023 tanggal 17 November 2023 berupa Lukisan Kanvas senilai Rp1.000.000,00, majalah senilai Rp760.000,00, laporan senilai Rp9.273.000,00, dan monografi senilai Rp647.001.400,00 serta Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Pemantauan dan Mediasi Komnas HAM senilai Rp3.720.918,00, Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama senilai Rp9.175.450,00, dan Kekurangan Volume Pekerjaan Renovasi Ruang Tunggu Pengemudi, Wartawan, dan R. Kolaborasi Komnas HAM senilai Rp2.701.200,00 sesuai dengan NKF-009/074/PB.6/2024.

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini.



*Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp477.116.500,00*

C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp477.116.500,00 dan Rp477.116.500,00. Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 terdiri dari kegiatan Renovasi Gedung Pola (Komnas Perempuan) yang prosesnya sampai dengan tahap perencanaan pada TA 2020, yang dikarenakan adanya pembatasan-pembatasan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan sedang dalam proses pengajuan anggaran, sehingga proses konstruksinya direncanakan akan dilaksanakan pada TA 2024.

Tabel 35. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2023

Uraian	Renovasi Gedung Pola (Komnas Perempuan)
Saldo per 31 Desember 2022	477.116.500,00
Mutasi tambah:	-
Jasa Konsultan Perencana	-
Jasa Konsultan Pengawas	-
Biaya Konstruksi	-
Mutasi kurang	-
Penyerahan (TK/Hibah)	-
Saldo per 31 Desember 2023	477.116.500,00

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp25.525.996.616,00*

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp25.525.996.616,00 dan Rp26.242.953.371,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dengan menggunakan data per 31 Desember 2023.

Tabel 36. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2023

NO	ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Peralatan dan Mesin	28.374.184.059,00	23.360.111.453,00	5.014.072.606,00
2	Gedung dan Bangunan	6.587.052.160,00	2.165.885.163,00	4.421.166.997,00
	Akumulasi Penyusutan	34.961.236.219,00	25.525.996.616,00	9.435.239.603,00

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini.

*Piutang Jangka
Panjang
Rp3.737.867,00*

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp3.737.867,00 dan Rp19.500.225,00. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Komnas HAM merupakan Piutang TP/TGR.



*Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan /
Tuntutan Ganti Rugi
Rp166.119.650,00*

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Komnas HAM per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp166.119.650,00 dan Rp181.961.216,00. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Piutang Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal Neraca dan akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi terdiri dari Piutang CV. BSM atas belanja sewa kendaraan yang menjadi temuan BPK.

Tabel 37. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi TA 2023

Debitur	Uraian	Saldo Piutang	Piutang Jangka Panjang
RSR	Piutang TGR atas Perjalanan Dinas	3.756.650,00	3.756.650,00
CV. BSM	Piutang TGR atas Sewa Kendaraan	162.363.000,00	162.363.000,00
Total		166.119.650,00	166.119.650,00

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih - Piutang
Jangka Panjang
Rp162.381.783,00*

C.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp162.381.783,00 dan Rp162.460.991,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih TP/TGR merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas TP/TGR adalah sebagai berikut.

Tabel 38. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	3.756.650	0,50%	18.783,00
Kurang Lancar			
Diragukan			
Macet	162.363.000	100%	162.363.000,00
Jumlah		-	162.381.783,00

Penurunan penyisihan Piutang tak tertagih jangka panjang tahun 2023 berasal dari pembayaran Piutang TGR atas kehilangan motor dan perjalanan dinas.

Atas Piutang Tak Tertagih CV. BSM telah dilakukan penagihan sesuai Surat Penagihan Pembayaran Hutang III Nomor 320A/S.0.0.3/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018, namun tidak didapatkan hasil yang sesuai sehingga atas piutang tersebut dimasukkan ke dalam katagori piutang macet sesuai PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.



Aset Lainnya
Rp1.124.166.944,00

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp1.124.166.944,00 dan Rp692.156.484,00. Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Komnas HAM terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud
Rp2.627.377.400,00

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp2.627.377.400,00 dan Rp1.805.914.700,00.

Tabel 39. Rincian Aset Tak Berwujud TA 2023

NO	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	2.627.377.400,00
2	ATB Lainnya	-
Jumlah		2.627.377.400,00

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi Aset Tak Berwujud pada Satker Komnas HAM adalah sebagai berikut.

Tabel 40. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud TA 2023

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	1.805.914.700,00
Mutasi Tambah:	821.462.700,00
Pengadaan atau Pengembangan	821.462.700,00
Transfer Masuk	-
Mutasi Kurang:	-
Transfer Keluar	-
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2023	2.627.377.400,00
Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	- 1.760.201.027,00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	867.176.373,00

Mutasi tambah aset tak berwujud berasal dari pengadaan dan pengembangan senilai Rp821.462.700,00 yang terdiri dari:

1. SP2D nomor 231751301036147 untuk Pengembangan *Website* Festival HAM senilai Rp24.975.000,00;
2. SP2D nomor 231751302031698 untuk Pengembangan *Website* Tanggap Rasa Komnas HAM senilai Rp14.985.000,00;
3. SP2D nomor 231751301039311 untuk Pengembangan Publikasi HAM Berbasis Android menjadi iOS *Development* senilai Rp29.992.200,00;
4. Pengembangan aplikasi e-Sakip sesuai dengan BAST nomor 00044/UP_TUP/650236/2023 senilai Rp62.500.000,00;
5. SP2D nomor 231751301047091 dan 231751301053824 untuk Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Opini Publik atas Layanan Pengaduan senilai Rp49.950.000,00;
6. SP2D nomor 231751701010440 untuk Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Eclik Biro Umum senilai Rp68.320.500,00;
7. SP2D nomor 231751302051131 untuk Pengembangan SI Pusdahamnas senilai Rp310.800.000,00;
8. 036/BASTP/PPK-PENEGAKAN/X/2023 untuk Pembuatan Sistem Katalog Elektronik (Ekatalog) Penanganan Pengaduan HAM senilai Rp100.000.000,00;



9. 035/BASTP/PPK-PENEGAKAN/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023 untuk Pengembangan Aplikasi Pengaduan HAM Online senilai Rp100.000.000,00;
10. 00053/UP_TUP/650236/2023 untuk Pengembangan Aplikasi Database Kerjasama senilai Rp59.940.000,00.

C.4.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

*Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp254.452.000,00*

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp254.452.000,00 dan Rp0,00. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya berupa Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). RPATA adalah rekening lain-lain milik BUN untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Tabel 41. Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

NO	Uraian	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai
1	Layanan cloud contact center Komnas Perempuan	249991302001305	8 Januari 2024	93.180.000,00
2	Service charge gendung kantor Hayam Wuruk Tahun Anggaran 2023	249991302000842	5 Januari 2024	65.792.000,00
3	Jasa tenaga kebersihan (OB) Komnas HAM	249991302000842	5 Januari 2024	95.480.000,00
Jumlah				254.452.000,00

C.4.3. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain
Rp1.729.433.172,00*

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp1.729.433.172,00 dan Rp3.339.937.897,00. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Komnas HAM serta dalam proses penghapusan dari BMN. Rincian Aset Lain-lain adalah sebagai berikut.

Tabel 42. Rincian Aset Lain-lain TA 2023

No	Uraian	Nilai
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	303.146.483,00
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	1.426.286.689,00
Jumlah		1.729.433.172,00

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut.

Tabel 43. Rincian Mutasi Aset Lain-lain TA 2023

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	3.339.937.897,00
Mutasi Tambah:	6.071.584.834,00
Penghentian aset dari penggunaan	6.071.584.834,00
Mutasi Kurang:	7.682.089.559,00
Penghapusan BMN	7.682.089.559,00
Saldo per 31 Desember 2023	1.729.433.172,00
Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	1.726.894.601,00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	2.538.571,00

Mutasi tambah Aset Lain-lain berupa penghentian aset dari penggunaan senilai Rp6.071.584.834,00 berasal dari:



1. Berita Acara nomor 027/KB/PI.02.06/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022 senilai Rp68.233.532,00;
2. Berita Acara nomor 008/PI.02.06/XI/2023 tanggal 17 November 2023 senilai Rp5.213.036.091,00;
3. Berita Acara nomor 07/PI.02.06/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 senilai Rp491.747.756,00;
4. Transfer Masuk (Henti Guna) sesuai dengan BAST nomor 47/PI.02.09/0.3.1/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia senilai Rp298.567.455,00.

Mutasi kurang Aset lain-lain berupa penghapusan BMN senilai Rp7.682.089.559,00 terdiri dari:

- a. Aset Tak Berwujud
 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI nomor 182 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud dibawah Rp100.000.000,00 senilai Rp1.006.515.103,00;
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI nomor 211 Tahun 2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud diatas Rp100.000.000,00 senilai Rp118.205.400,00.
- b. Aset Tetap
 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI nomor 210 Tahun 2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp554.017.754,00;
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI Nomor 304 Tahun 2023 tanggal 17 November 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp491.747.756,00;
 3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI Nomor 322 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp5.511.603.546,00.

Tabel 44. Rincian Aset Lain-lain TA 2023

No	Uraian	Nilai
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	31.340.000,00
2	Alat Kantor	186.000.000,00
3	Alat Rumah Tangga	
4	Alat Studio	9.119.500,00
5	Alat Komunikasi	
6	Peralatan Pemancar	
7	Alat Kedokteran	
8	Unit Alat Laboratorium	
9	Komputer Unit	59.417.483,00
10	Peralatan Komputer	16.969.500,00
11	Bahan Perpustakaan Tercetak	
12	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Makro	
13	Barang Bercorak Kesenian	
14	Barang Bercorak Kebudayaan	300.000,00
15	Aset Tak Berwujud	1.426.286.689,00
Jumlah		1.729.433.172,00

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.



*Akumulasi
Penyusutan /
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp3.487.095.628,00*

C.4.4. Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp3.487.095.628,00 dan Rp4.453.696.113,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 45. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya TA 2023

NO	ASET LAINNYA	NILAI PEROLEHAN	AKUM. PENYUSUTAN/AMORTISASI	NILAI BUKU
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	2.627.377.400,00	1.760.201.027	867.176.373,00
2	ATB Lainnya	-	-	-
Jumlah		2.627.377.400,00	1.760.201.027	867.176.373,00
B	Aset Lainnya			
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	303.146.483,00	300.607.912	2.538.571,00
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	1.426.286.689,00	1.426.286.689	-
Jumlah		1.729.433.172,00	1.726.894.601	2.538.571,00
Total		4.356.810.572,00	3.487.095.628	869.714.944,00

Sehingga saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp300.607.912,00 dan Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp3.186.487.716,00.

*Kewajiban Jangka
Pendek
Rp426.675.320,00*

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp426.675.320,00 dan Rp884.116.296,00.

*Utang Kepada Pihak
Ketiga
Rp426.675.320,00*

C.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp426.675.320,00 dan Rp884.116.296,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Tabel 46. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	40.886.502,00	80.590.457,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	131.336.818,00	803.525.839,00
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	254.452.000,00	-
TOTAL	426.675.320,00	884.116.296,00

Utang Kepada Pihak Ketiga berasal dari:

1. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar berasal dari kekurangan gaji karena Kenaikan Pangkat, uang lembur PNS dan PPPK, uang makan PNS dan PPPK, serta utang kekurangan Kenaikan Gaji Berkala pegawai Komnas HAM Tahun Anggaran 2020 yang masih dalam tahap koordinasi dengan KPPN;
2. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar berasal dari uang lembur PPNPN, tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan internet, tagihan POS, dan tagihan air (PDAM);



3. Utang kepada pihak Ketiga Lainnya berasal dari RPATA yang belum dibayarkan.

Rincian Utang Pada Pihak Ketiga pada tanggal pelaporan disajikan dalam **Lampiran 8**.

C.6. Ekuitas

C.6.1 Ekuitas

Ekuitas
Rp94.369.668.567,00

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp94.369.668.567,00 dan Rp18.057.117.788,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Negara
 Bukan Pajak
 Rp4.453.076,00

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp4.453.076,00 dan Rp2.146.792,00.

Tabel 47. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	& Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) - 425764	4.453.076,00	2.146.735,00	107,43
Pendapatan Anggaran Lain-lain - 425999	-	57,00	(100,00)
Jumlah	4.453.076,00	2.146.792,00	107,43

Pendapatan Negara Bukan Pajak berasal dari Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan yang berasal dari jasa giro rekening hibah EU Komnas HAM.

Tabel 48. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023

No	NTPN	Jumlah	Uraian
1	FC1173CIFANFL9HF	260.236,00	Jasa Giro EU Februari 2023
2	6112B55DEVV4RUFT	424.728,00	Jasa Giro EU Maret 2023
3	BFAE43CIFATA5PJD	411.073,00	Jasa Giro EU April 2023
4	880FE8N3EAEME6QD	424.806,00	Jasa Giro EU Mei 2023
5	817866U8ELD0M7GH	411.102,00	Jasa Giro EU Juni 2023
6	706697QLUG25LTS4	424.834,00	Jasa Giro EU Juli 2023
7	32C873CIFB9ANN6J	424.740,00	Jasa Giro EU Agustus 2023
8	AAE520N9VRL25NK8	411.102,00	Jasa Giro EU September 2023
9	372A755DF0JLM4FB	424.750,00	Jasa Giro EU Oktober 2023
10	75C591JNFMDCQCUT	410.913,00	Jasa Giro EU November 2023
11	9CDD18N3EJ9FE5J7	424.792,00	Jasa Giro EU Desember 2023
Jumlah		4.453.076,00	

Terdapat selisih pada Pendapatan PNBP-LO dengan Pendapatan PNBP-LRA senilai Rp313.959.115,00 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 49. Perbandingan PNBP-LO dengan PNBP-LRA

URAIAN	LO	LRA	Selisih
Pendapatan PNBP	4.453.076,00	318.412.191,00	(313.959.115,00)
Jumlah Selisih	4.453.076,00	318.412.191,00	(313.959.115,00)

Rincian selisih antara Pendapatan PNBP-LO dengan Pendapatan PNBP-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 50. Rincian Selisih PNBP-LO dengan PNBP-LRA

AKUN	URAIAN	LO	LRA	Selisih	Keterangan
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	125.713.521,00	(125.713.521,00)	Pendapatan dari lelang peralatan dan mesin dalam LO menjadi kategori pendapatan kegiatan non operasional
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	4.453.076,00	4.028.284,00	424.792,00	Selisih dari Jasa Giro bulan Desember 2023 yang diterima pada bulan Januari 2024
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	-	19.106.142,00	(19.106.142,00)	Pendapatan dari Pembayaran TGR dalam LO menjadi kategori pendapatan kegiatan non operasional
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	20.726.290,00	(20.726.290,00)	Pengembalian Belanja Pegawai TAYL dalam LO menjadi kategori pendapatan kegiatan non operasional
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	140.770.766,00	(140.770.766,00)	Pengembalian Belanja Barang TAYL dalam LO menjadi kategori pendapatan kegiatan non operasional
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	8.067.188,00	(8.067.188,00)	Pengembalian Belanja Modal TAYL dalam LO menjadi kategori pendapatan kegiatan non operasional
Jumlah Selisih		4.453.076,00	318.412.191,00	(313.959.115,00)	



D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
 Rp40.619.728.512,00

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp40.619.728.512,00 dan Rp39.126.365.641,00. Beban Pegawai merupakan beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Terdapat peningkatan Beban Pegawai sebesar 3,82 persen yang antara lain disebabkan oleh penambahan pegawai PPPK serta kebutuhan untuk bekerja di luar jam kerja sehingga meningkatkan beban lembur pegawai di lingkungan Komnas HAM TA 2023..

Tabel 51. Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	% Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	16.824.950.093,00	17.327.732.228,00	(2,90)
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	157.920.834,00	-	100,00
Beban Honorarium dan Vakasi	11.565.361.350,00	9.866.936.950,00	17,21
Beban Lembur	563.008.000,00	312.589.000,00	80,11
Beban Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito	11.508.488.235,00	11.619.107.463,00	(0,95)
Jumlah Beban	40.619.728.512,00	39.126.365.641,00	3,82

Terdapat selisih pada Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA senilai Rp40.112.947,00 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 52. Perbandingan Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA

URAIAN	LO	LRA	Selisih
Beban-Belanja Pegawai	40.619.728.512,00	40.659.841.459,00	(40.112.947,00)
Jumlah Selisih	40.619.728.512,00	40.659.841.459,00	(40.112.947,00)

Rincian selisih antara Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 53. Rincian Selisih Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA

AKUN	URAIAN	LO	LRA	Selisih	Keterangan
511111	Beban Gaji Pokok PNS	11.834.362.919,00	11.833.154.619,00	1.208.300,00	Jurnal Penyesuaian Beban Gaji Pokok PNS bulan Desember TA 2023 yang belum dibayarkan di TA 2023 Rp1.208.300
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	188.539,00	188.520,00	19,00	Jurnal Penyesuaian Beban Pembulatan Gaji PNS bulan Desember TA 2023 yang belum dibayarkan di TA 2023 Rp19
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	720.677.042,00	720.556.212,00	120.830,00	Jurnal Penyesuaian Beban Tunjangan Suami/Istri PNS bulan Desember TA 2023 yang belum dibayarkan di TA 2023 Rp120.830
511122	Beban Tunj. Anak PNS	194.376.920,00	194.342.696,00	34.224,00	Jurnal Penyesuaian Beban Tunjangan Anak PNS bulan Desember TA 2023 yang belum dibayarkan di TA 2023 Rp34.224
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	397.400.000,00	397.400.000,00	-	-
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	718.972.933,00	756.828.963,00	(37.856.030,00)	Jurnal Pembalik atas Tunjangan Fungsional PNS bulan Desember 2022 yang dibayarkan TA 2023 Rp37.856.030.
511125	Beban Tunj. PPh PNS	42.537.140,00	42.522.438,00	14.702,00	Jurnal Penyesuaian Beban Tunjangan PPh PNS bulan Desember TA 2023 yang belum dibayarkan di TA 2023 Rp14.702
511126	Beban Tunj. Beras PNS	646.710.600,00	646.710.600,00	-	-
511129	Beban Uang Makan PNS	1.746.114.000,00	1.759.641.000,00	(13.527.000,00)	Selisih pencatatan utang uang makan PNS 2023 Rp18.314.000 dengan jurnal balik utang uang makan PNS 2022 Rp31.841.000
511138	Beban Tunj. Khusus Papua PNS	54.480.000,00	54.480.000,00	-	-
511151	Beban Tunj. Umum PNS	469.130.000,00	469.130.000,00	-	-



Catatan atas Laporan Keuangan Komnas HAM
 Untuk Periode per 31 Desember 2023 (*Audited*)
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

AKUN	URAIAN	LO	LRA	Selisih	Keterangan
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	107.937.500,00	107.937.500,00	-	-
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.174,00	1.174,00	-	-
511621	Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	2.966.500,00	2.966.500,00	-	-
511622	Beban Tunj. Anak PPPK	1.305.260,00	1.305.260,00	-	-
511624	Beban Tunj. Fungsional PPPK	16.992.000,00	16.992.000,00	-	-
511625	Beban Tunj. Beras PPPK	5.069.400,00	5.069.400,00	-	-
511628	Beban Uang Makan PPPK	23.649.000,00	22.185.000,00	1.464.000,00	Jurnal Penyesuaian Beban Uang Makan PPPK bulan Desember TA 2023 yang belum dibayarkan di TA 2023 Rp1.464.000
512111	Beban Uang Honor Tetap	11.565.361.350,00	11.565.361.350,00	-	-
512211	Beban Uang Lembur	551.675.000,00	544.163.000,00	7.512.000,00	Selisih pencatatan utang uang lembur PNS 2023 Rp17.977.000 dengan jurnal balik uang lembur PNS 2022 Rp10.465.000
512212	Beban Uang Lembur PPPK	11.333.000,00	10.008.000,00	1.325.000,00	Jurnal Penyesuaian Beban Uang Lembur PPPK bulan Desember TA 2023 yang belum dibayarkan di TA 2023 Rp1.325.000
512411	Beban Pegawai (Tunj. Khusus/ Kegiatan)	11.402.428.476,00	11.402.837.468,00	(408.992,00)	Selisih Jurnal Belanja Dibayar Dimuka atas kelebihan pembayaran Tunjkin Desember 2023 Rp13.899.090 dan 2022 Rp13.490.098
512414	Beban Pegawai Tunj. Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	106.059.759,00	106.059.759,00	-	-
Jumlah Selisih		40.619.728.512,00	40.659.841.459,00	- 40.112.947,00	-

D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan
 Rp1.030.988.931,00*

Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp1.030.988.931,00 dan Rp1.689.449.318,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Penurunan Beban Persediaan senilai 38,97 persen disebabkan oleh pengadaan persediaan yang lebih selektif dan menghindari penumpukan stok persediaan yang sudah ada di gudang.

Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 54. Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	% Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Persediaan Konsumsi	1.030.988.931,00	1.689.449.318,00	(38,97)
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban	1.030.988.931,00	1.689.449.318,00	(38,97)

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
 Jasa
 Rp36.316.453.789,00*

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp36.316.453.789,00 dan Rp33.493.405.106,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Peningkatan beban barang dan jasa senilai 8,43 persen dikarenakan adanya peningkatan pada beban honor output kegiatan dan beban jasa konsultan. Terdapat masukan koreksi dari BPK terkait beban dibayar dimuka sesuai NKF-009/074/PB.6/2024, yang mengurangi nilai dari beban keperluan perkantoran, beban barang operasional – penanganan pandemi covid-19, beban barang non operasional dan beban jasa lainnya. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut.



Tabel 55. Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	% Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Keperluan Perkantoran	13.692.201.965,00	11.062.171.359,00	23,77
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	13.996.400,00	526.630.768,00	(97,34)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	351.555.831,00	257.877.348,00	36,33
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	624.060.000,00	554.610.000,00	12,52
Beban Barang Operasional Lainnya	38.741.795,00	291.136.811,00	(86,69)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	55.246.025,00	206.749.116,00	(73,28)
Beban Bahan	2.724.274.771,00	2.228.993.703,00	22,22
Beban Honor Output Kegiatan	2.002.248.200,00	380.265.000,00	426,54
Beban Barang Non Operasional Lainnya	496.430.490,00	553.643.861,00	(10,33)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	14.700.000,00	115.315.215,00	(87,25)
Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund	127.419.600,00	118.216.400,00	7,79
Beban Langganan Listrik	1.573.903.254,00	1.316.883.437,00	19,52
Beban Langganan Telepon	162.229.672,00	163.385.560,00	(0,71)
Beban Langganan Air	65.593.537,00	70.209.511,00	(6,57)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	826.315.473,00	1.232.188.641,00	(32,94)
Beban Jasa Konsultan	640.018.068,00	285.945.000,00	123,83
Beban Sewa	4.877.002.391,00	4.316.989.242,00	12,97
Beban Jasa Profesi	2.101.360.497,00	1.967.577.600,00	6,80
Beban Jasa Lainnya	5.874.263.719,00	7.402.695.716,00	(20,65)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	54.892.101,00	441.920.818,00	(87,58)
Jumlah	36.316.453.789,00	33.493.405.106,00	8,43

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia yang mulai berlaku tanggal 21 Juni 2023 dan sebagaimana diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023 hal Penggunaan Akun Khusus COVID-19, adanya himbauan untuk tidak lagi menggunakan akun belanja khusus COVID-19 mulai Semester II tahun 2023. Namun terdapat penggunaan Akun COVID-19 di Triwulan III TA 2023, yakni sebelum terbitnya surat dimaksud. Atas transaksi ini tidak dapat dilakukan koreksi akun SPM karena ketidakterediaan pagu.

Terdapat beban barang dan jasa yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 di lingkungan Satker Komnas HAM senilai Rp124.838.126,00 dengan rincian yang disajikan dalam **Lampiran 7**.

Tabel 56. Rincian Beban Barang dan Jasa Penanganan COVID-19 TA 2023

AKUN	URAIAN	TA 2023
521131	Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	55.246.025,00
521241	Beban Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	14.700.000,00
522192	Beban Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	54.892.101,00
Jumlah Beban Kotor		124.838.126,00
Jumlah Pengembalian		-
Jumlah Beban		124.838.126,00

Terdapat selisih pada Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang dan Jasa-LRA senilai Rp545.609.649,00.



Tabel 57. Perbandingan Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang dan Jasa-LRA

AKUN	URAIAN	LO	LRA	Selisih	Keterangan
521111	Beban Keperluan Perkantoran	13.692.201.965,00	13.815.773.115,00	(123.571.150,00)	Selisih pencatatan utang uang lembur ppnpn 2023 Rp12.924.000 dan beban internet 2023 Rp7.157.250 dengan jurnal balik utang uang lembur ppnpn 2022 Rp63.990.000 dan koreksi beban dibayar dimuka Rp79.662.400
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	13.996.400,00	13.996.400,00	-	-
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	351.555.831,00	352.567.184,00	(1.011.353,00)	Selisih antara pencatatan utang pengiriman pos 2023 Rp1.719.531 dengan jurnal balik utang pengiriman pos 2022 sebesar Rp2.730.884.
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	624.060.000,00	624.060.000,00	-	-
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	38.741.795,00	38.741.795,00	-	-
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	55.246.025,00	63.574.170,00	(8.328.145,00)	Koreksi beban dibayar dimuka (zoom komnas ham) sebesar Rp8.328.145
521211	Beban Bahan	2.724.274.771,00	2.727.231.058,00	(2.956.287,00)	Jurnal balik atas belanja kegiatan dari Hibah UN WOMEN (belanja bahan) yang belum dibayar TA 2022
521213	Beban Honor Output Kegiatan	2.002.248.200,00	2.002.248.200,00	-	-
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	496.430.490,00	505.164.340,00	(8.733.850,00)	Koreksi beban dibayar dimuka (hosting dan google storage) sebesar Rp8.733.850
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	14.700.000,00	14.700.000,00	-	-
521711	Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund	127.419.600,00	129.791.150,00	(2.371.550,00)	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi Rp2.371.550
522111	Beban Langganan Listrik	1.573.903.254,00	1.582.983.704,00	(9.080.450,00)	Selisih antara pencatatan utang beban listrik 2023 Rp100.316.506 dengan jurnal balik utang beban listrik 2022 Rp109.396.956
522112	Beban Langganan Telepon	162.229.672,00	165.093.083,00	(2.863.411,00)	Selisih antara pencatatan utang beban telepon 2023 Rp8.946.969 dengan jurnal balik utang beban telepon 2022 Rp11.810.380
522113	Beban Langganan Air	65.593.537,00	65.551.675,00	41.862,00	Selisih antara pencatatan utang beban listrik 2023 Rp272.562 dengan jurnal balik utang beban listrik 2022 Rp230.700.
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	826.315.473,00	829.624.000,00	(3.308.527,00)	Jurnal balik utang beban langganan daya dan jasa lainnya a 2022 Rp3.308.527.
522131	Beban Jasa Konsultan	640.018.068,00	640.018.068,00	-	-
522141	Beban Sewa	4.877.002.391,00	4.883.002.391,00	(6.000.000,00)	Jurnal balik atas belanja kegiatan dari Hibah UN WOMEN (belanja sewa) yang belum dibayar TA 2022
522151	Beban Jasa Profesi	2.101.360.497,00	2.114.860.497,00	(13.500.000,00)	Jurnal balik atas belanja kegiatan dari Hibah UN WOMEN (belanja japorf) yang belum dibayar TA 2022
522191	Beban Jasa Lainnya	5.874.263.719,00	6.238.190.507,00	(363.926.788,00)	Koreksi beban dibayar dimuka Rp3.301.787 dan jurnal balik atas belanja kegiatan dari Hibah UN WOMEN (belanja jasa lainnya) yang belum dibayar TA 2022
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	54.892.101,00	54.892.101,00	-	-
Jumlah Selisih		36.316.453.789,00	36.862.063.438,00	(545.609.649,00)	

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan
 Rp3.208.701.426,00*

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp3.208.701.426,00 dan Rp2.773.252.104,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Peningkatan Beban Pemeliharaan senilai 15,70 persen dikarenakan adanya pemeliharaan gedung kantor dan ruang kerja serta pemeliharaan peralatan dan mesin guna menjaga kualitas dan performa aset Komnas HAM. Terdapat masukan koreksi dari BPK terkait koreksi pencatatan aset tetap renovasi sesuai NKF-009/074/PB.6/2024, yang mengurangi nilai dari beban pemeliharaan gedung dan bangunan.

Rincian beban pemeliharaan TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 58. Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	% Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	930.999.350,00	849.192.859,00	9,63
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	26.793.345,00	26.793.345,00	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.139.558.671,00	1.721.246.105,00	24,30
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	111.350.060,00	176.019.795,00	(36,74)
Jumlah Beban	3.208.701.426,00	2.773.252.104,00	15,70



Terdapat selisih pada Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA senilai Rp23.927.953,00 yang disebabkan oleh reklasifikasi beban persediaan ke beban pemeliharaan, dimana akun ini berada di Modul Persediaan.

Tabel 59. Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA

AKUN	URAIAN	LO	LRA	Selisih	Keterangan
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	930.999.350,00	1.018.421.457,00	(87.422.107,00)	Koreksi Pencatatan Aset Tetap Renovasi - Kanopi depan Ruang Pengaduan yang berasal dari Belanja Pemeliharaan
523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	26.793.345,00	26.793.345,00	-	
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.139.558.671,00	2.139.558.671,00	-	
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	111.350.060,00		111.350.060,00	Reklasifikasi Beban Persediaan ke Beban Pemeliharaan, karena akun ini berada di modul Persediaan.
	Jumlah Selisih	3.208.701.426,00	3.184.773.473,00	23.927.953,00	

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas
Rp31.963.078.906,00

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp31.963.078.906,00 dan Rp24.676.716.779,00. Beban Perjalanan Dinas adalah beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Peningkatan Beban Perjalanan Dinas senilai 29,53 persen tersebut terjadi dikarenakan adanya perjalanan dinas luar negeri pimpinan, peningkatan perjalanan dinas biasa dan kegiatan paket meeting dalam kota guna mendukung tercapainya output Komnas HAM.

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 60. Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	% Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Perjalanan Biasa	11.270.958.046,00	7.251.538.678,00	55,43
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	325.066.600,00	215.650.000,00	50,74
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.525.674.452,00	6.421.540.535,00	17,19
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.841.413.646,00	8.958.749.488,00	21,01
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1.999.966.162,00	1.829.238.078,00	9,33
Jumlah Beban	31.963.078.906,00	24.676.716.779,00	29,53

Terdapat selisih pada Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA senilai Rp228.977.105,00 yang disebabkan oleh belanja perjalanan dinas yang SPMnya sudah terbentuk namun belum terbit SP2Dnya.

Tabel 61. Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA

URAIAN	LO	LRA	Selisih
Beban-Belanja Perjalanan Dinas	31.963.078.906,00	32.192.056.011,00	(228.977.105,00)
Jumlah Selisih	31.963.078.906,00	32.192.056.011,00	(228.977.105,00)

Rincian selisih antara Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 62. Rincian Selisih Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA

AKUN	URAIAN	LO	LRA	Selisih	Keterangan
524111	Beban Perjalanan Biasa	11.270.958.046,00	11.271.708.046,00	(750.000,00)	Koreksi dari akun 524113 ke 524111
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	325.066.600,00	324.316.600,00	750.000,00	Koreksi dari akun 524113 ke 524111
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.525.674.452,00	7.751.418.054,00	(225.743.602,00)	Jurnal balik atas pembayaran utang perjalanan dinas paket meeting dalam kota UNWOMEN
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.841.413.646,00	10.844.647.149,00	(3.233.503,00)	Jurnal balik atas pembayaran utang perjalanan dinas paket meeting luar kota UNWOMEN
524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1.999.966.162,00	1.999.966.162,00	-	-
Jumlah Selisih		31.963.078.906,00	32.192.056.011,00	(228.977.105,00)	

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi
 Rp3.192.952.951,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp3.192.952.951,00 dan Rp2.960.337.347,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Terdapat masukan koreksi dari BPK terkait koreksi pencatatan beban penyusutan gedung dan bangunan sesuai NKf-009/074/PB.6/2024. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 63. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	% Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.290.828.251,00	2.202.934.289,00	3,99
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	258.220.460,00	273.262.060,00	(5,50)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	9.918.000,00	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	4.477.143,00	8.057.143,00	(44,43)
Jumlah Penyusutan	2.553.525.854,00	2.494.171.492,00	2,38
Beban Amortisasi Software	639.427.097,00	460.597.105,00	38,83
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	5.568.750,00	(100,00)
Jumlah Amortisasi	639.427.097,00	466.165.855,00	37,17
Jumlah Beban	3.192.952.951,00	2.960.337.347,00	7,86

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
 Rp95.531,00

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp95.531,00 dan Rp212.307,00. Rincian Beban Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 64. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	% Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	(95.531,00)	212.307,00	(145,00)
Jumlah Beban	(95.531,00)	212.307,00	(145,00)



Beban penyisihan senilai Rp95.531,00 merupakan penyesuaian beban penyisihan piutang TGR sampai dengan 31 Desember 2023 dengan total *settlement* adalah senilai Rp19.106.142,00 sesuai dengan **Lampiran 1**.

D.9. Kegiatan Non Operasional

Defisit Kegiatan Non Operasional
Rp399.372.928,00

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp399.372.928,00 dan Rp300.842.023,00 yang diakibatkan adanya pendapatan dari kegiatan Non Operasional lainnya dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 65. Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	% Kenaikan/ (Penurunan)
Surplus (Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar	(574.602.622,00)	(28.016.224,00)	1.950,96
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122)	125.713.521,00	56.777.776,00	121,41
Beban Pelepasan Aset (596111)	(700.316.143,00)	(84.794.000,00)	725,90
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	177.601.244,00	329.215.247,00	(46,05)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. (425791)	-	53.356.000,00	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911)	20.726.290,00	259.446.396,00	(92,01)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (425912)	140.770.766,00	276.425,00	50.825,48
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (425913)	8.067.188,00	5.158.800,00	56,38
Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111)	-	392.400,00	(100,00)
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (491429)	8.037.000,00	10.585.226,00	(24,07)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(2.371.550,00)	(357.000,00)	100,00
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi (596211)	(2.371.550,00)	(357.000,00)	100,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(399.372.928,00)	300.842.023,00	(232,75)

Surplus dari kegiatan Non Operasional berasal dari:

- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berasal dari Hasil bersih lelang RL-74/28/2023 sesuai NTPN 61F130N9VQT9TPMU senilai Rp41.599.999,00, hasil bersih lelang RL-107/53/2023 sesuai NTPN 2766F3CIFAKKCTAH senilai Rp1.992.000,00, hasil bersih lelang RL-333/28/2023 sesuai NTPN FAEEA3CIFB30R8AV senilai Rp21.000.090,00, dan hasil bersih lelang RL-693/28/2023 sesuai NTPN 14E2361QUR9IEUF8 senilai Rp61.121.432,00.
- Beban Kerugian Pelepasan Aset muncul akibat selisih nilai hasil pelepasan aset yang dihapus karena rusak berat sesuai dengan nomor jurnal J0123850 dengan kerugian senilai Rp647.001.400,00, nomor jurnal J0123848 dengan kerugian senilai Rp23.073.500,00, nomor jurnal J0123849 dengan kerugian senilai Rp11.929.219, nomor jurnal J0123852 dengan kerugian senilai Rp9.273.000,00, nomor jurnal J0123502 dengan kerugian senilai Rp1.600.000,00, nomor jurnal J0123846 dengan kerugian senilai Rp1.435.000,00, nomor jurnal J0123346 dengan kerugian senilai Rp1.260.000,00, dan lainnya.
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL yang berasal dari pembayaran selisih tunjangan fungsional setelah penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional Komnas HAM sesuai SP2D nomor 231751301001609 senilai Rp5.360.550,00, dan SP2D nomor 231751301024568 senilai Rp7.560.800,00. Serta penyetoran kelebihan



pembayaran tunjangan kinerja pegawai Komnas HAM TA 2022 sesuai NTPN FD60D1JNFLRE01GN senilai Rp87.810,00, NTPN 1194048VV5LFKSUE senilai Rp316.330,00, NTPN 1D10C3CIFBBUNFGH senilai Rp3.834.300,00 dan NTPN 01B1E2G4VGPLJO52 senilai Rp3.566.500,00 dengan rincian yang disajikan dalam **Lampiran 2.**

- d. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL berasal dari pengembalian belanja perjalanan dinas sesuai NTPN 201CA2G4VFUN9NSM senilai Rp19.815.800,00, NTPN 2371B55DEVLUPOHJ senilai Rp402.000,00, NTPN 5464A6U8EL0POSLU senilai Rp100.400,00, pengembalian kelebihan pembayaran jasa langganan internet PT. Indonet sesuai NTPN A2EA70N9VQQCE108 senilai Rp112.924.043,00, penyetoran kelebihan pembayaran jasa pemeliharaan toilet sesuai NTPN 4AF6148VV5A7J16S senilai Rp1.044.124,00, dan penyetoran dari Biro Dukungan Pemajuan HAM atas LHP BPK 2017 sesuai NTPN CC0EF3CIFBIKHBT1 senilai Rp6.484.399,00 dengan rincian yang disajikan dalam **Lampiran 2.**
- e. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL yang berasal dari penyetoran kelebihan pembayaran atas pekerjaan renovasi Lobby Komnas HAM oleh PT. ARS sesuai NTPN 657F91JNFLJ2BTPD senilai Rp6.754.344,00, serta renovasi ruang konsultasi pengaduan Komnas HAM sesuai NTPN 570EB1JNFLJ2C2O5 senilai Rp754.792,00, dan penyetoran kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Renovasi Record Center Komnas HAM sesuai NTPN 8B02361QUQF0CUBC senilai Rp558.052,00 dengan rincian yang disajikan dalam **Lampiran 2.**
- f. Pendapatan Perolehan Aset Lainnya disebabkan karena Perolehan Lainnya yang berasal dari koreksi kesalahan nilai aset tetap dan kesalahan kode barang persediaan sesuai memorandum 005/PI.02/XI/2023 tanggal 10 November 2023 senilai Rp1.599.000,00 dan memorandum 1/PI.02/II/2024 tanggal 11 Desember 2023 senilai Rp6.438.000,00.
- g. Beban Kerugian Selisih Kurs yang Belum Terealisasi yang terbentuk saat konversi kurs SP2D nomor 231401103000126 atas pembayaran belanja barang berupa biaya keanggotaan GANHRI TA 2023 dan SP2D nomor 231401105000301 atas pembayaran belanja barang berupa biaya keanggotaan APF TA 2023.



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp18.057.117.788,00

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp18.057.117.788,00 dan Rp21.281.131.772,00.

E.2. Surplus / Defisit LO

Defisit-LO
Rp116.057.117.788,00

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp116.057.117.788,00 dan Rp104.416.749.787,00.

E.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Non Revaluasi
Rp23.634.568,00

Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah senilai Rp23.634.568,00 dan Rp10.585.226,00. Koreksi Aset Non Revaluasi berasal dari koreksi atas kesalahan nilai aset tetap serta kesalahan kode barang persediaan dan aset sesuai memorandum 005/PI.02/XI/2023 tanggal 10 November 2023 senilai Rp1.599.000,00 dan memorandum 1/PI.02/II/2024 tanggal 11 Desember 2023 senilai Rp6.438.000,00 dan NKF-009/074/PB.6/2024 atas Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Pemantauan dan Mediasi Komnas HAM senilai Rp3.720.918,00, Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama senilai Rp9.175.450,00, dan Kekurangan Volume Pekerjaan Renovasi Ruang Tunggu Pengemudi, Wartawan, dan R. Kolaborasi Komnas HAM senilai Rp2.701.200,00.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp193.062.914.183,00

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp193.062.914.183,00 dan Rp101.203.321.029,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 66. Rincian Transaksi Antar Entitas TA 2023

JENIS BEBAN	NILAI KOREKSI
Diterima dari Entitas Lain	- 318.412.191,00
Ditagihkan ke Entitas Lain	107.556.051.394,00
Transfer Masuk	81.507.122.068,00
Transfer Keluar	- 8.511.261.720,00
Pengesahan Hibah Langsung	12.852.297.263,00
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	- 22.882.631,00
	193.062.914.183,00

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)
Rp318.412.191,00

E.4.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)
Rp107.556.051.394,00

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL senilai Rp318.412.191,00 sedangkan DKEL senilai Rp107.556.051.394,00.



Transfer Masuk
Rp81.507.122.068,00

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp81.507.122.068,00 sesuai dengan BAST nomor B-4095/II.2/PL.02.01/7/2023 dan nomor 47/PI.02.09/0.3.1/VII/2023 tentang Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, terdiri dari:

Tabel 67. Rincian Transfer Masuk TA 2023

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Tanah	BRIN	78.324.273.000,00
Peralatan dan Mesin	BRIN	81.714.142,00
Gedung dan Bangunan	BRIN	2.406.597.807,00
Jalan, Irigasi dan Bangunan	BRIN	35.002.719,00
Aset Tetap Lainnya	BRIN	659.534.400,00
Aset Lain-Lain	BRIN	-
TOTAL		81.507.122.068,00

Rincian mutasi transfer masuk adalah sebagai berikut:

Tabel 68. Rincian Mutasi Transfer Masuk TA 2023

Jenis	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	78.324.273.000,00	-	78.324.273.000,00
Peralatan dan Mesin	2.833.211.058,00	2.751.496.916,00	81.714.142,00
Gedung dan Bangunan	3.835.823.160,00	1.429.225.353,00	2.406.597.807,00
Jalan, Irigasi dan Bangunan	61.588.500,00	26.585.781,00	35.002.719,00
Aset Tetap Lainnya	659.534.400,00	-	659.534.400,00
Aset Lain-Lain	298.567.455,00	298.567.455,00	-
TOTAL	86.012.997.573,00	4.505.875.505,00	81.507.122.068,00

Transfer Keluar
Rp8.511.261.720,00

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp8.511.261.720,00 berdasarkan BAST nomor 66/PI.02.09/0.3.1/XII/2023 dan nomor 03/BAST/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 tentang Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, terdiri dari:

Tabel 69. Rincian Transfer Keluar TA 2023

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
Gedung dan Bangunan	KPPU	8.511.261.720,00
TOTAL		8.511.261.720,00

Rincian mutasi transfer keluar adalah sebagai berikut:

Tabel 70. Rincian Mutasi Transfer Keluar TA 2023

Jenis	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Gedung dan Bangunan	10.911.874.000,00	2.400.612.280,00	8.511.261.720,00
TOTAL	10.911.874.000,00	2.400.612.280,00	8.511.261.720,00



Pengesahan Hibah
Langsung
Rp12.852.297.263,00

Pengembalian
Pengesahan Hibah
Langsung
Rp22.882.631,00

E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp12.852.297.263,00. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp22.882.631,00. Rincian Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 71. Rincian Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung TA 2023

No	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1	Komnas Perempuan (UNFPA)	Uang	2.772.352.180,00
2	Komnas Perempuan (UNWOMEN)	Uang	1.722.172.650,00
3	Komnas Perempuan (EU)	Uang	7.835.880.780,00
4	Komnas HAM (EU)	Uang	521.891.653,00
Total Pengesahan			12.852.297.263,00
Pengesahan Pengembalian Hibah			- 22.882.631,00
Jumlah			12.829.414.632,00

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp94.369.668.567,00

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp94.369.668.567,00 dan Rp18.057.117.788,00.



F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Kejadian penting setelah tanggal neraca terdiri dari:

1. Terdapat Jasa Giro EU Komnas HAM bulan Desember 2023 yang disetorkan tanggal 03 Januari 2024 senilai Rp424.792,00.
2. Pada RPATA telah dilakukan penyetoran kepada pihak ketiga berdasarkan SP2D nomor 249991302001305 tanggal 08 Januari 2024; 249991302000842 tanggal 05 Januari 2024; dan 249991302000842 tanggal 05 Januari 2024.
3. Sebagaimana diungkapkan dalam CaLK C.1.1, terdapat *Indirect Cost* Hibah EU Komnas HAM sebesar Rp521.891.653,00 yang telah dikembalikan ke kas negara tanggal 18 Januari 2024 dengan nomor NTPN 82EA81GCACKPUV FV.

Sebagai respon atas hal tersebut, EU sebagai pihak donor pada tanggal 26 Februari 2024 menerbitkan *debit note* Nomor: 3242403072 yang menyatakan bahwa Komnas HAM memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut termasuk denda keterlambatannya kepada EU sebesar EUR32,388.02 dengan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2024.

Atas hal tersebut Komnas HAM telah melakukan rapat koordinasi pada tanggal 29 April 2024 dengan Kementerian Keuangan yang dihadiri oleh:

- a. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPb
 1. Kepala Seksi Akuntansi dan Pelaporan Manajemen Kas Pinjaman dan Hibah
 2. Pelaksana Seksi Akuntansi dan Pelaporan Manajemen Kas Pinjaman dan Hibah
- b. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, DJPPR
 1. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen
 2. Kepala Subdit Analisis dan Pengujian Transaksi Kewajiban Pembiayaan
 3. Kepala Seksi APTKP IV
 4. Kepala Seksi Akuntansi Hibah, Dit. EAS, DJPPR
- c. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah
Yang diwakili oleh Kepala Seksi Penyaluran Pinjaman dan Hibah I, KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah

Hasil dari koordinasi yang telah dilakukan diantaranya:

- a. Dalam pengembalian *indirect cost* ke Kas negara oleh Komnas HAM, apabila tidak terdapat dalam klausul kontrak mengenai istilah pengembalian *indirect cost*, maka yang telah dilakukan Komnas HAM telah sesuai PMK Nomor 99 Tahun 2017 tentang administrasi pengelolaan hibah.
- b. Terkait permintaan pengembalian yang disertai debit note oleh pihak donor, hal ini merupakan kejadian pertama kali yang ditemui oleh Kementerian Keuangan, dimana belum ada peraturan sebelumnya di internal Kementerian Keuangan bila terjadi hal demikian.
- c. Wakil dari Kementerian Keuangan yang hadir meminta Komnas HAM untuk mengirim surat ke Menteri Keuangan untuk memohon solusi atas hal tersebut.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

1. Transaksi resiprokal merupakan transaksi timbal balik antara Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan Satker Penerima Kerja-Pendapatan yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan. Informasi transaksi resiprokal



digunakan oleh Satker Konsolidasi tingkat Kementerian/Lembaga atau entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk melakukan eliminasi. Pada Satker Komnas HAM terdapat transaksi resiprokal dengan Kementerian/Lembaga lain dalam lingkup Pemerintah Pusat yakni terkait dengan pembayaran biaya-biaya pendidikan dan pelatihan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 72. Transaksi Resiprokal TA 2023

No	Satker Intraco	Nilai Rupiah	Skema Pembayaran	Skema Penyetoran
1	450417	Rp5.800.000,00	UP/TUP	Bendahara Penerimaan
2	450417	Rp16.000.000,00	UP/TUP	Bendahara Penerimaan
3	450423	Rp45.890.000,00	LS	Bendahara Penerimaan
4	418934	Rp3.080.000,00	UP/TUP	Bendahara Penerimaan
5	450417	Rp5.800.000,00	UP/TUP	Bendahara Penerimaan
6	450417	Rp2.000.000,00	UP/TUP	Bendahara Penerimaan
7	418934	Rp2.280.000,00	UP/TUP	Kas Negara
8	450417	Rp5.800.000,00	UP/TUP	Bendahara Penerimaan
9	418934	Rp2.430.000,00	UP/TUP	Bendahara Penerimaan
TOTAL		Rp89.080.000,00		



LAMPIRAN



**Rincian Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
sampai dengan 31 Desember 2023**

No	No. SP2D	Tanggal Bayar	Jumlah	Keterangan
1	231751501000045	01 Januari 2023	652.916	TGR Pembayaran ke-6 atas kehilangan Kendaraan Bermotor NUP3020104001.18
2	231751501000074	01 Februari 2023	652.916	TGR Pembayaran ke-7 atas kehilangan Kendaraan Bermotor NUP3020104001.18
3	231751501000210	01 Maret 2023	652.916	TGR Pembayaran ke-8 atas kehilangan Kendaraan Bermotor NUP3020104001.18
4	231751501000376	01 April 2023	652.916	TGR Pembayaran ke-9 atas kehilangan Kendaraan Bermotor NUP3020104001.18
5	231751501000662	01 Mei 2023	652.916	TGR Pembayaran ke-10 atas kehilangan Kendaraan Bermotor NUP3020104001.18
6	231751501000777	01 Juni 2023	652.916	TGR Pembayaran ke-11 atas kehilangan Kendaraan Bermotor NUP3020104001.18
7	231751501000974	01 Juli 2023	652.916	TGR Pembayaran ke-12 atas kehilangan Kendaraan Bermotor NUP3020104001.18
8	231751501001151	01 Agustus 2023	652.916	TGR Pembayaran ke-13 atas kehilangan Kendaraan Bermotor NUP3020104001.18
9	231751501001284	01 September 2023	652.916	TGR Pembayaran ke-14 atas kehilangan Kendaraan Bermotor NUP3020104001.18
10	231751501001366	01 Oktober 2023	652.916	TGR Pembayaran ke-15 atas kehilangan Kendaraan Bermotor NUP3020104001.18
11	231751501001538	01 November 2023	652.916	TGR Pembayaran ke-16 atas kehilangan Kendaraan Bermotor NUP3020104001.18
12	231751501001664	01 Desember 2023	652.916	TGR Pembayaran ke-17 atas kehilangan Kendaraan Bermotor NUP3020104001.18
Jumlah			7.834.992	

No	No. SP2D	Tanggal Bayar	Jumlah	Keterangan
1	231751501000376	01 April 2023	1.252.350	Penyetoran TGR pembayaran ke-1 atas biaya perjalanan dinas (an. NAN)
2	231751501000662	01 Mei 2023	1.252.350	Penyetoran TGR pembayaran ke-2 atas biaya perjalanan dinas (an. NAN)
3	231751501000777	01 Juni 2023	1.252.350	Penyetoran TGR pembayaran ke-3 atas biaya perjalanan dinas (an. NAN)
4	231751501000974	01 Juli 2023	1.252.350	Penyetoran TGR pembayaran ke-4 atas biaya perjalanan dinas (an. NAN)
5	231751501001151	01 Agustus 2023	1.252.350	Penyetoran TGR pembayaran ke-5 atas biaya perjalanan dinas (an. NAN)
6	231751501001284	01 September 2023	1.252.350	Penyetoran TGR pembayaran ke-6 atas biaya perjalanan dinas (an. NAN)
7	231751501001366	01 Oktober 2023	1.252.350	Penyetoran TGR pembayaran ke-7 atas biaya perjalanan dinas (an. NAN)
8	231751501001538	01 November 2023	1.252.350	Penyetoran TGR pembayaran ke-8 atas biaya perjalanan dinas (an. NAN)
9	231751501001664	01 Desember 2023	1.252.350	Penyetoran TGR pembayaran ke-9 atas biaya perjalanan dinas (an. NAN)
Jumlah			11.271.150	



**Rincian Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu
sampai dengan 31 Desember 2023**

Belanja Pegawai TAYL

NO	TANGGAL SP2D	SP2D/KODE BILLING	NTPN	NOMINAL
1	6-Feb-23	231751301001609		5.360.550
2	12-Jun-23	820230609274391	FD60D1JNFLRE01GN	87.810
3	16-Jun-23	231751301024568		7.560.800
4	6-Jul-23	820230706197454	1194048VV5LFKSUE	316.330
5	5-Oct-23	820231003454993	1D10C3CIFBBUNFGH	3.834.300
6	12-Oct-23	820231006904482	01B1E2G4VGPLJO52	3.566.500
Total				20.726.290

Belanja Barang TAYL

NO	TANGGAL SP2D	KODE BILLING	NTPN	NOMINAL
1	3-Jan-23	820230102704022	201CA2G4VFUN9NSM	19.815.800
2	6-Jan-23	820230105096755	2371B55DEVLUPOHJ	402.000
3	24-Jan-23	820230117327880	A2EA70N9VQQCE108	112.924.043
4	8-Mar-23	820230308688574	5464A6U8EL0POSLU	100.400
5	28-Mar-23	820230328648924	4AF6148VV5A7J16S	1.044.124
6	29-Dec-23	820231227649953	CC0EF3CIFBIKHBT1	6.484.399
Total				140.770.766

Belanja Modal TAYL

NO	TANGGAL BUKU	KODE BILLING	NTPN	NOMINAL
1	29-Mar-23	820230328645421	657F91JNFLJ2BTPD	6.754.344
2	29-Mar-23	820230328650501	570EB1JNFLJ2C2O5	754.792
3	28-Mar-23	820230328645996	8B02361QUQF0CUBC	558.052
Total				8.067.188



Rincian Penyetoran Pengembalian Belanja Barang Tahun Berjalan

Pengembalian Belanja Barang Jasa

No.	NAMA WAJIB BAYAR / SETOR	TANGGAL BAYAR	KODE BILLING	NTPN	KODE AKUN	KETERANGAN	SETORAN PER AKUN
1	KOMNASHAM	11/08/2023	700230811879250	D4F330JSRCOCR1QI	522151	Pengembalian belanja barang honorarium narasumber an Hamid Awaluddin sesuai SP2D no 231751303019772 tgl 04082023 dikarenakan Ybs tidak bersedia menerima	3.492.000
Jumlah							3.492.000

Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No.	NAMA WAJIB BAYAR / SETOR	TANGGAL BAYAR	KODE BILLING	NTPN	KODE AKUN	KETERANGAN	SETORAN PER AKUN
1	Komnas HAM	09/02/2023	700230209411441	BDFFD1GAB6OQM6BH	524114	Pengembalian belanja barang berupa perjalanan dinas sesuai SPM No 00039 an Ainani dkk	1.860.000
2	Komnas HAM	22/02/2023	700230222924476	C43B45UDQBL5JILS	524111	Pengembalian belanja barang untuk perjalanan dinas berupa transportasi dan tiket sesuai SPM No 00102 an lis Eka Wulandari dkk	1.232.515
3	Komnas HAM	27/02/2023	700230227174916	4FA145UDQBL9LG4	524111	pengembalian spped yogyakarta no SPP 00126T	211.280
4	Komnas HAM	27/02/2023	700230227619048	6491B7N8Q0Q2SR78	524111	pengembalian uang perjalanan dinas Yogyakarta SPP 00125T	82.880
5	Komnas HAM	06/03/2023	700230306773289	C0B7A8JM9REQPE99	524111	Pengembalian SPD No Sp2d 231751303002239 dan SPM No 00204T an Hidar dkk	1.800.000
6	Komnas HAM	07/03/2023	700230307324348	971E27N8Q0SET8DS	524111	Pengembalian SPD No 00223T atas nama Prabianto Mukti Wibowo dkk 4 orang	350.500
7	Komnas HAM	13/03/2023	700230309724280	387410JSRC9DUG3O	524114	Pengembalian belanja barang untuk perjalanan dinas berupa uang harian dan transportasi sesuai SPM No 00185 an Alip Firmansyah dkk	162.500
8	Komnas HAM	16/03/2023	700230315729676	24A025UDQBNU3OOC	524111	Pengembalian SPD No Sp2D 231751303002240 No SPM 0025 an Dedi Askary dkk	720.000
9	Komnas HAM	27/03/2023	700230327234965	A8925520AH5SLSCL	524111	Pengembalian uang SPD Kegiatan Bimbingan dan Konsultasi ke Kantor Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah pada tanggal 8 sampai dengan 10 Maret 2023 atas nama Ahmad Nurkholis dkk 3 orang	2.568.501
10	Komnas HAM	28/03/2023	700230328826095	88A97520AH5UE7F	524111	Pengembalian belanja perjalanan dinas SPM No 00554T	162.300
11	Komnas HAM	29/03/2023	700230328848182	9123B2CNR1EP03PM	524111	Pengembalian SPD No SPM 00244T an Firdaus dkk	70.000
12	Komnas HAM	30/03/2023	700230329145854	7E54C45IQMJ36FU	524111	Pengembalian SPD Palu JKT SPM No 00551T an Dedi Askary dkk	276.000
13	Komnas HAM	31/03/2023	700230329401955	CF5B520AH5UO0J3	524111	Pengembalian belanja barang untuk perjalanan dinas berupa transportasi sesuai SPM NO 00253 an Amira Hasna dkk	445.500
14	Komnas HAM	31/03/2023	700230331581558	593537N8Q0T61H3M	524111	Pengembalian belanja perjalanan dinas Jakarta Maluku tgl 13 sd 17 Maret 2023	586.010
15	Komnas HAM	03/04/2023	700230403380416	64ED95UDQBQHML60	524111	Pengembalian belanja barang perjalanan dinas Jakarta Sumatera Utara an Pramono Ubaid Thantowi dkk 6 orang	3.607.150
16	Komnas HAM	04/04/2023	700230403190277	301EF6QRA6CTTRG5	524111	Pengembalian SPD kalbar JKT No SPM 00560T an Nelly Yusnita dkk	187.004
17	Komnas HAM	05/04/2023	700230405894576	180D55UDQBQK3CDG	524114	Pengembalian belanja barang untuk perjalanan dinas berupa transportasi dan uang harian sesuai SPM No 00573 an Debby Imas	280.000
18	Komnas HAM	06/04/2023	700230406644337	868DF6QRA6D178JH	524111	Pengembalian belanja barang perjalanan dinas Jakarta Prov Kalimantan Barat an Anis Hidayah dkk 5 orang	1.043.400
19	Komnas HAM	14/04/2023	700230414568674	3525045IQMM31372	524111	Kegiatan Perjalanan dinas tgl 7 sd 10 Maret 2023 an Angga Oktapriyono dkk	387.851
20	Komnas HAM	17/04/2023	700230417969045	39796520AH8J6RSL	524114	Pengembalian belanja barang untuk perjalanan dinas berupa uang harian sesuai SPM No 00590 an Andy Yentriyani	50.000
21	Komnas HAM	18/04/2023	700230418693416	D5AED5UDQBR09V98	524111	Pengembalian sisa perjalanan dinas Jakarta Pontianak tgl 6 sd 8 Maret 2023 an Herizal dkk 2 orang	450.800
22	Komnas HAM	05/05/2023	700230503146179	350758JM9RKM28M3	524111	KEGIATAN SPD NO SPM 00594T TGL 24 MARET 2023 AN MARIA DKK 6 ORG TGL 27 sd 30 MARET 2023 KE BANDUNG JAWA BARAT	3.802.220
23	Komnas HAM	05/05/2023	700230505868640	8984B0JSRCF90BB0	524111	KEKURANGAN PENGEMBALIAN SPDD JAKARTA MALUKU TANGGAL 13 SD 17 MARET 2023 AN ANGGA ZULFIAWAN DKK	148.000
24	Komnas HAM	05/05/2023	700230505366879	1E8508JM9RKO61AV	524111	Pengembalian SPD KALBAR KETAPANG NO SPM 00868T an Nelly Yusnita	79.500
25	Komnas HAM	05/05/2023	700230505384361	3AE491GAB71KUID9	524111	Pengembalian SPD JKT Palu No SPM 00236T an Ahmad Nurkholis dkk	157.000
26	Komnas HAM	08/05/2023	700230508468545	D826B520AHB9GMA1	524111	Pengembalian Sisa Perjalanan Dinas Biasa SPM No 0550	1.088.959
27	Komnas HAM	09/05/2023	700230505775740	061040JSRCF8TGJS	524111	Pengembalian SPD padang jkt No SPM 00561T an Sultanul Arifin dan Rahmawati	45.240
28	Komnas HAM	10/05/2023	700230510416229	A6F9C8JM9RKT04B5	524111	Pengembalian SPD JKT SEMARANG an Markos dkk tgl 12 sd 15 april 2023 dengan no spp 00745T	5.098.500
29	Komnas HAM	11/05/2023	700230505372403	618F0395AS6DO6NJ	524119	Pengembalian belanja barang untuk perjalanan dinas sesuai SPM No 00588 an lis Eka Wulandari dkk	20.227.292
30	Komnas HAM	11/05/2023	700230505907001	EB7A41GAB71LEGPP	524119	Pengembalian belanja barang untuk perjalanan dinas berupa transportasi dan uang harian sesuai SPM No 00572 an Christina Yulita dkk	1.093.600

31	Komnas HAM	11/05/2023	700230511009968	5CA037N8Q12H585G	524111	Pengembalian belanja perjalanan dinas SPP nomor 00914T	941.600
32	Komnas HAM	19/05/2023	700230519565127	29FEA6QRA6GCTAQ7	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas SPP Nomor 00927T	298.800
33	Komnas HAM	19/05/2023	700230519300244	747C945IQMP7E84K	524111	Pengembalian sisa perjalanan Dinas SPM No 00553 tgl 28maret2023	2.078.920
34	Komnas HAM	19/05/2023	700230519041355	949DA520AHBJJBAB	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas SPP Nomor 00924T	448.200
35	Komnas HAM	22/05/2023	700230522848235	22B63520AHBN7GVB	524111	Pengembalian Sisa Belanja perjalanan Dinas SPM No 00757 tgl 10 april 2023	7.500.321
36	Komnas HAM	22/05/2023	700230522575759	FF1B28JM9RL8J6SF	524111	Pengembalian belanja perjalanan dinas SPP Nomor 01059T	1.137.800
37	Komnas HAM	25/05/2023	700230525577675	2303B520AHBPQQEB	524111	Pengembalian Belanja Barang Perjalanan Dinas Jakarta Maluku dengan Nomor SPM 00844 an Uli Parulian Sihombing dkk 4 orang	63.000
38	Komnas HAM	25/05/2023	700230525558943	0773B395AS71084V	524111	Pengembalian SPD JKT Palu No SPM 00207T an Idin Korino dkk	2.162.067
39	Komnas HAM	26/05/2023	700230523772755	A5A97520AHBO3NQJ	524111	Pengembalian SPM No 00803T an Prabianto Mukti Wibowo dkk 4 orang	3.716.906
40	Komnas HAM	26/05/2023	700230526959026	9944F5UDQBU7HVDI	524111	Pengembalian SPD Palu Morowali No SPM 00975T an Dedi Askary dkk	1.800.000
41	Komnas HAM	26/05/2023	700230525070387	746556QRA6GI5B1J	524111	Pengembalian SPM No 00793T atas nama Pramono Ubaid T dan kawan kawan sebanyak 7 orang	2.894.980
42	Komnas HAM	30/05/2023	700230529038400	47E750JSRCFV3E20	524111	Pengembalian SPD Kalbar JKT No 01050T an m Ariffin	271.815
43	Komnas HAM	30/05/2023	700230530689511	5DB401GAB72D2QF7	524114	Pengembalian belanja barang untuk perjalanan dinas berupa uang harian dan transportasi sesuai SPM No 00903 an Alimatul Qibtiyah dkk	820.000
44	Komnas HAM	30/05/2023	700230530203993	AD3CD395AS75E0AP	524111	Pengembalian SPD JKT Banyuwangi No SPM 0110 an Donalisa dkk 3 orang	172.510
45	Komnas HAM	31/05/2023	700230531362628	374097N8Q134IBQ4	524111	Pengembalian Perjadin ke Bandung an Didi Eko Setiawan dkk tgl 29 sd 30 Mei 2023 dalam rangka menghadiri RAKORNAS BKN	1.573.000
46	Komnas HAM	05/06/2023	700230605244917	573216QRA6IUK2FL	524111	Pengembalian SPD Palu JKT No SPM 01051 an Nuriyanti	342.000
47	Komnas HAM	06/06/2023	700230606845668	3C9077N8Q15CHTN4	524114	Pengembalian belanja barang untuk perjalanan dinas sesuai SPM No 01062 an Nur Imrotus	122.770
48	Komnas HAM	09/06/2023	700230609862377	2AC336QRA6J30VN9	524111	Pengembalian Sisa Belanja Perjalanan Dinas Biasa SPP No 1091 tanggal 16 Mei 2023	1.082.240
49	Komnas HAM	12/06/2023	700230612217444	3ECFE45IQMS01RJ4	524111	Pengembalian SPM No00377 tanggal 06 Maret 2023 atas nama Saurlin P Siagian	521.250
50	Komnas HAM	13/06/2023	700230613746606	07DF5UDQC0QAGTE	524111	Pengembalian uang perjalanan dinas Jakarta Bali tgl 8 sd 11 Juni 2023	80
51	Komnas HAM	13/06/2023	700230613281276	DA3535UDQC0PSAFS	524111	Pengembalian belanja perjalanan dinas sesuai SPM No 01177T	550.000
52	Komnas HAM	14/06/2023	700230614154951	69B4D1GAB74SLVM7	524111	Pengembalian Sisa Belanja Perjalanan Dinas Biasa SPP No 01010	668.601
53	Komnas HAM	15/06/2023	700230615808783	2400F395AS9N2EOF	524111	Pengembalian Perjalanan Dinas Jakarta Kepulauan Riau an Uli Parulian Sihombing dkk 5 orang SPM No 00798T	2.503.698
54	Komnas HAM	16/06/2023	700230615035410	2BC9C0JSRCH3RGI	524111	Pengembalian sisa belanja perjalanan dinas jakarta surabaya tgl 22 sd 25 Mei 2023	731.761
55	Komnas HAM	19/06/2023	700230619973562	8FEF42CNR1NEKHTQ	524111	Pengembalian Sisa Belanja Perjalanan Dinas Biasa SPP No 01053	661.440
56	Komnas HAM	19/06/2023	700230619415631	1558F1GAB751MH2F	524111	Pengembalian sisa belanja perjalanan dinas biasa SPP No 1023	66.228
57	Komnas HAM	20/06/2023	700230620578689	A775A8JM9RO620S1	524111	Pengembalian uang SPPD 01015T	20.000
58	Komnas HAM	26/06/2023	700230626220340	A18040JSRCIRP69K	524111	Pengembalian SPPD ke Sumatera Barat Ketua SPP 01394T	1.294.000
59	Komnas HAM	04/07/2023	700230704307567	0389B6QRA6LT37BF	524111	Pengembalian Sisa Belanja Perjalanan Dinas SPP No 1416	668.920
60	Komnas HAM	05/07/2023	700230705459405	688DC520AHH5CC6D	524111	Pengembalian belanja barang perjalanan dinas Jakarta Purwakarta SPP No 01409T	2.070.500
61	Komnas HAM	05/07/2023	700230705210169	24E458JM9RQMOOPP	524111	Pengembalian belanja barang perjalanan dinas Jakarta Palembang SPM No 01049T	1.501.892
62	Komnas HAM	07/07/2023	700230707565641	33D7B1GAB77LLOL29	524111	Pengembalian SPM No 01437T atas nama Uli Parulian S sebanyak 5 orang	1.336.110
63	Komnas HAM	10/07/2023	700230710899688	D8CB77N8Q18FPCV8	524119	Pengembalian SPP 1114 SPD ke Aceh tgl 28 sd 31 Mei 2023	350.394
64	Komnas HAM	10/07/2023	700230710176959	CEA088JM9RQRGB5V	524111	Pengembalian SPD Karanganyar Tgl 22 sd 24 Juli 2023 an Amanda CM No SPP 01471T tanggal 16 Juni 2023	1.285.790
65	Komnas HAM	10/07/2023	700230710660549	A72188JM9RQRV3E5	524111	Pengembalain Sisa SPD Padang Tgl 15 sd 18 Juni 2023 an Siska Rannyawati Purba No SPP 01365T tanggal 09 Juni 2023	382.580
66	Komnas HAM	12/07/2023	700230712849816	A05835UDQC3OQTCO	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa an Lidiya dan Wildany Fauziyah SPM 01573T	2.742.540
67	Komnas HAM	13/07/2023	700230710835808	8664B7N8Q18FNEJ0	524111	Pengembalian SPP No 1224 SPD ke Singkawang tgl 8 sd 10 Juni 2023	1.383.531
68	Komnas HAM	14/07/2023	700230712125774	CB13B45IQMUVAQAE	524119	NO SP2D No SP2D 231751303014229 an PUTU ELVINA DKK 4 ORANG	5.003.000
69	Komnas HAM	14/07/2023	700230712453976	B568A5UDQC3OEQQO	524119	No SP2D 231751303014230 an iman Supandi	1.061.500
70	Komnas HAM	17/07/2023	700230717064389	D44B28JM9RR22H65	524119	Pengembalian SPD Padang No SPM 01219T an Sultanul Arifin dkk	475.000
71	Komnas HAM	18/07/2023	700230718010732	9B9892CNR1QC4DBC	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa sesuai dengan SPP No 1663	246.000
72	Komnas HAM	20/07/2023	700230720704653	412D5395ASCR3K4D	524111	Pengembalian belanja perjadin Ambon Piru PPSPP nomor 01592T	79.200
73	Komnas HAM	26/07/2023	700230725667071	527621GAB78712TV	524111	Pengembalian Sisa Belanja Perjalanan Dinas Biasa SPP NO 01387	483.869
74	Komnas HAM	26/07/2023	700230726718398	9C8797N8Q18US4TU	524119	Pengembalian Belanja SPP Nomor 01128T tanggal 23 Mei 2023 an Andri Djailani dkk 5 Orang	1.281.980

75	Komnas HAM	28/07/2023	700230728127000	1C2FA0JSRCLSV4GO	524111	Pengembalian SPD No SPP 01722T an Dedi Askary dkk	537.000
76	Komnas HAM	28/07/2023	700230728772358	BF5EB7N8Q190QO06	524111	Pengembalian Belanja Perjadin Sesuai SPM Nomor 01577T	1.501.500
77	Komnas HAM	31/07/2023	700230728839775	8E37E520AHHRLSIV	524111	SPP 01038T PEMANTAUAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI SULAWESI TENGGARA 15 SAMPAI 19 Mei 2023	5.410.643
78	Komnas HAM	31/07/2023	700230731739138	28F627N8Q193LC02	524111	Pengembalian sisa belanja perjalanan dinas sesuai SPM Nomor 01644	1.620.903
79	Komnas HAM	31/07/2023	700230731549116	5BB935UDQC4ALIDS	524111	Pengembalian Sisa Perjalanan Dinas sesuai SPM nomor 01643 T	2.368.937
80	Komnas HAM	01/08/2023	700230801707375	4084D520AHK15KBF	524111	Pengembalian SPD No SPM 01679A an Markos Amra	591.000
81	Komnas HAM	01/08/2023	700230801742356	595A75UDQC6DJMGK	524114	Pengembalian belanja barang untuk perjalanan dinas sesuai SPM No 01270 an Al Hudri dkk	3.366.400
82	Komnas HAM	02/08/2023	700230802833251	237F41GAB7AGJVR3	524111	Pengembalian SPM No 00855 atas nama Prabianto Mukti Wibowo dkk 4 orang	8.237.340
83	Komnas HAM	02/08/2023	700230802236006	6589E5UDQC6E2OJ6	524111	SPP 01454T Pengembalian SPPD Verifikasi Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM Tgl 20 sampai 24 Juni 2023	232.500
84	Komnas HAM	04/08/2023	700230804781424	D998145IQN1NMEBG	524111	Pengembalian Sisa SPD SPP No 01529	666.000
85	Komnas HAM	04/08/2023	700230804195691	B0B5B1GAB7AHTIBB	524111	Pengembalian sisa Belanja perjalanan dinas SPP No 1188	4.903.518
86	Komnas HAM	07/08/2023	700230807051285	98FB8520AHK68N0L	524111	Pengembalian sisa perjalanan dinas biasa SPP 01624	1.460.500
87	Komnas HAM	07/08/2023	700230807851180	DE8780JSR09045C	524111	Pengembalian SPD Serang tgl 22 sd 24 Mei 2023 no spp 01099T tanggal 16 Mei 2023 an Gatot Ristanto dkk 6 orang	731.836
88	Komnas HAM	08/08/2023	700230808033183	EF828395ASFECLSV	524111	Pengembalian Sisa Belanja Perjalanan Dinas sesuai SPM No 01610T	204.375
89	Komnas HAM	09/08/2023	700230809575262	C6AC22CNR1T3ENQU	524119	Pengembalian belanja barang untuk perjalanan dinas sesuai SPM 01533 an Martini Elisabeth dkk	7.905.630
90	Komnas HAM	09/08/2023	700230809827459	D36858JM9RTQHE43	524119	Pengembalian belanja barang untuk perjalanan dinas berupa transport dan penginapan sesuai SPM No 01442 an Isti Fadatul dkk	4.624.980
91	Komnas HAM	11/08/2023	700230811743734	0874A45IQN1UATFM	524111	Perjadin Tgl 17 sd 19 Juli 2023 ke Maluku an Didit Eko Setiawan dan Andrie Wahyu Cahyadi	3.580.916
92	Komnas HAM	11/08/2023	700230811266241	069FE1GAB7AOLB61	524111	Perjadin Tgl 17 sd 19 Juli 2023 ke Maluku an Angga Oktapriano	1.667.458
93	Komnas HAM	14/08/2023	700230814500730	B3E6F0JSR0CFB1RQ	524111	Pengembalian belanja barang perjalanan dinas sesuai SPP No 01632T	1.186.900
94	Komnas HAM	16/08/2023	700230816358853	58041395ASFMAOE5	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan DInas Biasa Sesuai dengan SPM No 01891 T	1.094.570
95	Komnas HAM	18/08/2023	700230818933383	62780395ASFOPAK7	524111	Pengembalian SPD palu No SPP 01936T an Hidar dkk	600.000
96	Komnas HAM	18/08/2023	700230818276903	AD97C395ASFO59H7	524111	Pengembalian Sisa Belanja Perjalanan Dinas SPP No1424	3.464.626
97	Komnas HAM	18/08/2023	700230816672849	EC6528JM9RU12B2H	524119	Pengembalian SPD Padang No SPP 01881T an Sultanul Arifin dkk	250.000
98	Komnas HAM	21/08/2023	700230821873262	0D5C72CNR1TF61JE	524111	Pengembalian SPM No 01517 tanggal 21 Juni 2023 An Atnike Nova Sigiro dkk sebanyak 9 orang	73.542
99	Komnas HAM	21/08/2023	700230821540468	6FE267N8Q1BP9SJK	524111	Pengembalian belanja perjalanan dinas biasa sesuai SPP Nomor 01932T	139.201
100	Komnas HAM	24/08/2023	700230824366305	6B6EF520AHKMP471	524111	Pengembalian belanja barang perjalanan dinas Jakarta Jawa Barat an Uli Parulian dkk SPP 01509T	1.464.000
101	Komnas HAM	25/08/2023	700230824690893	1EF13395ASFU916D	524111	Pengembalian SPM 01208T atas nama Prabianto Mukti Wibowo dan kawan kawan sebanyak 6 Orang	1.954.540
102	Komnas HAM	30/08/2023	700230825261638	B821A7N8Q1BSREI6	524111	Pengembalian SPD Aceh No SPP 02008T an Sepriyadi Utama dkk	1.100.000
103	Komnas HAM	30/08/2023	700230830824471	4FB021GAB7BBA70N	524111	Pengembalian sisa SPD Cirebon Tgl 8 sd 11 Agustus 2023 no SPP 02028T tanggal 2 Agustus 202 an Gatot Ristanto dkk 6 org	692.984
104	Komnas HAM	01/09/2023	700230901620395	A9DD1520AHN0ENLB	524111	Pengembalian belanja perjalanan dinas biasa sesuai SPP Nomor 01662T	1.058.386
105	Komnas HAM	01/09/2023	700230901042168	C5B907N8Q1E542VO	524111	Pengembalian Belanja Barang Perjadin sesuai SPM No 02222A	31.000
106	Komnas HAM	05/09/2023	700230904030152	2FC072CNR1VTH8U8	524111	Pengembalian SPM No 00361T Atas nama Ika Syafitri dkk sebanyak 5 orang	2.116.000
107	Komnas HAM	06/09/2023	700230906906023	EBB8F395ASICM1D7	524111	Pengembalian Sisa Belanja Perjalanan Dinas SPP No 2180	458.895
108	Komnas HAM	06/09/2023	700230904053653	B0D9F395ASIUUVSL	524111	Pengembalian sisa belana perjalanan Dinas SPP No 1704	38.380
109	Komnas HAM	06/09/2023	700230904617640	2EEAE0JSR0R596L8	524111	pengembalian sisa belanja perjalanan dinas SPP no 1703	1.076.587
110	Komnas HAM	07/09/2023	700230907530315	15641520AHN6332B	524111	Pengembalian sisa belanja perjalanan dinas SPP No 1349	1.522.400
111	Komnas HAM	07/09/2023	700230907216995	39163520AHN5PH33	524111	SPM LS Bendahara nomor 01576T tgl 7 juli 2023 an Putu Elvina dkk 5 orang Pontianak Kalimantan Barat	4.512.494
112	Komnas HAM	07/09/2023	700230904309877	17CDA6QRA6RRQQ3L	524111	Pengembalian Sisa Belanja Perjalana Dinas SPP No 1522	1.570.140
113	Komnas HAM	11/09/2023	700230911711854	55C8645IQN4TLMJE	524119	Pengembalian belanja barang berupa perjalanan dinas sesuai SPM No 01443 an Triana Komala R dkk	4.774.560
114	Komnas HAM	12/09/2023	700230911403771	26AC51GAB7DO59NR	524119	Pengembalian belanja SPM 01431	1.078.500
115	Komnas HAM	12/09/2023	700230912417616	1210D5UDQC9N57QG	524111	Pengembalian belanja barang perjalanan dinas SPP No 01888T	569.122
116	Komnas HAM	12/09/2023	700230912954549	71E7E8JM9S0SSK5L	524111	Pengembalian Sisa belanja perjalanan dinas SPP No 2184	1.053.200
117	Komnas HAM	14/09/2023	700230913648888	EE0EE7N8Q1EH4Q7O	524119	Pengembalian belanja barang berupa perjalanan dinas sesuai SPM 01720 an Triana Komalasari dkk	7.123.696
118	Komnas HAM	15/09/2023	700230915523087	0F15C6QRA6S6H0GF	524111	Perjadin Tgl 17 sd 19 Juli 2023 ke Maluku an Didit Eko Setiawan dan Andrie Wahyu Cahyadi	64.000
119	Komnas HAM	15/09/2023	700230915601885	4A997520AHNDPDET	524111	Pengembalian sisa belanja perjalanan dinas SPP 2145	1.665
120	Komnas HAM	15/09/2023	700230915086254	15FBA45IQN50SLTE	524111	Pengembalian sisa belanja perjalanan dinas SPP No 2144	1.318.833
121	Komnas HAM	15/09/2023	700230911108967	351076QRA6S2A9R7	524111	SPM 01914T PENGEMBALIAN AN ONO HARYONO	900.000

122	Komnas HAM	18/09/2023	700230918901341	F95371GAB7DVA3IT	524111	Pengembalian Sisa Belanja Perjalanan Dinas SPP No 0957	77.820
123	Komnas HAM	18/09/2023	700230918307956	3FD725UDQC9SP03K	524111	Pengembalian Belanja SPM 02004T	38.141
124	Komnas HAM	19/09/2023	700230919051732	6B9632CNR20BRMEK	524111	Pengembalian SPDD JKT No SPM 02335T Kalbar an Henry Silka Innah dkk	517.860
125	Komnas HAM	20/09/2023	700230920962836	7C1415UDQC9VA0OK	524111	Pengembalian SPM No 01878T atas nama Prabianto Mukti Wibowo dan kawan kawan sebanyak 4 orang	2.020.424
126	Komnas HAM	22/09/2023	700230922610079	D99F48JM9S1639CV	524111	No SPP 02249T tgl 29 agustus 2023 an Putu Elvina dkk 4org	1.853.500
127	Komnas HAM	22/09/2023	700230922464467	32B4E6QRA6SD4R6J	524111	Pengembalian Sisa Belanja Perjalanan Dinas SPP No 1618	315.000
128	Komnas HAM	29/09/2023	700230929122125	62CF7520AHNMQ0QD	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas SPP No 02503T	1.299.500
129	Komnas HAM	02/10/2023	700231002941298	1451F7N8Q1H69PRI	524111	Pengembalian belanja perjalanan dinas an Pramono Ubaid dan Henry Silka Nomor LS 01883T	652.484
130	Komnas HAM	02/10/2023	700231002066651	17E6D1GAB7GEK3MR	524119	Pengembalian belanja perjalanan dinas an didit eko setiawan dkk 15 org	571.118
132	Komnas HAM	05/10/2023	700231003150299	D77528JM9S3IT5UR	524111	Pengembalian SPD PALU Morowali No SPM 2468T an Indra F dkk	40.000
133	Komnas HAM	06/10/2023	700231005185566	D75C22CNR22U09GU	524111	Pengembalian belanja SPM 01081T	6.250.644
138	Komnas HAM	09/10/2023	700231006316365	87F56520AHQ49PQD	524111	Pengembalian SPM 01085T	5.379.497
139	Komnas HAM	10/10/2023	700231010613845	946B9520AHQ8CUIL	524119	Pengembalian uang uang harian fullboard an Luluk Andriyani	450.000
140	Komnas HAM	19/10/2023	700231018081187	883AB6QRA6V8AQT3	524111	Pengembalian SPM No 02491T atas nama Prabianto Mukti Wibowo dan kawan kawan sebanyak 6 orang	3.587.600
141	Komnas HAM	20/10/2023	700231013907554	674EE45IQN7V4F32	524111	Pengembalian belanja barang perjalanan dinas sesuai SPP No 02488T	5.372.260
142	Komnas HAM	20/10/2023	700231019694091	98AAA1GAB7GVE20B	524111	Pengembalian SPDD Aceh tgl 5 sampai 7 september 2023	1.455.750
143	Komnas HAM	24/10/2023	700231024244181	8D2561GAB7H3OTEL	524111	Pengembalian SPD No SPP 02079 an Melchior S dkk 3 orang	6.220.000
144	Komnas HAM	25/10/2023	700231025212988	02C4B7N8Q1HRHFHS	524111	Pengembalian belanja perjalanan dinas SPP No 02687T	1.577.800
145	Komnas HAM	30/10/2023	700231030209083	8C1DF395ASM28UHR	524111	Setoran pengembalian belanja perjalanan dinas biasa nomor SPP 01795 T	4.215.500
146	Komnas HAM	01/11/2023	700231030112536	A76055UDQCD7D08O	524111	no SPM 02486T Tgl 22 September 2023 an Hari Reswanto dkk 3 orang	28.150
147	Komnas HAM	01/11/2023	700231101394107	D6BBB520AHSUVB5R	524111	Pengembalian Belanja SPDD	418.900
148	Komnas HAM	01/11/2023	700231101127640	BD0B00JSRD10M6UO	524111	Pengembalian belanja barang perjalanan dinas SPP No 2212T	620.500
149	Komnas HAM	01/11/2023	700231101647583	B17BA395ASO6D2MV	524111	Pengembalian Sisa Belanja Perjalanan Dinas Biasa SPP No 2177	2.805.066
150	Komnas HAM	01/11/2023	700231101278404	D170845IQNAIEQ64	524111	Pengembalian sisa belanja perjalanan dinas biasa SPP no 2226	20.803.520
151	Komnas HAM	03/11/2023	700231103223880	C42070JSRD12M628	524111	Pengembalian sisa perjadiin biasa an Kurniasari Novita Dewi dkk no spm 02630T	2.101.500
152	Komnas HAM	03/11/2023	700231103151797	2E6E86QRA71PEVLL	524114	Pengembalian belanja barang untuk perjalanan dinas berupa uang harian sesuai SPM No 02553 an Olivia Chadidjah	180.000
153	Komnas HAM	03/11/2023	700231103305207	14A3B6QRA71PJLFN	524114	Pengembalian belanja barang untuk perjalanan dinas berupa tiket dan transportasi sesuai SPM No 02624 an Nur Imrotus	920.220
154	Komnas HAM	03/11/2023	700231103834079	CA5668JM9S6ITPUV	524119	Pengembalian belanja barang berupa perjalanan dinas sesuai SPM 02453 an Siti Handayani	150.000
156	Komnas HAM	10/11/2023	702311070044927	F7BD66QT6O5KF4NV	524111		14.680.155
157	Komnas HAM	10/11/2023	702311100055687	4041B6QT6O6H3047	524111		486.600
158	Komnas HAM	13/11/2023	702311100058601	BF77D1GC7OO6L2V9	524111		1.181.683
159	Komnas HAM	13/11/2023	702311130061295	98C0B522732KSMFF	524111		17.200
160	Komnas HAM	13/11/2023	702311100056966	6287F5UFMTK4M1C6	524111		550.000
161	Komnas HAM	14/11/2023	702311140070875	F0D5A522732UE5ER	524111	Pengembalian Belanja Barang SPD NO,SPP.2943	1.395.300
162	Komnas HAM	14/11/2023	702311140069690	C5A5D0JUNU70D49Q	524114		9.450.761
163	Komnas HAM	15/11/2023	702311150075387	80AAA6QT6O80PFFR	524114	Pengembalian Uang Harian, Transport SPM No.02497T	20.000
164	Komnas HAM	16/11/2023	702311160077968	D82BA7NAMIQMNNKG	524111	Pengembalian sisa belanja perjalanan dinas biasa SPP No. 2810	260.000
165	Komnas HAM	20/11/2023	702311200086553	DB5DF3977DVURMGP	524111	Pengembalian Perjadiin Nomor SPP 02753Ttanggal 6 Oktober 2023 atas nama Gatot Ristanto Dkk	950.279
166	Komnas HAM	23/11/2023	702311230100847	966586QT6OAD3LBF	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan dinas Sesuai dengan SPM 2762	1.301.500
167	Komnas HAM	24/11/2023	702311230100592	49A5D2CPNJEF2L3G	524111	SPM : 03058 Tanggal 6 November 2023 Nomer SP2D :231751303033485	35.400
168	Komnas HAM	24/11/2023	702311240102143	3B91E3977E150S7V	524111	Pengembalian SPD JKT - JOGJA No SPP 02907 an Anis Hidayah, dkk	148.000
169	Komnas HAM	24/11/2023	702311240101069	6BD958JO6DFFER6D	524111	PEngembalian SPD Palu Morowali an. Dedi Askary dkk	180.000
170	Komnas HAM	24/11/2023	702311230100603	C18AE3977E0RFL3R	524111	Pengembalian SPM No, 3059 6 November 2023	197.600
171	Komnas HAM	27/11/2023	702311220096196	A0A3C5UFMTNNS5B64	524111		497.500
172	Komnas HAM	27/11/2023	702311270106287	F41616QT6OBJ8H5F	524111	Pengembalian Belanja Barang SPP No 2649	1.416.363
173	Komnas HAM	28/11/2023	702311280120545	6C651522737404N1	524111	Pengembalian Perjadiin Nomor SPP 01659Ttanggal 6 Juli 2023 atas nama Gatot Ristanto	608.000
174	Komnas HAM	30/11/2023	702311300143655	A7056522737N36H7	524111	Pengembalian Belanja Barang Berupa Perjalanan dinas ke singkawang sesuai dengan SPM No. 03015T	191.000
175	Komnas HAM	30/11/2023	702311300142304	E159645KN8LAM570	524111	Pengembalian Belanja Barang Berupa Perjalanan Dinas Singkawang sesuai SPM No. 2761	3.915.500
176	Komnas HAM	01/12/2023	702312010147527	6B1146QT6P1L0PM7	524111	Pengembalian SPD No SPP 03075T/650236/2023 an. Dedi Askary, dkk	192.000
177	Komnas HAM	01/12/2023	702311300136761	FCA501GC7OU5EVPP	524111	Pengambilan sisa perjadiin dengan no SPP 03076T	620.000
178	Komnas HAM	01/12/2023	702312010154873	A718C3977EO3D0RP	524111	Pengembalian Sisa Belanja Perjalanan Dinas Biasa SPP No. 2840	1.399.440

179	Komnas HAM	01/12/2023	702312010154720	6AF7E0JUNV0U60N0	524111	Pengembalian Sisa Belanja Perjalanan Dinas Biasa SPP No.2811	1.601.380
180	Komnas HAM	01/12/2023	702312010155057	C2B086QT6P1L111H	524111	Pengembalian SPM No. 01622	2.172.400
181	Komnas HAM	01/12/2023	702312010147478	C59C27NAMJK1DPKM	524111	Pengembalian SPD No SPP 03160T/650236/2023 an Dedi Askary	19.402
182	Komnas HAM	04/12/2023	702312040166083	383BA3977EP00SM3	524111	Pengembalian SPPD Kegiatan Koordinasi/Diskusi dengan Stake Holder terkait Penangan TPPO dan Pelanggaran HAM Tgl 6 - 9 November	28.003
184	Komnas HAM	05/12/2023	702312050177659	2DC748JO6E7K0DJR	524111	Pengembalian SPD SPP NO : 02635/650236/2023 TGL. 27-09-2023 Keg. TUAP tanggal 21-23 September 2023 di KLHK Bogor, Jawa Barat	100.000
185	Komnas HAM	05/12/2023	702312050173455	CA46B52273U2C9GF	524119		612.538
186	Komnas HAM	05/12/2023	702312050175818	637247NAMJL7JBQA	524111	Pengambalian Sisa SPD SPP No. 1959	227.380
187	Komnas HAM	05/12/2023	702312050172522	C4CCB2CPNK6T58JA	524111	Pengembalian sisa SPD SPP No. 2442	1.151.000
188	Komnas HAM	06/12/2023	702312060183204	BA3E345KN9BVGOL4	524111	Pengembalian Belanja Barang Berupa Perjalanan dinas sesuai dengan SPM No. 03195T	25.620
189	Komnas HAM	06/12/2023	702312050172932	631D72CPNK6T5904	524111	Pengembalian Sisa SPD SPP No. 2083	8.963.265
190	Komnas HAM	06/12/2023	702312010147432	8CA212CPNK5MVPJ8	524111	Pengembalian SPD No SPP 02946T/650236/2023 an Sultanul Arifin, dkk	25.000
191	Komnas HAM	07/12/2023	702312070194729	47D7C8JO6E8739H9	524111	Pengembalian sisa belanja perjalanan dinas biasa No SPP 02950T	409.550
192	Komnas HAM	08/12/2023	702312060182730	8A96B0JUNV2DSO6A	524111	Pengembalian Belanja Barang Berupa Biaya Perjalanan dinas sesuai SPM No. 03263T	988.400
193	Komnas HAM	09/12/2023	702312090202930	738720JUNV3AGSPI	524111	SPP NO : 02634T, TGL. 26 SEPTEMBER 2023 keg. rakor dan festival ham di singkawang an. atnike dkk (12 org)	2.314.500
194	Komnas HAM	09/12/2023	702312090202920	7CF8B0JUNV3AGSP8	524111	SPP NO : 01566T Tanggal 27 Juni 2023, keg. SP tgl. 6-8 juli 2023 di Bandung an. Atnike, dkk (29 org)	4.446.288
195	Komnas HAM	09/12/2023	702312090202924	63FAF45KN9CS4SPC	524119	SPP NO : 01564T, TGL. 27 JUNI 2023 keg. SP tgl. 3-6 juli 2023 di Bandung an. Atnike dkk (29 org)	568.860
196	Komnas HAM	12/12/2023	702312110207967	513BF6QT6P4KECUV	524111	Pengembalian SPPD Pemantauan Kalimantan Tengah-1 tgl 3-6 Okt 2023 SPP no.02680T	2.349.140
199	Komnas HAM	14/12/2023	702312130225223	0EC2A3977ERLT927	524111	Pengembalian belanja barang perjalanan dinas Jakarta-Bali sesuai SPP No.03215T	3.180
200	Komnas HAM	14/12/2023	702312140231698	6B0EC7NAMJNTFL0I	524111	Pengembalian belanja perjalanan dinas biasa No. SPP 03371T tgl. 01/12/2023 an Nelly Yusnita	338.913
201	Komnas HAM	18/12/2023	702312180250204	27AF545KN9FI0TIS	524111	Pengembalian SPPD Insiden Pecahnya Jembatan Kaca Prov. Jawa Tengah Tgl 26-27 Des 2023 sesuai SPP nomor 03239T	352.000
202	Komnas HAM	18/12/2023	702312180248440	5528D0JUNV60CRRO	524111	Guna Pengembalian Perjalanan Dinas kegiatan Koordinasi Kesekretariatan Jenderal dalam rangka pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin Pegawai 25 Oktober s.d 28 Oktober 2023	256.990
203	Komnas HAM	20/12/2023	702312150238731	A750A1GC7PNG61GB	524111	Pengembalian SPPD Yogyakarta no SPP 03554T tanggal 11 Desember 2023 a.n Hidayatul Rohmi dkk (2 orang)	188.000
205	Komnas HAM	21/12/2023	702312180250288	E227D7NAMJP3KTLG	524111	Pengembalian SPPD Penanganan Pengungsi Rohingya Tgl 29 Nop - 2 Des 2023 Sesuai SPP nomor 03298T	839.100
206	Komnas HAM	21/12/2023	702312210280376	FA07B5UFMUL7FBTO	524111	Pengembalian SPPD Kab. Donggala dan Kab. Sigi - Sulteng Tgl 7-9 Des 2023 sesuai SPP nomor 03421 T	1.833.435
207	Komnas HAM	22/12/2023	702312210280541	323611GC7PP9EC2T	524111	Pengembalian SPPD Dogiyai Papua Tgl 8 - 13 Oktober 2023 sesuai SPP nomor 02639	1.009.894
208	Komnas HAM	22/12/2023	702312220291096	EB13A5UFMULH0S00	524111	Pengembalian SPPD Perjalanan Dinas Jakarta-Singkawang nomor SPP 02754T	3.736.300
209	Komnas HAM	22/12/2023	702312210280218	FEE5B7NAMJQ09BOQ	524119	Pengembalian belanja barang sesuai SPP No.03224T	385.000
210	Komnas HAM	25/12/2023	702312250295123	0DE003977EV8DGQJ	524111	Pengembalian perdin Jakarta-Padang sesuai SPP No. 00165T an. Aris Wahyudi	610.014
211	Komnas HAM	25/12/2023	702312250295120	D94330JUNV836GQG	524111	Pengembalian Perjadin Jakarta-Papua 25-28 Oktober 2023 SPP No. 02901T	2.451.500
212	Komnas HAM	27/12/2023	702312270311731	CD9F71GC7PR2MC9J	524111	Pengembalian belanja barang berupa perjalanan dinas sesuai SPM No. 3016T	433.360
213	Komnas HAM	27/12/2023	702312270314731	5BA231GC7PR2MF7B	524111	Pengembalian belanja barang berupa perjalanan dinas sesuai SPM No. 03450 an Andy Yentriyani dkk	854.400
214	Komnas HAM	27/12/2023	702312270314855	CBED3522744KAFB7	524114	Pengembalian belanja barang berupa perjalanan dinas sesuai SPM No 03152 an Tiasri Wiandani	330.000
215	Komnas HAM	28/12/2023	702312280337713	A8CC53977F052B9H	524111	Pengembalian perdin sesuai SPP No. 01582T	4.784
216	Komnas HAM	28/12/2023	702312280337752	897C22CPNKDOLBAO	524111	Pengembalian perdin sesuai SPP No. 03276T	170.000
217	Komnas HAM	28/12/2023	702312280337546	945405UFMUNA9B4A	524111	Pengembalian perdin Jakarta-Singkawang sesuai SPP No.02766T	584.192
218	Komnas HAM	28/12/2023	702312280337854	8645A45KN9IHFBDU	524111	Pengembalian perdin sesuai SPP No. 02898T	2.567.660
219	Komnas HAM	28/12/2023	702312280337090	4B9820JUNV8VRAM2	524111	Pengembalian perdin Jakarta-Papua Sesuai SPP No. 00434T	3.238.220
220	Komnas HAM	28/12/2023	702312280338392	C7ACF2CPNKDOLBUO	524111	Pengembalian belanja barang sesuai SPM No.02997T	225.840
221	Komnas HAM	28/12/2023	702312280337745	B5FF7522744TSAHA	524111	pengambalian sisa SPD SPP No. 3182	498.807
222	Komnas HAM	28/12/2023	702312280336416	29DDB5UFMUNA9A10	524111	Pengembalian belanja biaya perjalanan dinas sesuai SPM No.02842T	819.548
223	Komnas HAM	28/12/2023	702312280337710	B80520JUNV8VRB9E	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan dinas Sesuai dengan SPM 02896T	1.030.580
224	Komnas HAM	28/12/2023	702312280337663	CF7D63977F052B7V	524111	pengembalian sisa SPD SPP No.2724	2.337.640
225	Komnas HAM	28/12/2023	702312280338550	F61A50JUNV8VRC3M	524111	Pengembalian belanja barang sesuai SPP No.02211T	2.627.265
226	Komnas HAM	28/12/2023	702312280338347	50E766QT6P9MMBTB	524111	Pengembalian belanja barang sesuai SPM No.02996T	2.971.020
227	Komnas HAM	28/12/2023	702312280329325	B7CFB522744T533D	524114	Pengembalian Belanja Biaya Perjalanan dinas Sesuai SPM No 03559T	540.000
228	Komnas HAM	28/12/2023	702312280337082	C856D2CPNKDOLALQ	524114	Pengembalian belanja barang berupa perjalanan dinas sesuai SPM No. 03483 an Dian	150.000
229	Komnas HAM	28/12/2023	702312280333978	C5F5E7NAMJS337KQ	524114	Pengembalian belanja barang berupa perjalanan dinas sesuai SPM No. 03483 an Dian	94.000
230	Komnas HAM	28/12/2023	702312280333391	3AC011GC7PRC872F	524119	Pengembalian Belanja Barang Sesuai SPP No. 3216	45.900

231	Komnas HAM	28/12/2023	702312280337884	4757745KN9IHFBE5	524119	Pengembalian Sisa SPD SPP No. 3180	636.000
232	Komnas HAM	28/12/2023	702312280333740	CB1760JUNV8VR7DC	524119	Pengembalian belanja barang berupa perjalanan dinas sesuai SPM No. 03452 an Markos Amra	600.000
233	Komnas HAM	28/12/2023	702312280334953	8B1473977F0528J9	524119	Pengembalian belanja barang berupa perjalanan dinas sesuai SPM No. 03452 an Andrie Wahyu Cahyadi	600.000
234	Komnas HAM	28/12/2023	702312270314604	8055F45KN9I7TF3C	524119	Pengembalian SPD No.03582T an Atnike Nova Sigiro dkk (12 orang) tanggal 13 Desember 2023	3.200.000
235	Komnas HAM	28/12/2023	702312280337583	FAD173977F052B5F	524119	Pengembalian sisa SPD SPP No.3155	9.737.287
236	Komnas HAM	29/12/2023	702312290356999	82B478JO6EEP23O7	524111	Pengembalian perdin sesuai SPP No.00166T	234.574
237	Komnas HAM	29/12/2023	702312290359424	FA63045KN9IR1640	524111	Pengembalian SPM No 01854A tgl 21-7-2023 a.n Putu Elvina dkk	562.370
238	Komnas HAM	29/12/2023	702312290354897	CAEA66QT6PA081MH	524111	Pengembalian SPD di kab Jayapura an Frits B Ramandey, dkk No SPP 2968T	592.224
239	Komnas HAM	29/12/2023	702312290357715	F36CE5227457E4EJ	524111	Pengembalian SPM No.02737A TGL 9-10-2023 SPPD A.N PUTU ELVINA DKK	18.403.175
243	Komnas HAM	30/12/2023	702312290361494	8C99345KN9IR184M	524111	Pengembalian SPPD Pramediasi sengketa lahan Sdr. Johannes dan TNI AL di Kota Surabaya Jawa Timur Tgl 15 - 17 Mei 2023	3.066.060
Jumlah							398.749.945

Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

No.	NAMA WAJIB BAYAR / SETOR	TANGGAL BAYAR	KODE BILLING	NTPN	KODE AKUN	KETERANGAN	SETORAN PER AKUN
1	KOMNASHAM	12/06/2023	700230612161993	C0438395AS9JJ5E9	524211	Pengembalian SPM No 00464 tanggal 15 Maret 2023 atas nama Imelda Saragih	6.053.100
2	KOMNASHAM	20/12/2023	702312150238680	53F840JUNV53P1EO	524211	Pengembalian SPPD PDLN Thailand no SPP 03175T tanggal 15 November 2023 a.n Abdul Haris Semendawai dkk (6 orang)	7.725.012
Jumlah							13.778.112



**LAMPIRAN BELANJA PENANGANAN COVID KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PENGUNGKAPAN YANG MEMADAI PADA LKKL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
BAGIAN ANGGARAN 074 / Kode Satker 650236**

PAGU KEMENTERIAN / LEMBAGA	BELANJA BARANG				BELANJA MODAL				BELANJA BANTUAN SOSIAL				KETERANGAN
	AKUN KHUSUS		AKUN REGULER		AKUN KHUSUS		AKUN REGULER		AKUN KHUSUS		AKUN REGULER		
	AKUN	RUPIAH	AKUN	RUPIAH	AKUN	RUPIAH	AKUN	RUPIAH	AKUN	RUPIAH	AKUN	RUPIAH	
238.541.000	521131	63.574.170			532119				571114	-			Belanja untuk penanganan covid terdiri dari pembelian hand sanitizer, vitamin, alat perlengkapan diri, perlengkapan yang dibutuhkan untuk pencegahan covid-19, alkohol dan perlengkapan rapid test.
	521241	14.700.000			533119				571115				
	521731				536118				572114				
	521841	104.471.000			537122				572115				
	522192	54.892.101			537123				573114				
	523114				537125				573115				
	524115								574114				
	525152								574115				
	525153								575114				
	525154								575115				
	525155								576114				
	525156								576115				
	526131								576116				
	526132												
	526321												
526322													
526323													
SUB TOTAL		237.637.271		-		-		-		-		-	
TOTAL PER JENIS BELANJA					237.637.271								
TOTAL BELANJA													237.637.271



RINCIAN SALDO KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN 111821

BA : 074

Eselon I : KOMNAS HAM

No	Kode Satker	Nama Satker	Tunai	Saldo Per 31 Desember 2023				Total	Keterangan
				Saldo Bank					
				Saldo	Rek Atas Nama	Bank	No Rekening		
1	650236	KOMNAS HAM	-	-	BPg175.KOMNASHAM	BNI Cabang Kramat	9891836502361000	-	S-1362/WPB.12/KP.06/2020
2	650236	KOMNAS HAM	-	-	BPP175.KOMNASHAM PERWAKILAN ACEH	BNI Cab. Banda Aceh	9891836502361001	-	S-1362/WPB.12/KP.06/2020
3	650236	KOMNAS HAM	-	-	BPP175.KOMNASHAM PERWAKILAN KALBAR	BNI Cab. Pontianak	9891836502361003	-	S-1362/WPB.12/KP.06/2020
4	650236	KOMNAS HAM	-	-	BPP175.KOMNASHAM PERWAKILAN AMBON	BNI Cab. Ambon	9891836502361004	-	S-1362/WPB.12/KP.06/2020
5	650236	KOMNAS HAM	-	-	BPP175.KOMNASHAM PERWAKILAN SUMBAR	BNI Cab. Padang	9891836502361002	-	S-1362/WPB.12/KP.06/2020
6	650236	KOMNAS HAM	-	-	BPP175.KOMNASHAM PERWAKILAN SULTENG	BNI Cab. Palu	9891836502361005	-	S-1362/WPB.12/KP.06/2020
7	650236	KOMNAS HAM	-	-	BPP175.KOMNASHAM PERWAKILAN PAPUA	BNI Cab. Jayapura	9891836502361006	-	S-1362/WPB.12/KP.06/2020
8	650236	KOMNAS HAM	-	-	BPg175.KOMNASHAM1	BNI Cabang Kramat	9891836502361007	-	S-1481/KPN.1206/2022
9	650236	KOMNAS HAM	-	-	BPg175.KOMNASHAM2	BNI Cabang Kramat	9891836502361008	-	S-1481/KPN.1206/2022
10	650236	KOMNAS HAM	-	-	RPL 140 KOMNAS HAM 2VEB1RVA (UNFPA)	BNI Cabang Menteng	0446555581	-	S-264/PR.8/2021
11	650236	KOMNAS HAM	-	-	RPL 140 KOMNAS HAM PDHL KOMNAS HAM - 2C3SQYHA (UN-WOMEN)	BNI Cabang Menteng	1296987352	-	S-668/WPB.12/KP.08/2021
12	650236	KOMNAS HAM	-	-	RPL 140 KOMNAS HAM 2GM6ZCLA (EU Komnas Perempuan)	BNI Cabang Menteng	1633602352	-	000335/140
13	650236	KOMNAS HAM	-	-	RPL 140 KOMNAS HAM PDHL KOMNAS HAM - 266FLDEA (EU Komnas HAM)	BNI Cabang Kramat	0716100718	424.792	S-735/WPB.12/KP.08/2018
Jumlah			-	-				424.792	

KAS LAINNYA DI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DARI HIBAH 111822

BA : 074

Eselon I : KOMNAS HAM

No	Kode Satker	Nama Satker	Tunai/UM/Belanja	Saldo Per 31 Desember 2023				Total	Keterangan
				Saldo Bank					
				Saldo	Rek Atas Nama	Bank	No Rekening		
1	650236	KOMNAS HAM	-	-	RPL 140 KOMNAS HAM 2VEB1RVA (UNFPA)	BNI Cabang Menteng	0446555581	-	S-264/PR.8/2021
2	650236	KOMNAS HAM	-	-	RPL 140 KOMNAS HAM PDHL KOMNAS HAM - 2C3SQYHA (UN-WOMEN)	BNI Cabang Menteng	1296987352	-	S-668/WPB.12/KP.08/2021
3	650236	KOMNAS HAM	-	1.652.854.177	RPL 140 KOMNAS HAM 2GM6ZCLA (EU Komnas Perempuan)	BNI Cabang Menteng	1633602352	1.652.854.177	000335/140
4	650236	KOMNAS HAM	-	521.940.888	RPL 140 KOMNAS HAM PDHL KOMNAS HAM - 266FLDEA (EU Komnas HAM)	BNI Cabang Kramat	0716100718	521.940.888	S-735/WPB.12/KP.08/2018
Jumlah			-	2.174.795.065				2.174.795.065	

KAS LAINNYA DI K/L DARI HIBAH YANG BELUM DISAHKAN 111827

BA : 074

Eselon I : KOMNAS HAM

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2023						Keterangan
			Tunai/UM/Belanja	Saldo Bank				Total	
				Saldo	Rek Atas Nama	Bank	No Rekening		
1	650236	KOMNAS HAM	-	-	RPL 140 KOMNAS HAM 2VEB1RVA (UNFPA)	BNI Cabang Menteng	0446555581	-	S-264/PR.8/2021
2	650236	KOMNAS HAM	-	-	RPL 140 KOMNAS HAM PDHL KOMNAS HAM - 2C3SQYHA (UN-WOMEN)	BNI Cabang Menteng	1296987352	-	S-668/WPB.12/KP.08/2021
3	650236	KOMNAS HAM	-	-	RPL 140 KOMNAS HAM 2GM6ZCLA (EU Komnas Perempuan)	BNI Cabang Menteng	1633602352	-	000335/140
4	650236	KOMNAS HAM	-	-	RPL 140 KOMNAS HAM PDHL KOMNAS HAM - 266FLDEA (EU Komnas HAM)	BNI Cabang Kramat	0716100718	-	S-735/WPB.12/KP.08/2018
Jumlah			-	-				-	

TOTAL SALDO KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

2.175.219.857



REKAPITULASI HIBAH KOMNAS HAM
PER 31 DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	DONOR	SALDO AWAL 2023	PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG TA 2022 (391132)	PENDAPATAN 2023	JUMLAH	DIPA	PENGESAHAN SPHL	PENGESAHAN MPH-L-BJS	PENGESAHAN SP3HL	DIKEMBALIKAN KE KAS NEGARA	TOTAL KAS LAINNYA DI K/L DARI HIBAH (111827)	TOTAL KAS LAINNYA DI K/L DARI HIBAH (111822)	RINCIAN TOTAL 111822			KET							
													TUNAI/UMBELANJA	RK KORAN PER 31 DESEMBER 2023									
														Kas Hibah di Bank	Jasa Giro		Total RK Koran Per 31 Desember 2023						
KOMNAS PEREMPUAN																							
1	UNFPA (2VEB1RVA)	-	-	2.772.352.180	2.772.352.180	2.772.360.000	2.749.578.348	-	22.773.832	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengembalian sisa dana hibah UNFPA kepada donor sesuai SPHL Nomor 231400601240002; 231400601240001; 231400000000056.					
2	UNWOMEN (2C3SQYHA)	4.087.518	-	1.722.172.650	1.726.260.168	1.726.260.000	1.726.151.369	-	-	108.799	-	-	-	-	-	-	-	Pengembalian ke kas negara sesuai NTPN No. 918D11GC7PRLPQ79; 231400000000057; 231400601230001.					
1	The Europan Union - Komnas Perempuan (2GM6ZCLA)	-	-	7.835.880.780	7.835.880.780	6.259.895.000	6.183.026.603	-	-	-	-	1.652.854.177	-	1.652.854.177	-	1.652.854.177	1.652.854.177	231400000000055; 231400602480004; 231400602480003; 231400602480002; 231400602480001.					
		4.087.518	-	12.330.405.610	12.334.493.128	10.758.515.000	10.658.756.320	-	22.773.832	108.799	-	1.652.854.177	-	1.652.854.177	-	1.652.854.177							
KOMNAS HAM																							
1	The Europan Union - Komnas HAM (266FLDEA)	49.235	-	521.891.653	521.940.888	-	-	-	-	-	-	521.940.888	-	521.940.888	424.792	522.365.680	522.365.680	Hibah EU Komnas HAM tidak termasuk ke dalam revisi DIPA TA 2023 dan tidak dilakukan belanjanya, kemudian dilakukan pengembalian ke kas negara sesuai NTPN No. 82EA81GCACKPUVFN dan 1F2410JUQI2DHHV8 tanggal 18 Januari 2024					
		49.235	-	521.891.653	521.940.888	-	-	-	-	-	-	521.940.888	-	521.940.888	424.792	522.365.680	522.365.680						
TOTAL		4.136.753	-	12.852.297.263	12.856.434.016	10.758.515.000	10.658.756.320	-	22.773.832	108.799	-	2.174.795.065	-	2.174.795.065	424.792	2.175.219.857	2.175.219.857						



**Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2023**

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		
No	Uraian	Jumlah
1	Uang Makan PNS	18.314.000
2	Uang Makan PPPK	1.464.000
3	Uang Lembur PNS	17.977.000
4	Uang Lembur PPPK	1.325.000
5	Kekurangan Gaji Karena Kenaikan Pangkat	1.378.075
6	Kenaikan Gaji Berkala	428.427
Jumlah		40.886.502
Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		
No	Uraian	Jumlah
1	Uang Lembur PPNPN	12.924.000
2	Listrik	100.316.506
3	Telepon	8.946.969
4	Internet	7.157.250
5	Pos	1.719.531
6	Air	272.562
Jumlah		131.336.818
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya		
No	Uraian	Jumlah
1	RPATA yang belum dibayarkan	254.452.000
Jumlah		254.452.000
Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga		426.675.320

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (UAPA)
AUDITED TA 2023**

Kode dan Nama K/L : (074) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	v		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	v		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	v		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	v		Ada
2	Neraca Percobaan AkruaI	v		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	v		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	v		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	v		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	v		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	v		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	v		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		v	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	v		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		v	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		v	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		v	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		v	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		v	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		v	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		v	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		v	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		v	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		v	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		v	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		v	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		v	Tidak
	a. Pagu/DIPA		v	Tidak
	b. Estimasi PNB		v	Tidak
	c. Belanja		v	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		v	Tidak

	e. Pendapatan		v	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		v	Tidak
	g. Kas BLU		v	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		v	Tidak
	i. Kas Hibah		v	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		v	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		v	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		v	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		v	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		v	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		v	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		v	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		v	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akruar		v	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		v	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		v	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)		v	Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)		v	Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxx) bersaldo (K)		v	Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxx) bersaldo (K)		v	Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxx) bersaldo (D)		v	Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)		v	Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxx) bersaldo (K)		v	Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		v	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		v	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		v	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		v	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		v	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		v	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		v	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		v	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		v	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		v	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		v	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		v	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		v	Tidak

		Ada	Tidak	Seharusnya
	Jika Bukan Satker BLU			
1	Terdapat akun Neraca (1xxxx dan 2xxxx) dengan uraian frasa "BLU"		v	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		v	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		v	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		v	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada) Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah		N/A	Ada/Tidak
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		N/A	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		v	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		v	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	v		Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		v	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		v	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	N/A		Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	N/A		Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	N/A		Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	N/A		Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI		0	
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)		0	
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		v	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?	v		Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		v	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?		v	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	v		Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)	v		Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			

	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		v	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	v		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	v		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	v		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	v		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	N/A		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		v	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	v		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		v	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		v	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		v	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		v	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	v		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		v	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	v		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	v		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	v		Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		v	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	v		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	v		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		v	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		v	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		v	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		v	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak

6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	v		Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	v		Ya

TELAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)	v		Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	v		Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	v		Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	v		Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	v		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	v		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	v		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	v		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	v		Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		v	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		v	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		v	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		v	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		v	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua	v		Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	v		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	v		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	v		Ya/Tidak

TELAH LK BLU

	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	N/A		Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		N/A	Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?	N/A		Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?	N/A		Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	N/A		Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?	N/A		Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?	N/A		Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	N/A		Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	N/A		Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	N/A		Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	N/A		Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	N/A		Ya

7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU	N/A		Ya
---	--	-----	--	----

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk

Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL tidak dilakukan penyesuaian nilai aset. Hal ini dikarenakan aset telah diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara.

Pendapatan Perolehan Aset Lainnya dikarenakan kesalahan nilai aset tetap serta kesalahan kode barang persediaan dan aset sesuai memorandum 005/PI.02/XI/2023 tanggal 10 November 2023 sebesar Rp1.599.000,00 dan memorandum 1/PI.02/II/2024 tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp6.438.000,00.

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,



(Amalia Kurniasih)
NIP 197502022005022001

Jakarta, 8 Mei 2024
Penelaah,



(Teresia Arta Pangestu)
NIP 199806182022032012

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2023

Kementerian/Lembaga : (074) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Tgl, No. SP : 30 November 2022 , DIPA-074.01.1.650236/2023

Unit Organisasi : (01) KOMNAS HAM Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (01.51) DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT KPPN : (175) Jakarta VI

Satuan Kerja : (650236) KOMNAS HAM

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 2.175.219.857,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 01233/SSP/650236/2023

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	13.199.862.961,00	24.139.326.186,00	35.163.969.290,00	2.175.219.857,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	3.042.827.624,00	8.966.629.119,00	9.834.236.886,00	2.175.219.857,00
	2. BP UM (Voucher)	10.068.447.101,00	7.955.789.839,00	18.024.236.940,00	0,00
	3. BP BPP	88.588.236,00	7.216.907.228,00	7.305.495.464,00	0,00
B	BP Selain Kas	13.199.862.961,00	8.592.176.084,00	19.616.819.188,00	2.175.219.857,00
	1. BP UP*)	243.715.401,00	242.109.201,00	485.824.602,00	0,00
	2. BP TUP*)	345.509.555,00	6.363.562.676,00	6.709.072.231,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	18.244.000,00	1.665.307.398,00	1.683.551.398,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	320.772.017,00	320.772.017,00	0,00
	5. BP Hibah	12.591.983.092,00	0,00	10.417.188.027,00	2.174.795.065,00
	6. BP Lain-lain	410.913,00	424.792,00	410.913,00	424.792,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	2.175.219.857,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	2.175.219.857,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	2.175.219.857,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	2.175.219.857,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
<hr/>		
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
<hr/>		
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	2.175.219.857,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	2.175.219.857,00
<hr/>		
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

- 1.
- 2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



Gatot Ristanto, S.H, M.M
NIP 197205201992031001

KOTA JAKARTA PUSAT, Desember 2023

Bendahara Pengeluaran



Aji Ratmoko
NIP 199601182018121002

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Jumat tanggal 29 bulan Desember tahun 2023, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 9891836502361000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 2.175.219.857 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 01233/SSP/650236/2023

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	2.175.219.857
2 Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3 Saldo BP BPP	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	2.175.219.857

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1 Saldo BP UP	Rp.	0
2 Saldo BP TUP	Rp.	0
3 Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4 Saldo Pajak	Rp.	0
5 Saldo Hibah	Rp.	2.174.795.065
6 Saldo BP Lain-lain	Rp.	424.792
7 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	2.175.219.857

C. Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0
------------------------------	-----	---

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	2.175.219.857
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	2.175.219.857

B. Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)	Rp.	0
-------------------------------	-----	---

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1 a. Saldo UP	Rp.	0
b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	0
2 a. Saldo TUP	Rp.	0
b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0
3 Saldo Lainnya	Rp.	2.175.219.857
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	2.175.219.857

B. Pembukuan menurut UAKPA

1 Kas UP di Bendahara	Rp.	0
2 Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3 Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	2.175.219.857
4 Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	2.175.219.857

C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)	Rp.	0
--	-----	---

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran



Aji Ratmoko
NIP 199601182018121002



Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



Gatot Ristanto, S.H, M.M
NIP 197205201992031001

***DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN**

SATKER 650236

BULAN : DESEMBER 2023

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	9891836502361000	BPG 175 KOMNAS HAM	Cabang Utama Kramat	20	S-1362/WPB.12/KP.06/2020	19-05-2020	2023-12-31	0.00
2	9891836502361001	BPP 175 KOMNAS HAM PERWAKILAN ACEH	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. KCP Kramat	21	S-1362/WPB.12/KP.06/2020	19-05-2020	28-12-2023	0.00
3	9891836502361002	BPP175 KOMNAS HAM PWK SUMBAR	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. KCP Kramat	21	S-1362/WPB.12/KP.06/2020	19-05-2020	21-12-2023	0.00
4	9891836502361003	BPP175 KOMNAS HAM PWK KALBAR	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. KCP Kramat	21	S-1362/WPB.12/KP.06/2020	19-05-2020	19-12-2023	0.00
5	9891836502361004	BPP175 KOMNAS HAM PERWAKILAN AMBON	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. KCP Kramat	21	S-1362/WPB.12/KP.06/2020	19-05-2020	11-12-2023	0.00
6	9891836502361005	BPP175 KOMNAS HAM PERWAKILAN SULTENG	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. KCP Kramat	21	S-1362/WPB.12/KP.06/2020	19-05-2020	12-12-2023	0.00
7	9891836502361006	BPP175 KOMNAS HAM PWK PAPUA	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. KCP Kramat	21	S-1362/WPB.12/KP.06/2020	19-05-2020	28-12-2023	0.00
8	9891836502361007	BPP 175 KOMNAS HAM 1	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. KCP Kramat	21	S-1481/KPN.1206/2022	05-07-2022	29-12-2023	0.00
9	9891836502361008	BPP 175 KOMNAS HAM 2	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. KCP Kramat	21	S-1481/KPN.1206/2022	05-07-2022	29-12-2023	0.00

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
10	1296987352	RPL 140 PDHL KOMNASHAM untuk 2C3SQYHA	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. KCU Menteng	30	000171	15-12-2021	29-12-2023	0.00
11	1633602352	RPL 140 PDHL KOMNASHAM untuk 2GM6ZCLA	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. KCU Menteng	30	000335	09-02-2023	29-12-2023	1,652,854,177.00
12	446555581	RPL 140 PDHL KOMNASHAM- untuk 2VEB1RVA	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - CAB.MENTENG	30	S-881/WPB.12/KP.0630/2016	26-05-2016	31-12-2023	0.00
13	716100718	RPL 140 PDHL KOMNAS HAM - 266FLDEA	-	30	S-735/WPB.12/KP.08/2018	07-05-2018	31-12-2023	522,365,680.00

BENDAHARA PENGELUARAN



Aji Ratmoko
NIP 199601182018121002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

**NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL
LAPORAN KEUANGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (BA 074) TAHUN 2023
YANG DIMASUKKAN DALAM
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2023 (AUDITED)**

Nomor : NKF-009/074/PB.6/2024

Pada hari ini, **Senin tanggal 29 April 2024**, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan **Rekonsiliasi Tiga Pihak secara Online** untuk menyepakati dan menyetujui angka-angka dalam **Laporan Keuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (BA 074) Tahun 2023**, sebagaimana Lampiran Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini, sebagai bentuk asersi final atas **Laporan Keuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (BA 074) Tahun 2023** dan untuk dikonsolidasikan dalam **LKPP Tahun 2023 (Audited)**.

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangka penetapan asersi final Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Penyesuaian angka-angka pada LKKL/LK BA BUN (*Unaudited*) dilakukan sesuai hasil rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan, yang diwakili oleh Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara). Hasil rekonsiliasi juga telah memasukkan usulan koreksi dari K/L dan koreksi audit Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan yang telah disetujui dan disepakati bersama.

Berdasarkan Nota Kesepakatan ini maka **Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (BA 074)** menyetujui akan memproses angka asersi final untuk selanjutnya menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2023 (*Audited*) beserta rinciannya secara lengkap sesuai dengan angka dalam **Lampiran Nota Kesepakatan** ini kepada Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan menyampaikan Laporan BMN kepada Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara) **paling lambat tanggal 8 Mei 2024**.

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI




Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Kekayaan Negara
Selaku Tim Penyusun LBMN

Emirenciana Nyantyasingsih

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Perbendaharaan
Selaku Tim Penyusun LKPP

Mohamad Hadad

**MENGETAHUI
Tim Auditor BPK**


Julian Wardiman

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

K/L : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

BA : 074

URAIAN	REALISASI UNAUDITED	KOREKSI		REALISASI AUDITED
		DEBIT	KREDIT	
1	2	3	4	5
Pendapatan Perpajakan	-			-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	318.412.191	-	-	318.412.191
Pendapatan Sumber Daya Alam	-			-
Pendapatan dari KND	-			-
Pendapatan BLU	-			-
Pendapatan PNBP Lainnya	318.412.191			318.412.191
Pendapatan Hibah	-			-
TOTAL PENDAPATAN	318.412.191	-	-	318.412.191
Belanja Pegawai	40.659.841.459			40.659.841.459
Belanja Barang dan Jasa	73.354.536.821			73.354.536.821
Belanja Modal	4.200.429.434			4.200.429.434
Belanja Pembayaran Bunga Utang	-			-
Belanja Subsidi	-			-
Belanja Hibah	-			-
Belanja Bantuan Sosial	-			-
Belanja Belanja Lain-lain	-			-
TOTAL BELANJA	118.214.807.714	-	-	118.214.807.714
Dana Bagi Hasil	-			-
Dana Alokasi Umum	-			-
Dana Alokasi Khusus	-			-
Dana Otonomi Khusus	-			-
Dana Keistimewaan DIY	-			-
Dana Desa	-			-
Insentif Fiskal	-			-
TOTAL TKD	-			-
Pembiayaan Dalam Negeri	-			-
Pembiayaan Luar Negeri	-			-
TOTAL PEMBIAYAAN	-			-



Badan Pemeriksa Keuangan

 Yulian Wardiman

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

K/L : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

BA : 074

URAIAN	UNAUDITED	KOREKSI DARI BPK DAN KL		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
EKUITAS AWAL	18.057.117.788			18.057.117.788
SURPLUS/DEFISIT LO	(116.924.401.918)	-	197.673.082	(116.726.728.836)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS				
Penyesuaian Nilai Aset	-			-
Penyesuaian SILPA	-			-
Koreksi Nilai Persediaan	-			-
Revaluasi Aset	-			-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(8.037.000)	15.597.568		(23.634.568)
Koreksi Atas Reklasifikasi Aset	-			-
Koreksi atas Transaksi BMN Lainnya	-			-
Koreksi Lain-lain	-			-
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	(8.037.000)	15.597.568	-	(23.634.568)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	193.062.914.183			193.062.914.183
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS	76.130.475.265	15.597.568	197.673.082	76.312.550.779
EKUITAS AKHIR	94.187.593.053	15.597.568	197.673.082	94.369.668.567

Jakarta, 29 April 2024
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Amalia Kumiasih

Ditjen Kekayaan Negara

Emirenciana Nyantyasingsih

Kementerian Keuangan

Mohamad Hadad

Badan Pemeriksa Keuangan

Yulian Wardiman

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

K/L : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
BA : 074

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI DARI BPK DAN KL		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	-			-
Kas di Bendahara Penerimaan	-			-
Kas Lainnya dan Setara kas	2.175.219.857	424.792	424.792	2.175.219.857
Kas pada BLU	-			-
Investasi Jangka Pendek BLU	-			-
Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	13.899.090	100.026.183		113.925.273
Uang Muka Belanja (<i>prepayment</i>)	-			-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-			-
Piutang Perpajakan	-			-
Penyisihan PTH-Piutang Perpajakan	-			-
Piutang Perpajakan (Netto)	-	-	-	-
Piutang Bukan Pajak	-			-
Penyisihan PTH - Piutang Bukan Pajak	-			-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	-	-	-	-
Bagian Lancar TPA	-			-
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TPA	-			-
Bagian Lancar TPA (Netto)	-	-	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	23.355.278		3.756.650	19.598.628
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TP/TGR	(116.776)	18.783		(97.993)
Bagian Lancar TP/TGR (Netto)	23.238.502	18.783	3.756.650	19.500.635
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	-			-
Penyisihan PTH-Bagian Lancar PJPL	-			-
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	-	-	-	-
Piutang dari Kegiatan BLU	-			-
Penyisihan PTH - Piutang dari Kegiatan BLU	-			-
Piutang dari Kegiatan BLU (Netto)	-	-	-	-
Persediaan	163.397.353			163.397.353
Persediaan yang Belum Diregister	-			-
Jumlah Aset Lancar	2.375.754.802	100.469.758	4.181.442	2.472.043.118
ASET TETAP				
Tanah	78.324.273.000			78.324.273.000
Peralatan dan Mesin	28.472.184.059		98.000.000	28.374.184.059
Gedung dan Bangunan	6.587.052.160			6.587.052.160
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-			-
Aset Tetap Lainnya	2.789.942.316	185.422.107	15.597.568	2.959.766.855
Konstruksi Dalam Pengerjaan	477.116.500			477.116.500
Aset Konsesi Jasa	-			-
Aset Tetap yang Belum Diregister	-			-
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(23.369.911.453)	9.800.000		(23.360.111.453)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.165.885.163)			(2.165.885.163)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-			-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-			-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	-			-
Jumlah Aset Tetap	91.114.771.419	195.222.107	113.597.568	91.196.395.958
PROPERTI INVESTASI				
Properti Investasi	-			-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-			-
Jumlah Properti Investasi	-	-	-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Tagihan Penjualan Angsuran	-			-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA	-			-
Tagihan Penjualan Angsuran (Netto)	-			-
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	162.363.000	3.756.650		166.119.650

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	(162.363.000)		18.783	(162.381.783)
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	-	3.756.650	18.783	3.737.867
Piutang Jangka Panjang Lainnya (PJPL)	-			-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - PJPL	-			-
Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	-			-
Jumlah Piutang Jangka Panjang	-	3.756.650	18.783	3.737.867
ASET LAINNYA				
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-			-
Aset Tak Berwujud	2.627.377.400			2.627.377.400
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	-			-
Dana yg Dibatasi Penggunaannya	254.452.000			254.452.000
Dana Penjaminan	-			-
Dana Kelolaan BLU	-			-
Aset Lain-lain	1.729.433.172			1.729.433.172
Akum. Penyusutan Kemitraan Dg Pihak Ketiga	-			-
Akum. Penyusutan Aset Lain-lain	-			-
Akum. Penyusutan AT yg TDK digunakan	(300.607.912)			(300.607.912)
Akum. Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.760.201.027)			(1.760.201.027)
Akum. Amortisasi ATB yg TDK digunakan	(1.426.286.689)			(1.426.286.689)
Jumlah Aset Lainnya	1.124.166.944	-	-	1.124.166.944
JUMLAH ASET	94.614.693.165	299.448.515	117.797.793	94.796.343.887
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	427.100.112	424.792		426.675.320
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-			-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	-			-
Pendapatan Diterima Dimuka	-			-
Hibah Yang Belum Disahkan	-			-
Uang Muka dari KPPN	-			-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-			-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	427.100.112	424.792	-	426.675.320
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	-			-
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	-			-
Kewajiban Konsesi Jasa	-			-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-			-
JUMLAH KEWAJIBAN	427.100.112	424.792	-	426.675.320
EKUITAS	94.187.593.053	-	182.075.514	94.369.668.567
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	94.614.693.165	299.873.307	299.873.307	94.796.343.887



Ditjen Kekayaan Negara

Emirenciana Nyentyasningsih

Badan Pemeriksa Keuangan

Yulian Wardiman

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

K/L : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
BA : 074

URAIAN	UNAUDITED	KOREKSI BPK DAN MANDIRI		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	-			-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	-			-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-			-
Pendapatan Cukai	-			-
Pendapatan Pajak Lainnya	-			-
Pendapatan Bea Masuk	-			-
Pendapatan Bea Keluar	-			-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	-			-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Penemuan Sumber Daya Alam	-			-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN / KND	-			-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	4.028.284		424.792	4.453.076
Pendapatan Badan Layanan Umum	-			-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	4.028.284		424.792	4.453.076
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	-			-
Jumlah Pendapatan Hibah	-			-
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	4.028.284		424.792	4.453.076
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	40.619.728.512			40.619.728.512
Beban Persediaan	1.030.988.931			1.030.988.931
Beban Barang dan Jasa	36.416.479.972		100.026.183	36.316.453.789
Beban Pemeliharaan	3.296.123.533		87.422.107	3.208.701.426
Beban Perjalanan Dinas	31.963.078.906			31.963.078.906
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-			-
Beban Bunga	-			-
Beban Subsidi	-			-
Beban Hibah	-			-
Beban Bantuan Sosial	-			-
Beban Transfer	-			-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.202.752.951		9.800.000	3.192.952.951
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	95.531			95.531
Beban Lain-lain	-			-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	116.529.057.274		197.248.290	116.331.808.984
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	- 116.525.028.990		197.673.082	116.327.355.908
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	125.713.521			125.713.521
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	700.316.143			700.316.143
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	- 574.602.622			- 574.602.622
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-			-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-			-
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-			-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	177.601.244			177.601.244
Beban dan Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.371.550			2.371.550
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	175.229.694			175.229.694
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	399.372.928			399.372.928
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa	-			-
Beban Luar Biasa	-			-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA				
SURPLUS/(DEFISIT) LO	116.225.401.938		197.673.082	116.726.728.836



Ditjen Kekayaan Negara



Yulian Wardiman

NO JP	NO JURNAL	URAIAN KOREKSI/REKLASIFIKASI	KODE AKUN	REF KKP	NERACA		LRA		LO		Ekuitas		S/TS *)
					D	K	D	K	D	K	D	K	
A	A	JURNAL KOREKSI USULAN KOMNAS HAM											
	PAJEKH#01	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi <i>[Koreksi atas kelebihan pencatatan bagian lancar piutang TGR an NAN]</i>	152111 115421		3.756.650								
	PAJEKH#02	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi <i>[Koreksi atas kesalahan jurnal penyesuaian penyisihan piutang TGR-bagian lancar]</i>	116421 156311		18.783								
B	B	JURNAL KOREKSI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN											
	PAJE#01	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran <i>[Koreksi atas kekurangan jurnal pencatatan jasa giro Desember 2023 di Rekening Hibah]</i>	212191 111821		424.792								
	PAJE#02	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) <i>[Koreksi atas kekurangan jurnal balik pencatatan penyetoran jasa giro tay]</i>	111821 425764		424.792					424.792			
	PAJE#03	Beban Barang Dibayar Dimuka (prepaid) Beban Keperluan Perkantoran Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 Beban Barang Non Operasional Lainnya Beban Jasa Lainnya <i>[Koreksi Beban Dibayar Dimuka yang belum tercatat di Neraca dan koreksi Beban di LO per 31 Desember 2023]</i>	114112 521111 521131 521219 522191		100.026.183					79.662.400 8.328.145 8.733.850 3.301.788			
	PAJE#04	Aset Tetap Renovasi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan <i>[Koreksi Pencatatan Aset Tetap Renovasi - Kanopi depan Ruang Pengaduan yang berasal dari Belanja Pemeliharaan pada Neraca per 31 Desember 2023]</i>	135111 523111		87.422.107					87.422.107			
	PAJE#05	Aset Tetap Renovasi Peralatan dan Mesin <i>[Koreksi Pencatatan Aset Tetap Renovasi - Partisi Geser Penyekat Ruangan yang tercatat sebagai Peralatan dan Mesin pada Neraca per 31 Desember 2023]</i>	135111 132111		98.000.000					98.000.000			
	PAJE#06	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin <i>[Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan Partisi Geser Penyekat Ruangan yang direklasifikasi sebagai Aset Tetap Renovasi pada Neraca]</i>	137111 591211		9.800.000					9.800.000			
	PAJE#07	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Aset Tetap Renovasi <i>[Koreksi Pencatatan Aset Tetap Renovasi berupa kekurangan volume Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Pemantauan dan Mediasi Komnas HAM]</i>	391116 135111								3.720.918		
	PAJE#08	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Aset Tetap Renovasi <i>[Koreksi Pencatatan Aset Tetap Renovasi berupa kekurangan volume Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama]</i>	391116 135111								9.175.450		
	PAJE#09	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Aset Tetap Renovasi <i>[Koreksi Pencatatan Aset Tetap Renovasi berupa kekurangan volume Pekerjaan Renovasi Ruang Tunggu Pengemudi, Wartawan, dan R. Kolaborasi Komnas HAM]</i>	391116 135111								2.701.200		
C	C	JURNAL PENUTUP											
PCJE#01	PCJE#01	Suplus/Defisit LO Ekuitas <i>[Jurnal Penutup atas Surplus/Defisit LO Koreksian]</i>											
		TOTAL JURNAL			299.873.307	117.797.793	0	0	0	197.673.082	15.597.568	0	

**NOTULENSI RAPAT TRIPARTIT TA.2023
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

Hari / Tanggal	: Senin/ 29 April 2024
Nama Peserta/No HP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Bimbingan SAI <ol style="list-style-type: none"> a. Hangger Prihandoko b. Dwi Kurniawan Saputro c. Andreas Oktorinus d. Wahyu Arimbi e. Ganti Anisa Boru Hombing 2. Perwakilan /Auditor BPK RI <ol style="list-style-type: none"> a. Rosalin Boru Angin b. Yulian Wardiman c. Prima Gladia 3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia <ol style="list-style-type: none"> a. Didit Eko Setiawan b. Marsha Ayu Wulandari c. Ruth Caroline d. Sapto Krisdiyanto e. Intan Rissa f. Andi Prawira g. Amalia Kurniasih h. Santy Rahayu i. Angga Oktapriono j. Eva Nila Sari k. Stanislaus Arya Aditya
Uraian Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 9 Temuan Pemeriksaan yang sudah ditanggapi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - Jurnal koreksi yang diajukan sudah sesuai dengan kesepakatan forum - Terdapat beberapa usulan dari BPK terkait pelaksanaan di tahun 2023 2. Hasil klarifikasi Seluruh jurnal koreksi telah disepakati oleh seluruh pihak 3. Usulan koreksi LKKL (BPK, K/L, APIP KL) Koreksi Usulan KL Komisi Nasional Hak Asasi Manusia <ul style="list-style-type: none"> - Jurnal koreksi nomor PAJEKH#01 merupakan koreksi atas kelebihan pencatatan bagian lancar piutang TGR an NAN - Jurnal koreksi nomor PAJEKH#01 merupakan koreksi atas kesalahan jurnal penyesuaian penyisihan piutang TGR-bagian lancar - Jurnal Koreksi nomor PAJE#01 merupakan koreksi atas kekurangan jurnal pencatatan jasa giro Desember 2023 di Rekening Hibah - Jurnal Koreksi nomor PAJE#02 merupakan koreksi atas kekurangan jurnal balik pencatatan penyetoran jasa giro tayl - Jurnal Koreksi PAJE#03 merupakan koreksi beban dibayar dimuka yang belum tercatat di Neraca dan koreksi Beban di LO per 31 Desember 2023 - Jurnal Koreksi PAJE#04 merupakan koreksi pencatatan asset tetap renovasi - Kanopi depan Ruang Pengaduan yang berasal dari Belanja Pemeliharaan pada Neraca per 31 Desember 2023

		<ul style="list-style-type: none"> - Jurnal Koreksi PAJE#05 merupakan koreksi pencatatan aset tetap renovasi – Partisi Geser Penyekat Ruangan yang tercatat sebagai Peralatan dan Mesin pada Neraca per 31 Desember 2023 - Jurnal Koreksi PAJE#06 merupakan koreksi pencatatan akumulasi penyusutan dan beban penyusutan partisi geser penyekat ruangan yang direklasifikasi sebagai Aset Tetap Renovasi pada Neraca per 31 Desember 2023 - Jurnal Koreksi PAJE#07 merupakan koreksi pencatatan aset tetap renovasi berupa kekurangan volume pekerjaan konstruksi renovasi ruang pemantauan dan mediasi Komnas HAM - Jurnal Koreksi PAJE#08 merupakan koreksi pencatatan aset tetap renovasi berupa kekurangan volume pekerjaan renovasi ruang hukum, hubungan Masyarakat, dan kerjasama - Jurnal Koreksi PAJE#09 merupakan koreksi pencatatan aset tetap renovasi berupa kekurangan volume pekerjaan renovasi ruang tunggu pengemudi, wartawan, dan ruang kolaborasi Komnas HAM - Koreksi jurnal penutup atas Surplus/Defisit LO Koreksian
Pembahasan dan Solusi	:	Seluruh koreksi usulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia disepakati seluruh pihak
Kesimpulan dan Hasil Kesepakatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal koreksi yang diajukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan BPK telah disepakati Bersama oleh seluruh pihak 2. Temuan pemeriksaan telah disepakati oleh BPK dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan telah ditindaklanjuti

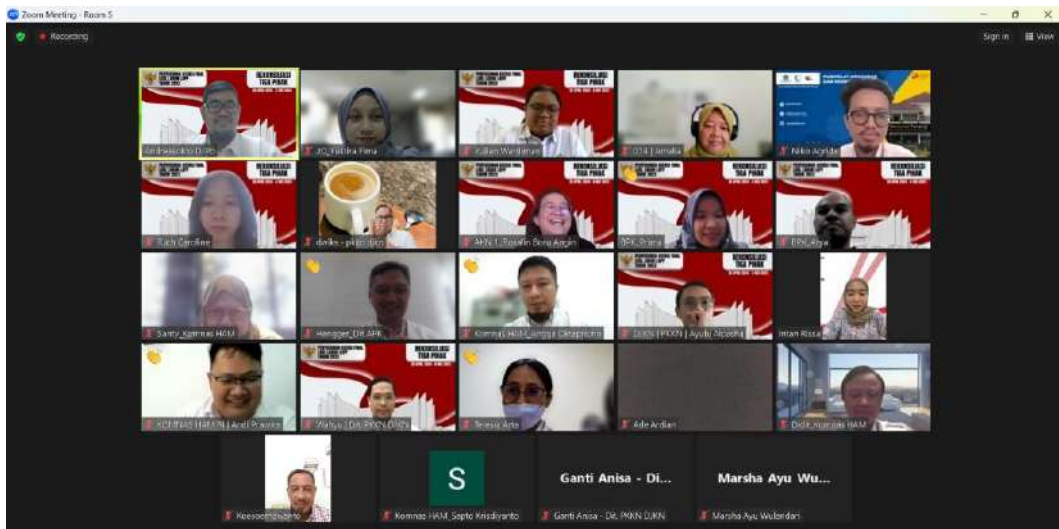
Jakarta, 29 April 2024

Notulen



Yustira Fima Nur Azhaar

DOKUMENTASI





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 650236
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	119,831,945,000	119,831,945,000	0
2	Belanja	118,638,047,024	118,638,047,024	0
3	Pengembalian Belanja	-423,239,310	-423,239,310	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	318,412,191	318,412,191	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	2,174,795,065	2,174,795,065	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 29-JAN-24



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (074) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

UNIT ORGANISASI : (01) KOMNAS HAM

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (650236) KOMNAS HAM

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 9:39 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	118,214,807,714
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	318,412,191	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	125,713,521
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	4,028,284
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	19,106,142
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	20,726,290
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	140,770,766
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,067,188
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	11,836,840,800	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	189,135	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	720,556,212	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	194,342,696	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	397,400,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	760,289,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	42,522,438	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	646,783,020	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,759,641,000	0
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	54,480,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	469,130,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	107,937,500	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,174	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,966,500	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,305,260	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	16,992,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5,069,400	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	22,185,000	0
3.0	512111	Belanja Uang Honor Tetap	11,565,361,350	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	544,163,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	10,008,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	11,402,837,468	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	106,059,759	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	13,815,773,115	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	13,996,400	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	352,567,184	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	624,060,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	38,741,795	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	63,574,170	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (074) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

UNIT ORGANISASI : (01) KOMNAS HAM

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (650236) KOMNAS HAM

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 9:39 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521211	Belanja Bahan	2,727,231,058	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,002,248,200	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	505,164,340	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	14,700,000	0
3.0	521711	Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund	129,791,150	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,011,172,899	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	104,471,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,582,983,704	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	165,093,083	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	65,551,675	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	829,624,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	640,018,068	0
3.0	522141	Belanja Sewa	4,883,002,391	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	2,118,352,497	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	6,238,190,507	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	54,892,101	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,018,421,457	0
3.0	523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	26,793,345	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,139,558,671	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,579,239,505	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	324,316,600	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,769,764,705	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10,917,518,984	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	2,013,744,274	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,086,042,416	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	1,461,244,818	0
3.0	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	653,142,200	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	3,686,181
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	615
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	3,460,037
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	72,420
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	3,492,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	307,531,459
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	18,346,651
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	72,871,835
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	13,778,112

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (074) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

UNIT ORGANISASI : (01) KOMNAS HAM

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (650236) KOMNAS HAM

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 9:39 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			118,956,459,215	118,956,459,215

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 7 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Gatot Ristanto, S.H, M.M

197205201992031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (074) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

UNIT ORGANISASI : (01) KOMNAS HAM

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (650236) KOMNAS HAM

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 9:40 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	424,792	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	2,174,795,065	0
0.0	114111	Beban Pegawai Dibayar di Muka (prepaid)	13,899,090	0
0.0	114112	Beban barang yang dibayar di muka (prepaid)	100,026,183	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	19,598,628	0
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	97,993
0.0	117111	Barang Konsumsi	162,725,353	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	672,000	0
0.0	131111	Tanah	78,324,273,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	28,374,184,059	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	6,587,052,160	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	1,447,748,857	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,512,017,998	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	477,116,500	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	23,360,111,453
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,165,885,163
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	166,119,650	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	162,381,783
0.0	162151	Software	2,627,377,400	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	254,452,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	303,146,483	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	1,426,286,689	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	300,607,912
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,760,201,027
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	1,426,286,689
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	40,886,502
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	131,336,818
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	254,452,000
0.0	313111	Ditagikan ke Entitas Lain	0	107,556,051,394
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	318,412,191	0
0.0	313211	Transfer Keluar	8,511,261,720	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	81,507,122,068
0.0	391111	Ekuitas	0	18,057,117,788
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	23,634,568	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	12,852,297,263
0.0	391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	22,882,631	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	125,713,521

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (074) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

UNIT ORGANISASI : (01) KOMNAS HAM

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (650236) KOMNAS HAM

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 9:40 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	4,453,076
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	20,726,290
3.0	425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	140,770,766
3.0	425913	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,067,188
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	8,037,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	11,834,362,919	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	188,539	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	720,677,042	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	194,376,920	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	397,400,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	718,972,933	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	42,537,140	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	646,710,600	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,746,114,000	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	54,480,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	469,130,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	107,937,500	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,174	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,966,500	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,305,260	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	16,992,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	5,069,400	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	23,649,000	0
3.0	512111	Beban Uang Honor Tetap	11,565,361,350	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	551,675,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	11,333,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	11,402,428,476	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	106,059,759	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	13,692,201,965	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	13,996,400	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	351,555,831	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	624,060,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	38,741,795	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	55,246,025	0
3.0	521211	Beban Bahan	2,724,274,771	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	2,002,248,200	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	496,430,490	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	14,700,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (074) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

UNIT ORGANISASI : (01) KOMNAS HAM

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (650236) KOMNAS HAM

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 9:40 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
		COVID-19		
3.0	521711	Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund	127,419,600	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,573,903,254	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	162,229,672	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	65,593,537	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	826,315,473	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	640,018,068	0
3.0	522141	Beban Sewa	4,877,002,391	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	2,101,360,497	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	5,874,263,719	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	54,892,101	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	930,999,350	0
3.0	523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	26,793,345	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,139,558,671	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	11,270,958,046	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	325,066,600	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,525,674,452	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10,841,413,646	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1,999,966,162	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2,281,028,251	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	268,020,460	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	639,427,097	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	4,477,143	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,030,988,931	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	111,350,060	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	95,531
3.0	596111	Kerugian Pelepasan Aset	700,316,143	0
3.0	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	2,371,550	0
JUMLAH			249,882,699,225	249,882,699,225

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 7 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Gatot Ristanto, S.H, M.M

197205201992031001

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 074
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 650236

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KOMNAS HAM
DKI JAKARTA
KOMNAS HAM

Tgl. Cetak 07/05/2024 9:40 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker --rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	4,136,753	0
0.0	114111	Beban Pegawai Dibayar di Muka (prepaid)	13,490,098	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	22,863,204	0
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	114,316
0.0	117111	Barang Konsumsi	182,541,385	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	7,551,060	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	28,606,325,064	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	13,663,103,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,495,517,998	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	477,116,500	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	23,373,701,741
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,869,251,630
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	181,961,216	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	162,460,991
0.0	162151	Software	1,805,914,700	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	788,930,705	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	2,551,007,192	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	781,914,991
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,120,773,930
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	2,551,007,192
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	80,590,457
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	803,525,839
0.0	391111	Ekuitas	0	18,057,117,788
JUMLAH			49,800,458,875	49,800,458,875

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 074
ESELON I : KOMNAS HAM 01
SATUAN KERJA : KOMNAS HAM 650236

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM
Tgl Cetak : 07/05/24 9:40 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	119,831,945,000	118,214,807,714	(1,617,137,286)	99	106,745,424,000	103,272,281,792	(3,473,142,208)	97
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 7 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

Gatot Ristanto, S.H, M.M
197205201992031001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (074) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
UNIT ORGANISASI : (01) KOMNAS HAM
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (650236) KOMNAS HAM

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 07/05/24 9:40 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	2,175,219,857	4,136,753	2,171,083,104	52,482.78
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	113,925,273	13,490,098	100,435,175	744.51
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	19,598,628	22,863,204	(3,264,576)	(14.28)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(97,993)	(114,316)	16,323	(14.28)
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	19,500,635	22,748,888	(3,248,253)	(14.28)
Persediaan	163,397,353	190,092,445	(26,695,092)	(14.04)
JUMLAH ASET LANCAR	2,472,043,118	230,468,184	2,241,574,934	972.62
ASET TETAP				
Tanah	78,324,273,000	0	78,324,273,000	0.00
Peralatan dan Mesin	28,374,184,059	28,606,325,064	(232,141,005)	(0.81)
Gedung dan Bangunan	6,587,052,160	13,663,103,000	(7,076,050,840)	(51.79)
Aset Tetap Lainnya	2,959,766,855	1,495,517,998	1,464,248,857	97.91
Konstruksi Dalam Pengerjaan	477,116,500	477,116,500	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(25,525,996,616)	(26,242,953,371)	716,956,755	(2.73)
JUMLAH ASET TETAP	91,196,395,958	17,999,109,191	73,197,286,767	406.67
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	166,119,650	181,961,216	(15,841,566)	(8.71)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(162,381,783)	(162,460,991)	79,208	(0.05)
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	3,737,867	19,500,225	(15,762,358)	(80.83)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	3,737,867	19,500,225	(15,762,358)	(80.83)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	2,627,377,400	1,805,914,700	821,462,700	45.49
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	254,452,000	0	254,452,000	0.00
Aset Lain-lain	1,729,433,172	3,339,937,897	(1,610,504,725)	(48.22)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(3,487,095,628)	(4,453,696,113)	966,600,485	(21.70)
JUMLAH ASET LAINNYA	1,124,166,944	692,156,484	432,010,460	62.42
JUMLAH ASET	94,796,343,887	18,941,234,084	75,855,109,803	400.48
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	426,675,320	884,116,296	(457,440,976)	(51.74)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	426,675,320	884,116,296	(457,440,976)	(51.74)
JUMLAH KEWAJIBAN	426,675,320	884,116,296	(457,440,976)	(51.74)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (074) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
UNIT ORGANISASI : (01) KOMNAS HAM
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (650236) KOMNAS HAM

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 07/05/24 9:40 AM
Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	94,369,668,567	18,057,117,788	76,312,550,779	422.62
JUMLAH EKUITAS	94,369,668,567	18,057,117,788	76,312,550,779	422.62
JUMLAH EKUITAS	94,369,668,567	18,057,117,788	76,312,550,779	422.62
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	94,796,343,887	18,941,234,084	75,855,109,803	400.48

Keterangan :
FINAL

Jakarta, 7 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

Gatot Ristanto, S.H, M.M
197205201992031001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (074) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
UNIT ORGANISASI : (01) KOMNAS HAM
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (650236) KOMNAS HAM

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 9:41 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	4,453,076	2,146,792	2,306,284	107.429
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	4,453,076	2,146,792	2,306,284	107.429
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	4,453,076	2,146,792	2,306,284	107.429
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	40,619,728,512	39,126,365,641	1,493,362,871	3.817
Beban Persediaan	1,030,988,931	1,689,449,318	(658,460,387)	(38.975)
Beban Barang dan Jasa	36,316,453,789	33,493,405,106	2,823,048,683	8.429
Beban Pemeliharaan	3,208,701,426	2,773,252,104	435,449,322	15.702
Beban Perjalanan Dinas	31,963,078,906	24,676,716,779	7,286,362,127	29.527
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (074) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

UNIT ORGANISASI : (01) KOMNAS HAM

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (650236) KOMNAS HAM

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 9:41 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,192,952,951	2,960,337,347	232,615,604	7.858
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(95,531)	212,307	(307,838)	(144.99 7)
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	116,331,808,984	104,719,738,602	11,612,070,382	11.089
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(116,327,355,908)	(104,717,591,810)	(11,609,764,098)	11.087
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(574,602,622)	(28,016,224)	(546,586,398)	1,950.9 64
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	125,713,521	56,777,776	68,935,745	121.413
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	700,316,143	84,794,000	615,522,143	725.903
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	175,229,694	328,858,247	(153,628,553)	(46.716)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	177,601,244	329,215,247	(151,614,003)	(46.053)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,371,550	357,000	2,014,550	564.3
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(399,372,928)	300,842,023	(700,214,951)	(232.75 2)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(116,726,728,836)	(104,416,749,787)	(12,309,979,049)	11.789
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(116,726,728,836)	(104,416,749,787)	(12,309,979,049)	11.789

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 7 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

Gatot Ristanto, S.H, M.M
197205201992031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (074) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

UNIT ORGANISASI : (01) KOMNAS HAM

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (650236) KOMNAS HAM

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 9:41 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	18,057,117,788	21,281,131,772	(3,224,013,984)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(116,726,728,836)	(104,416,749,787)	(12,309,979,049)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(23,634,568)	(10,585,226)	(13,049,342)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(23,634,568)	(10,585,226)	(13,049,342)	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	193,062,914,183	101,203,321,029	91,859,593,154	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	76,312,550,779	(3,224,013,984)	79,536,564,763	-
EKUITAS AKHIR	94,369,668,567	18,057,117,788	76,312,550,779	-

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 7 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Gatot Ristanto, S.H, M.M

197205201992031001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 074 **KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**
ESELON I : 01 **KOMNAS HAM**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 650236 **KOMNAS HAM**
JENIS SATUAN KERJA : KP

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 07/05/24 9:41 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 7/5/24 7:41 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	12,460,000,000	11,885,000,000	11,836,840,800	3,686,181	11,833,154,619	99.59	51,845,381
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	504,000	504,000	189,135	615	188,520	37.53	315,480
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	700,000,000	724,000,000	720,556,212	0	720,556,212	99.52	3,443,788
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	220,500,000	200,083,000	194,342,696	0	194,342,696	97.13	5,740,304
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	588,000,000	423,000,000	397,400,000	0	397,400,000	93.95	25,600,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	416,000,000	796,074,000	760,289,000	3,460,037	756,828,963	95.5	39,245,037
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	21,000,000	47,000,000	42,522,438	0	42,522,438	90.47	4,477,562
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	617,306,000	678,144,000	646,783,020	72,420	646,710,600	95.38	31,433,400
511129	Belanja Uang Makan PNS	2,888,952,000	1,875,168,000	1,759,641,000	0	1,759,641,000	93.84	115,527,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	40,500,000	54,480,000	54,480,000	0	54,480,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	474,500,000	469,500,000	469,130,000	0	469,130,000	99.92	370,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	18,427,262,000	17,152,953,000	16,882,174,301	7,219,253	16,874,955,048	98.42	277,997,952
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	115,000,000	107,937,500	0	107,937,500	93.86	7,062,500
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	15,000	1,174	0	1,174	7.83	13,826
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	7,150,000	2,966,500	0	2,966,500	41.49	4,183,500
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	2,500,000	1,305,260	0	1,305,260	52.21	1,194,740
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	21,500,000	16,992,000	0	16,992,000	79.03	4,508,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	22,800,000	5,069,400	0	5,069,400	22.23	17,730,600
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	52,250,000	22,185,000	0	22,185,000	42.46	30,065,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	221,215,000	156,456,834	0	156,456,834	70.73	64,758,166
5121	Belanja Honorarium							
512111	Belanja Uang Honor Tetap	10,243,304,000	11,580,619,000	11,565,361,350	0	11,565,361,350	99.87	15,257,650
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5121	10,243,304,000	11,580,619,000	11,565,361,350	0	11,565,361,350	99.87	15,257,650
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	90,432,000	724,080,000	544,163,000	0	544,163,000	75.15	179,917,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	40,555,000	10,008,000	0	10,008,000	24.68	30,547,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	90,432,000	764,635,000	554,171,000	0	554,171,000	72.48	210,464,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	13,209,420,000	11,501,000,000	11,402,837,468	0	11,402,837,468	99.15	98,162,532
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	110,000,000	106,059,759	0	106,059,759	96.42	3,940,241
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	13,209,420,000	11,611,000,000	11,508,897,227	0	11,508,897,227	99.12	102,102,773

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 074 **KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**
ESELON I : 01 **KOMNAS HAM**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 650236 **KOMNAS HAM**
JENIS SATUAN KERJA : KP

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 07/05/24 9:41 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 7/5/24 7:41 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	41,970,418,000	41,330,422,000	40,667,060,712	7,219,253	40,659,841,459	98.39	670,580,541
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	12,732,284,000	13,872,330,000	13,815,773,115	0	13,815,773,115	99.59	56,556,885
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	252,750,000	14,002,000	13,996,400	0	13,996,400	99.96	5,600
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	327,182,000	369,299,000	352,567,184	0	352,567,184	95.47	16,731,816
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	565,680,000	624,060,000	624,060,000	0	624,060,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	32,850,000	41,700,000	38,741,795	0	38,741,795	92.91	2,958,205
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	98,800,000	63,626,000	63,574,170	0	63,574,170	99.92	51,830
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	14,009,546,000	14,985,017,000	14,908,712,664	0	14,908,712,664	99.49	76,304,336
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	2,463,962,000	2,773,330,000	2,727,231,058	0	2,727,231,058	98.34	46,098,942
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	181,950,000	2,002,277,000	2,002,248,200	0	2,002,248,200	100	28,800
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	865,262,000	507,955,000	505,164,340	0	505,164,340	99.45	2,790,660
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	117,300,000	14,700,000	14,700,000	0	14,700,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	3,628,474,000	5,298,262,000	5,249,343,598	0	5,249,343,598	99.08	48,918,402
5217	Belanja Kontribusi dan Kompensasi							
521711	Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust	140,000,000	129,904,000	129,791,150	0	129,791,150	99.91	112,850
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5217	140,000,000	129,904,000	129,791,150	0	129,791,150	99.91	112,850
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	850,416,000	1,012,284,000	1,011,172,899	0	1,011,172,899	99.89	1,111,101
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	314,604,000	104,578,000	104,471,000	0	104,471,000	99.9	107,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,165,020,000	1,116,862,000	1,115,643,899	0	1,115,643,899	99.89	1,218,101
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	1,396,836,000	1,591,467,000	1,582,983,704	0	1,582,983,704	99.47	8,483,296
522112	Belanja Langganan Telepon	183,012,000	168,723,000	165,093,083	0	165,093,083	97.85	3,629,917
522113	Belanja Langganan Air	84,120,000	65,868,000	65,551,675	0	65,551,675	99.52	316,325
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	890,100,000	829,704,000	829,624,000	0	829,624,000	99.99	80,000
522131	Belanja Jasa Konsultan	220,000,000	640,153,000	640,018,068	0	640,018,068	99.98	134,932
522141	Belanja Sewa	4,765,718,000	4,912,626,000	4,883,002,391	0	4,883,002,391	99.4	29,623,609
522151	Belanja Jasa Profesi	2,400,622,000	2,187,547,000	2,118,352,497	3,492,000	2,114,860,497	96.84	72,686,503
522191	Belanja Jasa Lainnya	4,956,543,000	6,293,918,000	6,238,190,507	0	6,238,190,507	99.11	55,727,493
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	196,837,000	55,637,000	54,892,101	0	54,892,101	98.66	744,899
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	15,093,788,000	16,745,643,000	16,577,708,026	3,492,000	16,574,216,026	99	171,426,974

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 074 **KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**
ESELON I : 01 **KOMNAS HAM**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 650236 **KOMNAS HAM**
JENIS SATUAN KERJA : KP

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 07/05/24 9:41 AM
 Halaman : 3
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 7/5/24 7:41 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	457,595,000	1,018,805,000	1,018,421,457	0	1,018,421,457	99.96	383,543
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	26,794,000	26,794,000	26,793,345	0	26,793,345	100	655
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,694,156,000	2,161,475,000	2,139,558,671	0	2,139,558,671	98.99	21,916,329
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	2,178,545,000	3,207,074,000	3,184,773,473	0	3,184,773,473	99.3	22,300,527
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,425,661,000	11,619,327,000	11,579,239,505	307,531,459	11,271,708,046	99.65	347,618,954
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	253,940,000	330,611,000	324,316,600	0	324,316,600	98.1	6,294,400
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,249,559,000	7,828,151,000	7,769,764,705	18,346,651	7,751,418,054	99.25	76,732,946
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9,582,253,000	11,009,757,000	10,917,518,984	72,871,835	10,844,647,149	99.16	165,109,851
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	27,511,413,000	30,787,846,000	30,590,839,794	398,749,945	30,192,089,849	99.36	595,756,151
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1,225,496,000	2,024,708,000	2,013,744,274	13,778,112	1,999,966,162	99.46	24,741,838
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	1,225,496,000	2,024,708,000	2,013,744,274	13,778,112	1,999,966,162	99.46	24,741,838
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	64,952,282,000	74,295,316,000	73,770,556,878	416,020,057	73,354,536,821	99.29	940,779,179
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,235,340,000	2,091,692,000	2,086,042,416	0	2,086,042,416	99.73	5,649,584
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	1,235,340,000	2,091,692,000	2,086,042,416	0	2,086,042,416	99.73	5,649,584
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	1,948,600,000	1,461,275,000	1,461,244,818	0	1,461,244,818	100	30,182
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	853,850,000	653,240,000	653,142,200	0	653,142,200	99.99	97,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	2,802,450,000	2,114,515,000	2,114,387,018	0	2,114,387,018	99.99	127,982
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	4,037,790,000	4,206,207,000	4,200,429,434	0	4,200,429,434	99.86	5,777,566
	JUMLAH BELANJA	110,960,490,000	119,831,945,000	118,638,047,024	423,239,310	118,214,807,714	99	1,617,137,286

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 074
SATUAN KERJA : 650236

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KOMNAS HAM

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/24 9:41 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	12,460,000,000	11,885,000,000	11,836,840,800	3,686,181	11,833,154,619	99.56	51,845,381
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	504,000	504,000	189,135	615	188,520	37.4	315,480
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	700,000,000	724,000,000	720,556,212	0	720,556,212	99.52	3,443,788
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	220,500,000	200,083,000	194,342,696	0	194,342,696	97.13	5,740,304
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	588,000,000	423,000,000	397,400,000	0	397,400,000	93.95	25,600,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	416,000,000	796,074,000	760,289,000	3,460,037	756,828,963	95.07	39,245,037
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	21,000,000	47,000,000	42,522,438	0	42,522,438	90.47	4,477,562
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	617,306,000	678,144,000	646,783,020	72,420	646,710,600	95.36	31,433,400
511129	Belanja Uang Makan PNS	2,888,952,000	1,875,168,000	1,759,641,000	0	1,759,641,000	93.84	115,527,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	40,500,000	54,480,000	54,480,000	0	54,480,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	474,500,000	469,500,000	469,130,000	0	469,130,000	99.92	370,000
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	115,000,000	107,937,500	0	107,937,500	93.86	7,062,500
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	15,000	1,174	0	1,174	7.83	13,826
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	7,150,000	2,966,500	0	2,966,500	41.49	4,183,500
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	2,500,000	1,305,260	0	1,305,260	52.21	1,194,740
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	21,500,000	16,992,000	0	16,992,000	79.03	4,508,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	22,800,000	5,069,400	0	5,069,400	22.23	17,730,600
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	52,250,000	22,185,000	0	22,185,000	42.46	30,065,000
512111	Belanja Uang Honor Tetap	10,243,304,000	11,580,619,000	11,565,361,350	0	11,565,361,350	99.87	15,257,650
512211	Belanja Uang Lembur	90,432,000	724,080,000	544,163,000	0	544,163,000	75.15	179,917,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	40,555,000	10,008,000	0	10,008,000	24.68	30,547,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	13,209,420,000	11,501,000,000	11,402,837,468	0	11,402,837,468	99.15	98,162,532
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	110,000,000	106,059,759	0	106,059,759	96.42	3,940,241
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	41,970,418,000	41,330,422,000	40,667,060,712	7,219,253	40,659,841,459	98.39	670,580,541
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	12,732,284,000	13,872,330,000	13,815,773,115	0	13,815,773,115	99.59	56,556,885
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	252,750,000	14,002,000	13,996,400	0	13,996,400	99.96	5,600
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	327,182,000	369,299,000	352,567,184	0	352,567,184	95.47	16,731,816
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	565,680,000	624,060,000	624,060,000	0	624,060,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	32,850,000	41,700,000	38,741,795	0	38,741,795	92.91	2,958,205
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	98,800,000	63,626,000	63,574,170	0	63,574,170	99.92	51,830
521211	Belanja Bahan	2,463,962,000	2,530,046,000	2,484,128,528	0	2,484,128,528	98.19	45,917,472
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	181,950,000	80,728,000	80,700,000	0	80,700,000	99.97	28,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	865,262,000	503,750,000	501,684,340	0	501,684,340	99.59	2,065,660
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	117,300,000	14,700,000	14,700,000	0	14,700,000	100	0
521711	Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund	140,000,000	129,904,000	129,791,150	0	129,791,150	99.91	112,850
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	850,416,000	1,012,284,000	1,011,172,899	0	1,011,172,899	99.89	1,111,101
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	314,604,000	104,578,000	104,471,000	0	104,471,000	99.9	107,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 074
SATUAN KERJA : 650236

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KOMNAS HAM

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/24 9:41 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522111	Belanja Langganan Listrik	1,396,836,000	1,591,467,000	1,582,983,704	0	1,582,983,704	99.47	8,483,296
522112	Belanja Langganan Telepon	183,012,000	168,723,000	165,093,083	0	165,093,083	97.85	3,629,917
522113	Belanja Langganan Air	84,120,000	65,868,000	65,551,675	0	65,551,675	99.52	316,325
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	890,100,000	829,704,000	829,624,000	0	829,624,000	99.99	80,000
522131	Belanja Jasa Konsultan	220,000,000	440,153,000	440,018,068	0	440,018,068	99.97	134,932
522141	Belanja Sewa	4,765,718,000	4,793,070,000	4,765,334,391	0	4,765,334,391	99.42	27,735,609
522151	Belanja Jasa Profesi	2,400,622,000	1,750,930,000	1,705,252,497	3,492,000	1,701,760,497	97.19	49,169,503
522191	Belanja Jasa Lainnya	4,956,543,000	5,080,591,000	5,034,525,145	0	5,034,525,145	99.09	46,065,855
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	196,837,000	55,637,000	54,892,101	0	54,892,101	98.66	744,899
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	457,595,000	1,018,805,000	1,018,421,457	0	1,018,421,457	99.96	383,543
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	26,794,000	26,794,000	26,793,345	0	26,793,345	100	655
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,694,156,000	2,149,475,000	2,127,558,671	0	2,127,558,671	98.98	21,916,329
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,425,661,000	11,602,695,000	11,562,608,956	307,531,459	11,255,077,497	97	347,617,503
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	253,940,000	330,311,000	324,116,600	0	324,116,600	98.12	6,194,400
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,249,559,000	5,905,598,000	5,873,092,337	18,346,651	5,854,745,686	99.14	50,852,314
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9,582,253,000	6,685,947,000	6,631,475,893	72,871,835	6,558,604,058	98.1	127,342,942
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1,225,496,000	1,718,227,000	1,707,267,054	13,778,112	1,693,488,942	98.56	24,738,058
	JUMLAH BELANJA BARANG	64,952,282,000	63,575,002,000	63,149,969,558	416,020,057	62,733,949,501	99.33	841,052,499
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,235,340,000	2,053,491,000	2,047,873,416	0	2,047,873,416	99.73	5,617,584
536111	Belanja Modal Lainnya	1,948,600,000	1,461,275,000	1,461,244,818	0	1,461,244,818	100	30,182
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	853,850,000	653,240,000	653,142,200	0	653,142,200	99.99	97,800
	JUMLAH BELANJA MODAL	4,037,790,000	4,168,006,000	4,162,260,434	0	4,162,260,434	99.86	5,745,566
	JUMLAH RUPIAH MURNI	110,960,490,000	109,073,430,000	107,979,290,704	423,239,310	107,556,051,394	99	1,517,378,606
11	HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI							
52	BELANJA BARANG							
521211	Belanja Bahan	0	243,284,000	243,102,530	0	243,102,530	99.93	181,470
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	0	1,921,549,000	1,921,548,200	0	1,921,548,200	100	800
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	4,205,000	3,480,000	0	3,480,000	82.76	725,000
522131	Belanja Jasa Konsultan	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	100	0
522141	Belanja Sewa	0	119,556,000	117,668,000	0	117,668,000	98.42	1,888,000
522151	Belanja Jasa Profesi	0	436,617,000	413,100,000	0	413,100,000	94.61	23,517,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	0	1,213,327,000	1,203,665,362	0	1,203,665,362	99.2	9,661,638
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	100	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	16,632,000	16,630,549	0	16,630,549	99.99	1,451
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	300,000	200,000	0	200,000	66.67	100,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	1,922,553,000	1,896,672,368	0	1,896,672,368	98.65	25,880,632
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	4,323,810,000	4,286,043,091	0	4,286,043,091	99.13	37,766,909
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	306,481,000	306,477,220	0	306,477,220	100	3,780

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 074
SATUAN KERJA : 650236

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KOMNAS HAM

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/24 9:41 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA BARANG	0	10,720,314,000	10,620,587,320	0	10,620,587,320	99.07	99,726,680
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	38,201,000	38,169,000	0	38,169,000	99.92	32,000
	JUMLAH BELANJA MODAL	0	38,201,000	38,169,000	0	38,169,000	99.92	32,000
	JUMLAH HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI	0	10,758,515,000	10,658,756,320	0	10,658,756,320	99.07	99,758,680
	TOTAL	110,960,490,000	119,831,945,000	118,638,047,024	423,239,310	118,214,807,714	99	1,617,137,286

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 074
SATUAN KERJA : 650236

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KOMNAS HAM

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 07/05/24 9:42 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_satker

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM							
5679	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	6,612,995,000	6,379,774,000	6,362,130,528	55,522,633	6,306,607,895	99.72	73,166,105
5680	Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	13,929,542,000	11,345,408,000	11,269,200,283	191,590,026	11,077,610,257	99.33	267,797,743
5681	Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	9,241,171,000	7,578,224,000	7,485,895,637	65,646,962	7,420,248,675	98.78	157,975,325
	JUMLAH BELANJA PROGRAM BG	29,783,708,000	25,303,406,000	25,117,226,448	312,759,621	24,804,466,827	99.26	498,939,173
WA	Program Dukungan Manajemen							
3335	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengawasan Internal	2,287,271,000	2,060,364,000	2,058,547,067	6,591,540	2,051,955,527	99.91	8,408,473
3336	Penyelenggaraan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan	61,428,555,000	62,614,292,000	61,875,944,422	68,593,953	61,807,350,469	98.82	806,941,531
6387	Dukungan Internal Komnas Perempuan	14,974,057,000	16,292,449,000	16,179,301,310	2,384,400	16,176,916,910	99.31	115,532,090
6594	Penyelenggaraan Layanan Hukum, Humas, dan Kerjasama	2,486,899,000	2,802,919,000	2,748,271,457	32,909,796	2,715,361,661	98.05	87,557,339
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	81,176,782,000	83,770,024,000	82,862,064,256	110,479,689	82,751,584,567	98.92	1,018,439,433
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	110,960,490,000	109,073,430,000	107,979,290,704	423,239,310	107,556,051,394	99	1,517,378,606
11	HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI							
BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM							
5681	Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	0	9,300,329,000	9,227,491,473	0	9,227,491,473	99.22	72,837,527
	JUMLAH BELANJA PROGRAM BG	0	9,300,329,000	9,227,491,473	0	9,227,491,473	99.22	72,837,527
WA	Program Dukungan Manajemen							
6387	Dukungan Internal Komnas Perempuan	0	1,458,186,000	1,431,264,847	0	1,431,264,847	98.15	26,921,153
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	0	1,458,186,000	1,431,264,847	0	1,431,264,847	98.15	26,921,153

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 074
SATUAN KERJA : 650236

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KOMNAS HAM

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 07/05/24 9:42 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_satker

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI	0	10,758,515,000	10,658,756,320	0	10,658,756,320	99.07	99,758,680
	JUMLAH	110,960,490,000	119,831,945,000	118,638,047,024	423,239,310	118,214,807,714	99	1,617,137,286

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 074 **KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**
ESELON I : 01 **KOMNAS HAM**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 650236 **KOMNAS HAM**
JENIS SATUAN KERJA : KP

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 07/05/24 9:42 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 7/5/24 7:41 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	12,460,000,000	11,885,000,000	11,836,840,800	3,686,181	11,833,154,619	99.59	51,845,381
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	504,000	504,000	189,135	615	188,520	37.53	315,480
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	700,000,000	724,000,000	720,556,212	0	720,556,212	99.52	3,443,788
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	220,500,000	200,083,000	194,342,696	0	194,342,696	97.13	5,740,304
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	588,000,000	423,000,000	397,400,000	0	397,400,000	93.95	25,600,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	416,000,000	796,074,000	760,289,000	3,460,037	756,828,963	95.5	39,245,037
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	21,000,000	47,000,000	42,522,438	0	42,522,438	90.47	4,477,562
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	617,306,000	678,144,000	646,783,020	72,420	646,710,600	95.38	31,433,400
511129	Belanja Uang Makan PNS	2,888,952,000	1,875,168,000	1,759,641,000	0	1,759,641,000	93.84	115,527,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	40,500,000	54,480,000	54,480,000	0	54,480,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	474,500,000	469,500,000	469,130,000	0	469,130,000	99.92	370,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	18,427,262,000	17,152,953,000	16,882,174,301	7,219,253	16,874,955,048	98.42	277,997,952
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	115,000,000	107,937,500	0	107,937,500	93.86	7,062,500
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	15,000	1,174	0	1,174	7.83	13,826
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	7,150,000	2,966,500	0	2,966,500	41.49	4,183,500
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	2,500,000	1,305,260	0	1,305,260	52.21	1,194,740
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	21,500,000	16,992,000	0	16,992,000	79.03	4,508,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	22,800,000	5,069,400	0	5,069,400	22.23	17,730,600
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	52,250,000	22,185,000	0	22,185,000	42.46	30,065,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	221,215,000	156,456,834	0	156,456,834	70.73	64,758,166
5121	Belanja Honorarium							
512111	Belanja Uang Honor Tetap	10,243,304,000	11,580,619,000	11,565,361,350	0	11,565,361,350	99.87	15,257,650
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5121	10,243,304,000	11,580,619,000	11,565,361,350	0	11,565,361,350	99.87	15,257,650
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	90,432,000	724,080,000	544,163,000	0	544,163,000	75.15	179,917,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	40,555,000	10,008,000	0	10,008,000	24.68	30,547,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	90,432,000	764,635,000	554,171,000	0	554,171,000	72.48	210,464,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	13,209,420,000	11,501,000,000	11,402,837,468	0	11,402,837,468	99.15	98,162,532
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	110,000,000	106,059,759	0	106,059,759	96.42	3,940,241
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	13,209,420,000	11,611,000,000	11,508,897,227	0	11,508,897,227	99.12	102,102,773

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 074 **KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**
ESELON I : 01 **KOMNAS HAM**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 650236 **KOMNAS HAM**
JENIS SATUAN KERJA : KP

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 07/05/24 9:42 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 7/5/24 7:41 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	41,970,418,000	41,330,422,000	40,667,060,712	7,219,253	40,659,841,459	98.39	670,580,541
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	12,732,284,000	13,872,330,000	13,815,773,115	0	13,815,773,115	99.59	56,556,885
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	252,750,000	14,002,000	13,996,400	0	13,996,400	99.96	5,600
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	327,182,000	369,299,000	352,567,184	0	352,567,184	95.47	16,731,816
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	565,680,000	624,060,000	624,060,000	0	624,060,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	32,850,000	41,700,000	38,741,795	0	38,741,795	92.91	2,958,205
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	98,800,000	63,626,000	63,574,170	0	63,574,170	99.92	51,830
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	14,009,546,000	14,985,017,000	14,908,712,664	0	14,908,712,664	99.49	76,304,336
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	2,463,962,000	2,773,330,000	2,727,231,058	0	2,727,231,058	98.34	46,098,942
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	181,950,000	2,002,277,000	2,002,248,200	0	2,002,248,200	100	28,800
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	865,262,000	507,955,000	505,164,340	0	505,164,340	99.45	2,790,660
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	117,300,000	14,700,000	14,700,000	0	14,700,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	3,628,474,000	5,298,262,000	5,249,343,598	0	5,249,343,598	99.08	48,918,402
5217	Belanja Kontribusi dan Kompensasi							
521711	Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust	140,000,000	129,904,000	129,791,150	0	129,791,150	99.91	112,850
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5217	140,000,000	129,904,000	129,791,150	0	129,791,150	99.91	112,850
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	850,416,000	1,012,284,000	1,011,172,899	0	1,011,172,899	99.89	1,111,101
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	314,604,000	104,578,000	104,471,000	0	104,471,000	99.9	107,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,165,020,000	1,116,862,000	1,115,643,899	0	1,115,643,899	99.89	1,218,101
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	1,396,836,000	1,591,467,000	1,582,983,704	0	1,582,983,704	99.47	8,483,296
522112	Belanja Langganan Telepon	183,012,000	168,723,000	165,093,083	0	165,093,083	97.85	3,629,917
522113	Belanja Langganan Air	84,120,000	65,868,000	65,551,675	0	65,551,675	99.52	316,325
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	890,100,000	829,704,000	829,624,000	0	829,624,000	99.99	80,000
522131	Belanja Jasa Konsultan	220,000,000	640,153,000	640,018,068	0	640,018,068	99.98	134,932
522141	Belanja Sewa	4,765,718,000	4,912,626,000	4,883,002,391	0	4,883,002,391	99.4	29,623,609
522151	Belanja Jasa Profesi	2,400,622,000	2,187,547,000	2,118,352,497	3,492,000	2,114,860,497	96.84	72,686,503
522191	Belanja Jasa Lainnya	4,956,543,000	6,293,918,000	6,238,190,507	0	6,238,190,507	99.11	55,727,493
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	196,837,000	55,637,000	54,892,101	0	54,892,101	98.66	744,899
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	15,093,788,000	16,745,643,000	16,577,708,026	3,492,000	16,574,216,026	99	171,426,974

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 074 **KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**
ESELON I : 01 **KOMNAS HAM**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 650236 **KOMNAS HAM**
JENIS SATUAN KERJA : KP

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 07/05/24 9:42 AM
 Halaman : 3
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 7/5/24 7:41 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	457,595,000	1,018,805,000	1,018,421,457	0	1,018,421,457	99.96	383,543
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	26,794,000	26,794,000	26,793,345	0	26,793,345	100	655
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,694,156,000	2,161,475,000	2,139,558,671	0	2,139,558,671	98.99	21,916,329
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	2,178,545,000	3,207,074,000	3,184,773,473	0	3,184,773,473	99.3	22,300,527
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,425,661,000	11,619,327,000	11,579,239,505	307,531,459	11,271,708,046	99.65	347,618,954
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	253,940,000	330,611,000	324,316,600	0	324,316,600	98.1	6,294,400
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,249,559,000	7,828,151,000	7,769,764,705	18,346,651	7,751,418,054	99.25	76,732,946
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9,582,253,000	11,009,757,000	10,917,518,984	72,871,835	10,844,647,149	99.16	165,109,851
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	27,511,413,000	30,787,846,000	30,590,839,794	398,749,945	30,192,089,849	99.36	595,756,151
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1,225,496,000	2,024,708,000	2,013,744,274	13,778,112	1,999,966,162	99.46	24,741,838
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	1,225,496,000	2,024,708,000	2,013,744,274	13,778,112	1,999,966,162	99.46	24,741,838
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	64,952,282,000	74,295,316,000	73,770,556,878	416,020,057	73,354,536,821	99.29	940,779,179
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,235,340,000	2,091,692,000	2,086,042,416	0	2,086,042,416	99.73	5,649,584
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	1,235,340,000	2,091,692,000	2,086,042,416	0	2,086,042,416	99.73	5,649,584
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	1,948,600,000	1,461,275,000	1,461,244,818	0	1,461,244,818	100	30,182
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	853,850,000	653,240,000	653,142,200	0	653,142,200	99.99	97,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	2,802,450,000	2,114,515,000	2,114,387,018	0	2,114,387,018	99.99	127,982
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	4,037,790,000	4,206,207,000	4,200,429,434	0	4,200,429,434	99.86	5,777,566
	JUMLAH BELANJA	110,960,490,000	119,831,945,000	118,638,047,024	423,239,310	118,214,807,714	99	1,617,137,286

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
UAKPB : 650236 KOMNAS HAM

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 07/05/24 9:42 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		0	0	1,493	78,324,273,000	0	0	1,493	78,324,273,000
20101	TANAH PERSIL	-	0	0	1,493	78,324,273,000	0	0	1,493	78,324,273,000
132111	Peralatan dan Mesin		4,115	28,606,325,064	1,135	5,034,381,624	1,206	5,266,522,629	4,044	28,374,184,059
30103	ALAT BANTU	-	4	463,914,999	6	278,314,647	3	6,932,000	7	735,297,646
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	42	5,531,556,158	10	136,067,000	0	0	52	5,667,623,158
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	9	11,704,500	2	1,011,000	2	1,011,000	9	11,704,500
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	1	434,573	0	0	0	0	1	434,573
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	2	1,419,290	2	1,200,000	2	1,200,000	2	1,419,290
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	0	0	3	15,000,000	3	15,000,000	0	0
30501	ALAT KANTOR	-	692	2,553,712,738	152	672,829,167	184	732,190,901	660	2,494,351,004
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1,835	6,469,618,205	690	2,024,078,003	548	1,157,490,242	1,977	7,336,205,966
30601	ALAT STUDIO	-	126	910,775,199	54	267,330,428	56	245,939,829	124	932,165,798
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	107	387,908,887	6	11,000,000	16	29,627,239	97	369,281,648
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	3	212,297,900	0	0	1	11,800,000	2	200,497,900
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	5	8,120,720	11	33,098,000	12	29,021,750	4	12,196,970
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	-	1	3,960,000	0	0	0	0	1	3,960,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	13	345,411,700	11	41,227,000	6	22,851,000	18	363,787,700
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	-	2	5,500,000	0	0	0	0	2	5,500,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	-	5	9,625,000	0	0	0	0	5	9,625,000
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	-	0	0	2	1,890,000	0	0	2	1,890,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	5	70,000,000	7	79,475,000	7	79,475,000	5	70,000,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	793	8,776,372,781	76	1,081,289,700	193	2,317,791,848	676	7,539,870,633
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	468	2,819,324,914	92	340,103,579	164	570,587,520	396	2,588,840,973
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	-	0	0	7	5,759,600	6	4,936,800	1	822,800
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	-	0	0	2	29,530,000	2	29,530,000	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	1	3,460,000	1	11,137,500	1	11,137,500	1	3,460,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	1	21,207,500	1	4,041,000	0	0	2	25,248,500
133111	Gedung dan Bangunan		23	13,663,103,000	3	3,835,823,160	18	10,911,874,000	8	6,587,052,160
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	23	13,663,103,000	2	3,820,307,160	18	10,911,874,000	7	6,571,536,160
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	0	0	1	15,516,000	0	0	1	15,516,000
134113	Jaringan		0	0	3	61,588,500	3	61,588,500	0	0
50307	INSTALASI PERTAHANAN	-	0	0	1	46,147,000	1	46,147,000	0	0
50402	JARINGAN LISTRIK	-	0	0	2	15,441,500	2	15,441,500	0	0
135111	Aset Tetap Renovasi		0	0	6	1,463,346,425	0	15,597,568	6	1,447,748,857
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	-	0	0	6	1,463,346,425	0	15,597,568	6	1,447,748,857
135121	Aset Tetap Lainnya		9,867	1,495,517,998	570	674,534,400	528	658,034,400	9,909	1,512,017,998

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
UAKPB : 650236 KOMNAS HAM

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 07/05/24 9:42 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	9,593	1,451,458,198	565	672,034,400	526	657,034,400	9,632	1,466,458,198
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	-	265	42,359,800	0	0	0	0	265	42,359,800
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	-	0	0	5	2,500,000	2	1,000,000	3	1,500,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	-	9	1,700,000	0	0	0	0	9	1,700,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		114	788,930,705	1,737	6,071,584,834	1,831	6,557,369,056	20	303,146,483
30103	ALAT BANTU	-	1	371,588	3	6,932,000	4	7,303,588	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	1	31,340,000	0	0	0	0	1	31,340,000
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	0	0	2	1,011,000	2	1,011,000	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	0	0	2	1,200,000	2	1,200,000	0	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	0	0	3	15,000,000	3	15,000,000	0	0
30501	ALAT KANTOR	-	25	334,134,645	187	735,309,151	211	883,443,796	1	186,000,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	46	110,372,291	529	998,168,492	572	1,099,421,283	3	9,119,500
30601	ALAT STUDIO	-	2	8,760,000	55	250,808,517	57	259,568,517	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	1	3,553,000	16	29,627,239	17	33,180,239	0	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	0	0	3	26,363,560	3	26,363,560	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	0	0	12	29,021,750	12	29,021,750	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	0	0	6	22,851,000	6	22,851,000	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	0	0	1	42,575,000	1	42,575,000	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	25	273,168,700	212	2,485,809,348	231	2,699,560,565	6	59,417,483
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	10	26,930,481	166	661,680,577	170	671,641,558	6	16,969,500
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	-	0	0	6	4,936,800	6	4,936,800	0	0
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	-	0	0	2	29,530,000	2	29,530,000	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	0	0	1	11,137,500	1	11,137,500	0	0
50307	INSTALASI PERTAHANAN	-	0	0	1	46,147,000	1	46,147,000	0	0
50402	JARINGAN LISTRIK	-	0	0	2	15,441,500	2	15,441,500	0	0
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	0	0	526	657,034,400	526	657,034,400	0	0
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	-	0	0	2	1,000,000	2	1,000,000	0	0
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	-	3	300,000	0	0	0	0	3	300,000
TOTAL				44,553,876,767		95,465,531,943		23,470,986,153		116,548,422,557

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 074
UAKPB : 650236

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KOMNAS HAM**

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM
Tanggal : 07/05/24 9:43 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162151	Software		23	1,805,914,700	2	821,462,700	0	0	25	2,627,377,400
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	23	1,805,914,700	2	821,462,700	0	0	25	2,627,377,400
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional		96	2,551,007,192	0	0	94	1,124,720,503	2	1,426,286,689
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	96	2,551,007,192	0	0	94	1,124,720,503	2	1,426,286,689
TOTAL				4,356,921,892		821,462,700		1,124,720,503		4,053,664,089

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
UAKPB : 650236 KOMNAS HAM

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 07/05/24 9:43 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
131111	Tanah		1,493	78,324,273,000	0	0	0	0	78,324,273,000
20101	TANAH PERSIL	-	1,493	78,324,273,000	0	0	0	0	78,324,273,000
132111	Peralatan dan Mesin		4,044	28,374,184,059	(23,373,701,741)	13,590,288	0	(23,360,111,453)	5,014,072,606
30103	ALAT BANTU	-	7	735,297,646	(167,963,074)	(280,907,576)	0	(448,870,650)	286,426,996
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	52	5,667,623,158	(5,279,167,698)	(206,983,099)	0	(5,486,150,797)	181,472,361
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	9	11,704,500	(3,891,376)	(5,208,750)	0	(9,100,126)	2,604,374
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	1	434,573	(434,573)	0	0	(434,573)	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	2	1,419,290	(1,419,290)	0	0	(1,419,290)	0
30501	ALAT KANTOR	-	660	2,494,351,004	(2,275,085,503)	55,421,350	0	(2,219,664,153)	274,686,851
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1,977	7,336,205,966	(5,255,573,323)	(364,579,818)	0	(5,620,153,141)	1,716,052,825
30601	ALAT STUDIO	-	124	932,165,798	(568,149,005)	(45,842,509)	0	(613,991,514)	318,174,284
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	97	369,281,648	(301,857,387)	(5,026,061)	0	(306,883,448)	62,398,200
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	2	200,497,900	(212,297,900)	11,800,000	0	(200,497,900)	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	4	12,196,970	(7,602,629)	(4,421,644)	0	(12,024,273)	172,697
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	-	1	3,960,000	(2,772,000)	(792,000)	0	(3,564,000)	396,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	18	363,787,700	(274,488,312)	(29,095,900)	0	(303,584,212)	60,203,488
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	-	2	5,500,000	(4,216,666)	(366,668)	0	(4,583,334)	916,666
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	-	5	9,625,000	(1,604,165)	(641,666)	0	(2,245,831)	7,379,169
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	-	2	1,890,000	0	(1,890,000)	0	(1,890,000)	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	5	70,000,000	(26,250,000)	(17,500,000)	0	(43,750,000)	26,250,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	676	7,539,870,633	(6,713,582,297)	734,370,329	0	(5,979,211,968)	1,560,658,665
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	396	2,588,840,973	(2,256,213,626)	180,285,183	0	(2,075,928,443)	512,912,530
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	-	1	822,800	0	(822,800)	0	(822,800)	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	1	3,460,000	(3,460,000)	0	0	(3,460,000)	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	2	25,248,500	(17,672,917)	(4,208,083)	0	(21,881,000)	3,367,500
133111	Gedung dan Bangunan		8	6,587,052,160	(2,869,251,630)	703,366,467	0	(2,165,885,163)	4,421,166,997
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	7	6,571,536,160	(2,869,251,630)	705,767,749	0	(2,163,483,881)	4,408,052,279
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	1	15,516,000	0	(2,401,282)	0	(2,401,282)	13,114,718
135111	Aset Tetap Renovasi		6	1,447,748,857	0	0	0	0	1,447,748,857
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	-	6	1,447,748,857	0	0	0	0	1,447,748,857
135121	Aset Tetap Lainnya		9,909	1,512,017,998	0	0	0	0	1,512,017,998
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	9,632	1,466,458,198	0	0	0	0	1,466,458,198
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	-	265	42,359,800	0	0	0	0	42,359,800
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	-	3	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	-	9	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		20	303,146,483	(781,914,991)	481,307,079	0	(300,607,912)	2,538,571
30103	ALAT BANTU	-	0	0	(371,588)	371,588	0	0	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
UAKPB : 650236 KOMNAS HAM

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 07/05/24 9:43 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	1	31,340,000	(24,624,286)	(4,477,143)	0	(29,101,429)	2,238,571
30501	ALAT KANTOR	-	1	186,000,000	(334,134,645)	148,134,645	0	(186,000,000)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	3	9,119,500	(110,372,291)	101,252,791	0	(9,119,500)	0
30601	ALAT STUDIO	-	0	0	(8,760,000)	8,760,000	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	0	0	(3,553,000)	3,553,000	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	6	59,417,483	(273,168,700)	213,751,217	0	(59,417,483)	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	6	16,969,500	(26,930,481)	9,960,981	0	(16,969,500)	0
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	-	3	300,000	0	0	0	0	300,000
JUMLAH			15,480	116,548,422,557	(27,024,868,362)	1,198,263,834	0	(25,826,604,528)	90,721,818,029

**LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPA : 074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
UAKPB : 650236 KOMNAS HAM

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM
Tanggal : 07/05/24 9:43 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	BEBAN AMORTISASI	AKUMULASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=5-9
162151	Software		25	2,627,377,400	(1,120,773,930)	(639,427,097)	0	(1,760,201,027)	867,176,373
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	25	2,627,377,400	(1,120,773,930)	(639,427,097)	0	(1,760,201,027)	867,176,373
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan		2	1,426,286,689	(2,551,007,192)	1,124,720,503	0	(1,426,286,689)	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	2	1,426,286,689	(2,551,007,192)	1,124,720,503	0	(1,426,286,689)	0
JUMLAH			27	4,053,664,089	(3,671,781,122)	485,293,406	0	(3,186,487,716)	867,176,373

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
UAKPB : 650236 KOMNAS HAM

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM
Tanggal : 07/05/24 9:45 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	5,565,312
1010301003	Penjepit Kertas	2,889,000
1010301004	Penghapus/Korektor	1,148,450
1010301005	Buku Tulis	1,533,500
1010301006	Ordner Dan Map	8,105,200
1010301007	Penggaris	297,000
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	636,000
1010301010	Alat Perekat	2,651,212
1010301012	Staples	675,000
1010301014	Barang Cetak	41,524,000
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	1,704,804
1010302001	Kertas HVS	5,858,000
1010302002	Berbagai Kertas	430,200
1010302004	Amplop	7,463,700
1010302005	Kop Surat	11,980,020
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	973,280
1010304004	Tinta/Toner Printer	56,750,250
1010304006	USB/Flash Disk	1,057,500
1010304010	Mouse	1,527,625
1010306010	Batu Baterai	1,097,500
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8,857,800
Jumlah Barang Konsumsi		162,725,353
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	672,000
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		672,000
TOTAL		163,397,353

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MEMO PENYESUAIAN
NO. 08/MP-JP/XII/23

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Eselon I : Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Wilayah : -
Satuan kerja : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
No Dokumen :
Tanggal : 31-Dec-23
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Beban yang Masih Harus Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Di Muka	<input type="checkbox"/>	Koreksi Beban Aset
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/>	Beban Dibayar Di Muka	<input type="checkbox"/>	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input checked="" type="checkbox"/>	Beban Yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/>	Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/>	Transfer Masuk
<input type="checkbox"/>	Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/>	Transfer Keluar
<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/>	Koreksi
<input type="checkbox"/>	Persediaan	<input type="checkbox"/>	Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	DEBIT	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	230.700	-
2	KREDIT	522113	Beban Langganan Air	-	230.700

Jurnal Pembalik atas Belanja Langganan Air bulan Desember 2022 yang dibayarkan TA 2023

Dibuat oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Teresia Arta Pangestu
NIP 199806182022032012

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bagian Keuangan

Amalia Kurniasih
NIP 197502023005022001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam Oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Andi Prawira
NIP 199003302022031003

Tanggal : 31 Desember 2023



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MEMO PENYESUAIAN
NO. 17/MP-JP/XII/23

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Eselon I : Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Wilayah : -
Satuan kerja : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
No Dokumen :
Tanggal : 31-Dec-23
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Beban yang Masih Harus Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Di Muka	<input type="checkbox"/>	Koreksi Beban Aset
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/>	Beban Dibayar Di Muka	<input type="checkbox"/>	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input checked="" type="checkbox"/>	Beban Yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/>	Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/>	Transfer Masuk
<input type="checkbox"/>	Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/>	Transfer Keluar
<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/>	Koreksi
<input type="checkbox"/>	Persediaan	<input type="checkbox"/>	Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	DEBIT	522111	Beban Langganan Listrik	100.316.506	-
2	KREDIT	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	100.316.506

Jurnal Penyesuaian beban listrik bulan Desember TA 2023 yang belum dibayar pada TA 2023 terdiri dari Listrik Kantor Komnas HAM Menteng Rp50.791.372; Kantor Komnas HAM Hayam Wuruk Rp3.119.364; Kantor Komnas HAM Cisadane Rp18.243.238; Kantor Komnas Perempuan Rp17.155.222; Kantor NAD Rp2.293.966; Kantor Sumatera Barat Rp2.095.121; Kantor Kalimantan Barat Rp2.567.591; Kantor Sulawesi Tengah Rp2.310.712; Kantor Papua Rp1.739.920.

Dibuat oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Teresa Arta Pangestu
NIP 199806182022032012

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bagian Keuangan

Amalia Kurniasih
NIP 197502023005022001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam Oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Andi Prawira
NIP 199003302022031003

Tanggal : 31 Desember 2023



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MEMO PENYESUAIAN
NO. 18/MP-JP/XII/23

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Eselon I : Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Wilayah : -
Satuan kerja : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
No Dokumen :
Tanggal : 31-Dec-23
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Beban yang Masih Harus Dibayar


Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Di Muka	<input type="checkbox"/>	Koreksi Beban Aset
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/>	Beban Dibayar Di Muka	<input type="checkbox"/>	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input checked="" type="checkbox"/>	Beban Yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/>	Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/>	Transfer Masuk
<input type="checkbox"/>	Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/>	Transfer Keluar
<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/>	Koreksi
<input type="checkbox"/>	Persediaan	<input type="checkbox"/>	Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	DEBIT	522112	Beban Langganan Telepon	8.946.969	-
2	KREDIT	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	8.946.969


Jurnal Penyesuaian beban telepon bulan Desember TA 2023 yang belum dibayar pada TA 2023 terdiri dari telepon Kantor Komnas HAM Hayam Wuruk, Menteng dan Cisadane Rp6.534.817; Kantor Komnas Perempuan Rp1.490.460; Kantor NAD Rp75.487; Kantor Sumatera Barat Rp38.686; Kantor Kalimantan Barat Rp224.500; Kantor Sulawesi Tengah Rp113.373; Kantor Maluku Rp67.546; Kantor Papua Rp402.100.

Dibuat oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan


Teresia Arta Pangestu
NIP 199806182022032012

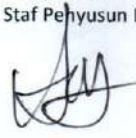
Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bagian Keuangan


Amalia Kurniasih
NIP 197502023005022001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam Oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan


Andi Prawira
NIP 199003302022031003

Tanggal : 31 Desember 2023



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MEMO PENYESUAIAN
NO. 19/MP-JP/XII/23

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Eselon I : Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Wilayah : -
Satuan kerja : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
No Dokumen :
Tanggal : 31-Dec-23
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Beban yang Masih Harus Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Di Muka	<input type="checkbox"/>	Koreksi Beban Aset
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/>	Beban Dibayar Di Muka	<input type="checkbox"/>	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input checked="" type="checkbox"/>	Beban Yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/>	Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/>	Transfer Masuk
<input type="checkbox"/>	Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/>	Transfer Keluar
<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/>	Koreksi
<input type="checkbox"/>	Persediaan	<input type="checkbox"/>	Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	DEBIT	521111	Beban Keperluan Perkantoran	7.157.250	-
2	KREDIT	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	7.157.250

Jurnal Penyesuaian Beban Internet bulan Desember TA 2023 yang belum dibayar pada TA 2023 terdiri atas Kantor NAD Rp1.035.300; Kantor Sumatera Barat Rp1.116.776; Kantor Kalimantan Barat Rp1.878.957; Kantor Sulawesi Tengah Rp1.162.450; Kantor Maluku Rp844.990; Kantor Papua Rp1.118.777.

Dibuat oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Teresia Arta Pangestu
NIP 199806182022032012

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bagian Keuangan

Amalia Kurniasih
NIP 197502023005022001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam Oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Andi Prawira
NIP 199003302022031003

Tanggal : 31 Desember 2023



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MEMO PENYESUAIAN
NO. 20/MP-JP/XII/23

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Eselon I : Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Wilayah : -
Satuan kerja : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
No Dokumen :
Tanggal : 31-Dec-23
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Beban yang Masih Harus Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Di Muka	<input type="checkbox"/>	Koreksi Beban Aset
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/>	Beban Dibayar Di Muka	<input type="checkbox"/>	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input checked="" type="checkbox"/>	Beban Yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/>	Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/>	Transfer Masuk
<input type="checkbox"/>	Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/>	Transfer Keluar
<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/>	Koreksi
<input type="checkbox"/>	Persediaan	<input type="checkbox"/>	Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	DEBIT	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.719.531	-
2	KREDIT	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	1.719.531

Jurnal Penyesuaian Beban pengiriman pos bulan Desember TA 2023 yang belum dibayar pada TA 2023 terdiri atas Kantor NAD Rp186.500; Kantor Sumatera Barat Rp67.231; Kantor Sulawesi Tengah Rp79.000; Kantor Maluku Rp864.000; Kantor Papua Rp522.800.

Dibuat oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Teresia Arta Pangestu
NIP 199806182022032012

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bagian Keuangan

Amalia Kurniasih
NIP 197502023005022001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam Oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Andi Prawira
NIP 199003302022031003

Tanggal : 31 Desember 2023



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MEMO PENYESUAIAN
NO. 21/MP-JP/XII/23

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Eselon I : Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Wilayah : -
Satuan kerja : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
No Dokumen :
Tanggal : 31-Dec-23
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Beban yang Masih Harus Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Di Muka	<input type="checkbox"/>	Koreksi Beban Aset
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/>	Beban Dibayar Di Muka	<input type="checkbox"/>	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input checked="" type="checkbox"/>	Beban Yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/>	Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/>	Transfer Masuk
<input type="checkbox"/>	Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/>	Transfer Keluar
<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/>	Koreksi
<input type="checkbox"/>	Persediaan	<input type="checkbox"/>	Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	DEBIT	522113	Beban Langganan Air	272.562	-
2	KREDIT	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	272.562

Jurnal Penyesuaian Beban Langganan Air bulan Desember TA 2023 yang belum dibayar pada TA 2023 terdiri atas Kantor Komnas HAM Cisadane Rp23.462; Kantor Sumatera Barat Rp192.600; Kantor Papua Rp56.500.

Dibuat oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Teresia Arta Pangestu
NIP 199806182022032012

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bagian Keuangan

Amalia Kurniasih
NIP 197502023005022001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam Oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Andi Prawira
NIP 199003302022031003

Tanggal : 31 Desember 2023



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MEMO PENYESUAIAN
NO. 23/MP-JP/XII/23

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Eselon I : Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Wilayah : -
Satuan kerja : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
No Dokumen :
Tanggal : 31-Dec-23
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Penyesuaian Lainnya

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Di Muka	<input type="checkbox"/>	Koreksi Beban Aset
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/>	Beban Dibayar Di Muka	<input type="checkbox"/>	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/>	Beban Yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/>	Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/>	Transfer Masuk
<input type="checkbox"/>	Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/>	Transfer Keluar
<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/>	Koreksi
<input type="checkbox"/>	Persediaan	<input checked="" type="checkbox"/>	Penyesuaian Lainnya

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	DEBIT	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	254.452.000	-
2	KREDIT	212191	Utang kepada Pihak Ketiga	-	254.452.000

Jurnal Penyesuaian Pengakuan Utang atas Progress Pekerjaan yang belum dilaksanakan pembayarannya melalui mekanisme RPATA 2023

Dibuat oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Teresia Arta Pangestu
NIP 199806182022032012

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bagian Keuangan

Amalia Kurniasih
NIP 197502023005022001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam Oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Andi Prawira
NIP 199003302022031003

Tanggal : 31 Desember 2023



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MEMO PENYESUAIAN
NO. 24/MP-JP/XII/23

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Eselon I : Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Wilayah : -
Satuan kerja : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
No Dokumen :
Tanggal : 31-Dec-23
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Beban Yang Masih Harus Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Di Muka | <input type="checkbox"/> Koreksi Beban Aset |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> Beban Dibayar Di Muka | <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input checked="" type="checkbox"/> v Beban Yang Masih Harus Dibayar | <input type="checkbox"/> Piutang Jangka Panjang |
| <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang | <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang Tidak Tertagih |
| <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang | <input type="checkbox"/> Transfer Masuk |
| <input type="checkbox"/> Penyusutan Aset | <input type="checkbox"/> Transfer Keluar |
| <input type="checkbox"/> Kas Di Bendahara Penerimaan | <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca |
| <input type="checkbox"/> Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> Koreksi |
| <input type="checkbox"/> Persediaan | <input type="checkbox"/> Hibah Langsung |

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	DEBIT	521111	Beban Keperluan Perkantoran	12.924.000	-
2	KREDIT	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	-	12.924.000

Jurnal Penyesuaian Beban Uang Lembur PPNPN bulan Desember TA 2023 yang belum dibayarkan di TA 2023

Dibuat oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Teresia Arta Pangestu
NIP 199806182022032012

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bagian Keuangan

Amalia Kurniasih
NIP 197502023005022001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam Oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Andi Prawira
NIP 199003302022031003

Tanggal : 31 Desember 2023



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MEMO PENYESUAIAN
NO. 25/MP-JP/XII/23

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Eselon I : Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Wilayah : -
Satuan kerja : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
No Dokumen :
Tanggal : 31-Dec-23
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Beban Yang Masih Harus Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Di Muka	<input type="checkbox"/>	Koreksi Beban Aset
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/>	Beban Dibayar Di Muka	<input type="checkbox"/>	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input checked="" type="checkbox"/>	Beban Yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/>	Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/>	Transfer Masuk
<input type="checkbox"/>	Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/>	Transfer Keluar
<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/>	Koreksi
<input type="checkbox"/>	Persediaan	<input type="checkbox"/>	Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	DEBIT	512212	Beban Uang Lembur PPPK	1.325.000	-
2	KREDIT	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	-	1.325.000

Jurnal Penyesuaian Beban Uang Lembur PPPK bulan Desember TA 2023 yang belum dibayarkan di TA 2023

Dibuat oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Teresia Arta Pangestu
NIP 199806182022032012

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bagian Keuangan

Amalia Kurniasih
NIP 197502023005022001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam Oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Andi Prawira
NIP 199003302022031003

Tanggal : 31 Desember 2023



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MEMO PENYESUAIAN
NO. 26/MP-JP/XII/23

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Eselon I : Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Wilayah : -
Satuan kerja : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
No Dokumen :
Tanggal : 31-Dec-23
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Beban Yang Masih Harus Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Di Muka | <input type="checkbox"/> Koreksi Beban Aset |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> Beban Dibayar Di Muka | <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input checked="" type="checkbox"/> v Beban Yang Masih Harus Dibayar | <input type="checkbox"/> Piutang Jangka Panjang |
| <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang | <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang Tidak Tertagih |
| <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang | <input type="checkbox"/> Transfer Masuk |
| <input type="checkbox"/> Penyusutan Aset | <input type="checkbox"/> Transfer Keluar |
| <input type="checkbox"/> Kas Di Bendahara Penerimaan | <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca |
| <input type="checkbox"/> Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> Koreksi |
| <input type="checkbox"/> Persediaan | <input type="checkbox"/> Hibah Langsung |

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	DEBIT	512211	Beban Uang Lembur	17.977.000	-
2	KREDIT	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	-	17.977.000

Jurnal Penyesuaian Beban Uang Lembur PNS bulan Desember TA 2023 yang belum dibayarkan di TA 2023

Dibuat oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Teresia Arta Pangestu
NIP 199806182022032012

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bagian Keuangan

Amalia Kurniasih
NIP 197502023005022001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam Oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Andi Prawira
NIP 199003302022031003

Tanggal : 31 Desember 2023



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MEMO PENYESUAIAN
NO. 28/MP-JP/XII/23

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Eselon I : Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Wilayah : -
Satuan kerja : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
No Dokumen :
Tanggal : 31-Dec-23
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Beban Yang Masih Harus Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Di Muka	<input type="checkbox"/>	Koreksi Beban Aset
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/>	Beban Dibayar Di Muka	<input type="checkbox"/>	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input checked="" type="checkbox"/>	Beban Yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/>	Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/>	Transfer Masuk
<input type="checkbox"/>	Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/>	Transfer Keluar
<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/>	Koreksi
<input type="checkbox"/>	Persediaan	<input type="checkbox"/>	Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	DEBIT	511628	Beban Uang Makan PPPK	1.464.000	-
2	KREDIT	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	-	1.464.000

Jurnal Penyesuaian Beban Uang Makan PPPK bulan Desember TA 2023 yang belum dibayarkan di TA 2023

Dibuat oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Teresia Arta Pangestu
NIP 199806182022032012

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bagian Keuangan

Amalia Kurniasih
NIP 197502023005022001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam Oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Andi Prawira
NIP 199003302022031003

Tanggal : 31 Desember 2023



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MEMO PENYESUAIAN
NO. 27/MP-JP/XII/23

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Eselon I : Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Wilayah : -
Satuan kerja : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
No Dokumen :
Tanggal : 31-Dec-23
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Beban Yang Masih Harus Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Pendapatan Diterima Di Muka | <input type="checkbox"/> | Koreksi Beban Aset |
| <input type="checkbox"/> | Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | <input type="checkbox"/> | Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> | Beban Dibayar Di Muka | <input type="checkbox"/> | Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Beban Yang Masih Harus Dibayar | <input type="checkbox"/> | Piutang Jangka Panjang |
| <input type="checkbox"/> | Penyisihan Piutang | <input type="checkbox"/> | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih |
| <input type="checkbox"/> | Penghapusan Piutang | <input type="checkbox"/> | Transfer Masuk |
| <input type="checkbox"/> | Penyusutan Aset | <input type="checkbox"/> | Transfer Keluar |
| <input type="checkbox"/> | Kas Di Bendahara Penerimaan | <input type="checkbox"/> | Reklasifikasi Neraca |
| <input type="checkbox"/> | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> | Koreksi |
| <input type="checkbox"/> | Persediaan | <input type="checkbox"/> | Hioah Langsung |

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	DEBIT	511129	Beban Uang Makan PNS	18.314.000	-
2	KREDIT	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	-	18.314.000

Jurnal Penyesuaian Beban Uang Makan PNS bulan Desember TA 2023 yang belum dibayarkan di TA 2023

Dibuat oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Teresia Arta Pangestu
NIP 199806182022032012

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bagian Keuangan

Amalia Kurniasih
NIP 197502023005022001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam Oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Andi Prawira
NIP 199003302022031003

Tanggal : 31 Desember 2023



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MEMO PENYESUAIAN
NO. 29/MP-JP/XII/23

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Eselon I : Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Wilayah : -
Satuan kerja : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
No Dokumen :
Tanggal : 31-Dec-23
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Beban Yang Masih Harus Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Pendapatan Diterima Di Muka | <input type="checkbox"/> | Koreksi Beban Aset |
| <input type="checkbox"/> | Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | <input type="checkbox"/> | Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> | Beban Dibayar Di Muka | <input type="checkbox"/> | Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Beban Yang Masih Harus Dibayar | <input type="checkbox"/> | Piutang Jangka Panjang |
| <input type="checkbox"/> | Penyisihan Piutang | <input type="checkbox"/> | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih |
| <input type="checkbox"/> | Penghapusan Piutang | <input type="checkbox"/> | Transfer Masuk |
| <input type="checkbox"/> | Penyusutan Aset | <input type="checkbox"/> | Transfer Keluar |
| <input type="checkbox"/> | Kas Di Bendahara Penerimaan | <input type="checkbox"/> | Reklasifikasi Neraca |
| <input type="checkbox"/> | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> | Koreksi |
| <input type="checkbox"/> | Persediaan | <input type="checkbox"/> | Hibah Langsung |

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	DEBIT	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1.208.300	-
2	KREDIT	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	-	1.208.300

Jurnal Penyesuaian Beban Gaji Pokok PNS bulan Desember TA 2023 yang belum dibayarkan di TA 2023

Dibuat oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Teresia Arta Pangestu
NIP 199806182022032012

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bagian Keuangan

Amalia Kurniasih
NIP 197502023005022001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam Oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Andi Prawira
NIP 199003302022031003

Tanggal : 31 Desember 2023



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MEMO PENYESUAIAN
NO. 30/MP-JP/XII/23

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Eselon I : Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Wilayah : -
Satuan kerja : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
No Dokumen :
Tanggal : 31-Dec-23
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Beban Yang Masih Harus Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Di Muka	<input type="checkbox"/>	Koreksi Beban Aset
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/>	Beban Dibayar Di Muka	<input type="checkbox"/>	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input checked="" type="checkbox"/>	Beban Yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/>	Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/>	Transfer Masuk
<input type="checkbox"/>	Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/>	Transfer Keluar
<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/>	Koreksi
<input type="checkbox"/>	Persediaan	<input type="checkbox"/>	Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	DEBIT	511121	Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	120.830	-
2	KREDIT	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	-	120.830

Jurnal Penyesuaian Beban Tunjangan Suami/Istri PNS bulan Desember TA 2023 yang belum dibayarkan di TA 2023

Dibuat oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Teresia Arta Pangestu
NIP 199806182022032012

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bagian Keuangan

Amalia Kurniasih
NIP 197502023005022001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam Oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Andi Prawira
NIP 199003302022031003

Tanggal : 31 Desember 2023



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MEMO PENYESUAIAN
NO. 31/MP-JP/XII/23

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Eselon I : Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Wilayah : -
Satuan kerja : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
No Dokumen :
Tanggal : 31-Dec-23
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Beban Yang Masih Harus Dibayar


Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Di Muka	<input type="checkbox"/>	Koreksi Beban Aset
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/>	Beban Dibayar Di Muka	<input type="checkbox"/>	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input checked="" type="checkbox"/>	Beban Yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/>	Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/>	Transfer Masuk
<input type="checkbox"/>	Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/>	Transfer Keluar
<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/>	Koreksi
<input type="checkbox"/>	Persediaan	<input type="checkbox"/>	Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	DEBIT	511122	Beban Tunjangan Anak PNS	34.224	-
2	KREDIT	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	-	34.224


Jurnal Penyesuaian Beban Tunjangan Anak PNS bulan Desember TA 2023 yang belum dibayarkan di TA 2023

Dibuat oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan


Teresia Arta Pangestu
NIP 199806182022032012

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bagian Keuangan


Amalia Kurniasih
NIP 197502023005022001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam Oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan


Andi Prawira
NIP 199003302022031003

Tanggal : 31 Desember 2023



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MEMO PENYESUAIAN
NO. 32/MP-JP/XII/23

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Eselon I : Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Wilayah : -
Satuan kerja : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
No Dokumen :
Tanggal : 31-Dec-23
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Beban Yang Masih Harus Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Di Muka | <input type="checkbox"/> Koreksi Beban Aset |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> Beban Dibayar Di Muka | <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input checked="" type="checkbox"/> Beban Yang Masih Harus Dibayar | <input type="checkbox"/> Piutang Jangka Panjang |
| <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang | <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang Tidak Tertagih |
| <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang | <input type="checkbox"/> Transfer Masuk |
| <input type="checkbox"/> Penyusutan Aset | <input type="checkbox"/> Transfer Keluar |
| <input type="checkbox"/> Kas Di Bendahara Penerimaan | <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca |
| <input type="checkbox"/> Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> Koreksi |
| <input type="checkbox"/> Persediaan | <input type="checkbox"/> Hibah Langsung |

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	DEBIT	511125	Beban Tunjangan PPh PNS	14.702	-
2	KREDIT	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	-	14.702

Jurnal Penyesuaian Beban Tunjangan PPh PNS bulan Desember TA 2023 yang belum dibayarkan di TA 2023

Dibuat oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Teresia Arta Pangestu
NIP 199806182022032012

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bagian Keuangan

Amalia Kurniasih
NIP 197502023005022001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam Oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Andi Prawira
NIP 199003302022031003

Tanggal : 31 Desember 2023



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MEMO PENYESUAIAN
NO. 33/MP-JP/XII/23

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Eselon I : Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Wilayah : -
Satuan kerja : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
No Dokumen :
Tanggal : 31-Dec-23
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Beban Yang Masih Harus Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Di Muka	<input type="checkbox"/>	Koreksi Beban Aset
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/>	Beban Dibayar Di Muka	<input type="checkbox"/>	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input checked="" type="checkbox"/>	Beban Yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/>	Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/>	Transfer Masuk
<input type="checkbox"/>	Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/>	Transfer Keluar
<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/>	Koreksi
<input type="checkbox"/>	Persediaan	<input type="checkbox"/>	Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	DEBIT	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	19	-
2	KREDIT	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	-	19

Jurnal Penyesuaian Beban Pembulatan Gaji PNS bulan Desember TA 2023 yang belum dibayarkan di TA 2023

Dibuat oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Teresia Arta Pangestu
NIP 199806182022032012

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bagian Keuangan

Amalia Kurniasih
NIP 197502023005022001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam Oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Andi Prawira
NIP 199003302022031003

Tanggal : 31 Desember 2023



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MEMO PENYESUAIAN
NO. 34/MP-JP/XII/23

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Eselon I : Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Wilayah : -
Satuan kerja : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
No Dokumen :
Tanggal : 31-Dec-23
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Beban Yang Masih Harus Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Di Muka | <input type="checkbox"/> Koreksi Beban Aset |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> Beban Dibayar Di Muka | <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input checked="" type="checkbox"/> Beban Yang Masih Harus Dibayar | <input type="checkbox"/> Piutang Jangka Panjang |
| <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang | <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang Tidak Tertagih |
| <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang | <input type="checkbox"/> Transfer Masuk |
| <input type="checkbox"/> Penyusutan Aset | <input type="checkbox"/> Transfer Keluar |
| <input type="checkbox"/> Kas Di Bendahara Penerimaan | <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca |
| <input type="checkbox"/> Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> Koreksi |
| <input type="checkbox"/> Persediaan | <input type="checkbox"/> Hibah Langsung |

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	DEBIT	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	2.956.287	-
2	KREDIT	521211	Beban Bahan	-	2.956.287

Jurnal Pembalik atas Utang Belanja Bahan Dana Hibah UN WOMEN TA 2022

Dibuat oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Teresia Arta Pangestu
NIP 199806182022032012

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bagian Keuangan

Amalia Kurniasih
NIP 197502023005022001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam Oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Andi Prawira
NIP 199003302022031003

Tanggal : 31 Desember 2023



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MEMO PENYESUAIAN
NO. 35/MP-JP/XII/23

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Eselon I : Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Wilayah : -
Satuan kerja : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
No Dokumen :
Tanggal : 31-Dec-23
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Beban Yang Masih Harus Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Pendapatan Diterima Di Muka | <input type="checkbox"/> | Koreksi Beban Aset |
| <input type="checkbox"/> | Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | <input type="checkbox"/> | Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> | Beban Dibayar Di Muka | <input type="checkbox"/> | Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Beban Yang Masih Harus Dibayar | <input type="checkbox"/> | Piutang Jangka Panjang |
| <input type="checkbox"/> | Penyisihan Piutang | <input type="checkbox"/> | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih |
| <input type="checkbox"/> | Penghapusan Piutang | <input type="checkbox"/> | Transfer Masuk |
| <input type="checkbox"/> | Penyusutan Aset | <input type="checkbox"/> | Transfer Keluar |
| <input type="checkbox"/> | Kas Di Bendahara Penerimaan | <input type="checkbox"/> | Reklasifikasi Neraca |
| <input type="checkbox"/> | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> | Koreksi |
| <input type="checkbox"/> | Persediaan | <input type="checkbox"/> | Hibah Langsung |

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	DEBIT	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	6.000.000	
2	KREDIT	522141	Beban Sewa		6.000.000

Jurnal Pembalik atas Utang Belanja Sewa Dana Hibah UN WOMEN TA 2022

Dibuat oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Teresia Arta Pangestu
NIP 199806182022032012

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bagian Keuangan

Amalia Kurniasih
NIP 197502023005022001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam Oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Andi Prawira
NIP 199003302022031003

Tanggal : 31 Desember 2023



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MEMO PENYESUAIAN
NO. 36/MP-JP/XII/23

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Eselon I : Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Wilayah : -
Satuan kerja : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
No Dokumen :
Tanggal : 31-Dec-23
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Beban Yang Masih Harus Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Di Muka	<input type="checkbox"/>	Koreksi Beban Aset
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/>	Beban Dibayar Di Muka	<input type="checkbox"/>	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input checked="" type="checkbox"/>	Beban Yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/>	Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/>	Transfer Masuk
<input type="checkbox"/>	Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/>	Transfer Keluar
<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/>	Koreksi
<input type="checkbox"/>	Persediaan	<input type="checkbox"/>	Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	DEBIT	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	13.500.000	-
2	KREDIT	522151	Beban Jasa Profesi	-	13.500.000

Jurnal Pembalik atas Utang Belanja Jasa Profesi Dana Hibah UN WOMEN TA 2022

Dibuat oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Teresia Arta Pangestu
NIP 199806182022032012

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bagian Keuangan

Amalia Kurniasih
NIP 197502023005022001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam Oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Andi Prawira
NIP 199003302022031003

Tanggal : 31 Desember 2023



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MEMO PENYESUAIAN
NO. 37/MP-JP/XII/23

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Eselon I : Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Wilayah : -
Satuan kerja : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
No Dokumen :
Tanggal : 31-Dec-23
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Beban Yang Masih Harus Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Di Muka	<input type="checkbox"/>	Koreksi Beban Aset
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/>	Beban Dibayar Di Muka	<input type="checkbox"/>	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input checked="" type="checkbox"/>	Beban Yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/>	Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/>	Transfer Masuk
<input type="checkbox"/>	Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/>	Transfer Keluar
<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/>	Koreksi
<input type="checkbox"/>	Persediaan	<input type="checkbox"/>	Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	DEBIT	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	360.625.000	-
2	KREDIT	522191	Beban Jasa Lainnya	-	360.625.000

Jurnal Pembalik atas Utang Belanja Jasa Lainnya Dana Hibah UN WOMEN TA 2022

Dibuat oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Teresia Arta Pangestu
NIP 199806182022032012

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bagian Keuangan

Amalia Kurniasih
NIP 197502023005022001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam Oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Andi Prawira
NIP 199003302022031003

Tanggal : 31 Desember 2023



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MEMO PENYESUAIAN
NO. 38/MP-JP/XII/23

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Eselon I : Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Wilayah : -
Satuan kerja : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
No Dokumen :
Tanggal : 31-Dec-23
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Beban Yang Masih Harus Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Di Muka	<input type="checkbox"/>	Koreksi Beban Aset
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/>	Beban Dibayar Di Muka	<input type="checkbox"/>	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input checked="" type="checkbox"/>	Beban Yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/>	Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/>	Transfer Masuk
<input type="checkbox"/>	Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/>	Transfer Keluar
<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/>	Koreksi
<input type="checkbox"/>	Persediaan	<input type="checkbox"/>	Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	DEBIT	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	225.743.602	-
2	KREDIT	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	225.743.602

Jurnal Pembalik atas Utang Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Dana Hibah UN WOMEN TA 2022

Dibuat oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Teresia Arta Pangestu
NIP 199806182022032012

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bagian Keuangan

Amalia Kurniasih
NIP 197502023005022001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam Oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Andi Prawira
NIP 199003302022031003

Tanggal : 31 Desember 2023



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MEMO PENYESUAIAN
NO. 39/MP-JP/XII/23

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Eselon I : Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Wilayah : -
Satuan kerja : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
No Dokumen :
Tanggal : 31-Dec-23
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Beban Yang Masih Harus Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Pendapatan Diterima Di Muka | <input type="checkbox"/> | Koreksi Beban Aset |
| <input type="checkbox"/> | Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | <input type="checkbox"/> | Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> | Beban Dibayar Di Muka | <input type="checkbox"/> | Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Beban Yang Masih Harus Dibayar | <input type="checkbox"/> | Piutang Jangka Panjang |
| <input type="checkbox"/> | Penyisihan Piutang | <input type="checkbox"/> | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih |
| <input type="checkbox"/> | Penghapusan Piutang | <input type="checkbox"/> | Transfer Masuk |
| <input type="checkbox"/> | Penyusutan Aset | <input type="checkbox"/> | Transfer Keluar |
| <input type="checkbox"/> | Kas Di Bendahara Penerimaan | <input type="checkbox"/> | Reklasifikasi Neraca |
| <input type="checkbox"/> | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> | Koreksi |
| <input type="checkbox"/> | Persediaan | <input type="checkbox"/> | Hibah Langsung |

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	DEBIT	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	3.233.503	-
2	KREDIT	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	3.233.503

Jurnal Pembalik atas Utang Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Dana Hibah UN WOMEN TA 2022

Dibuat oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Teresia Arta Pangestu
NIP 199806182022032012

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bagian Keuangan

Amalia Kurniasih
NIP 197502023005022001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam Oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Andi Prawira
NIP 199003302022031003

Tanggal : 31 Desember 2023



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MEMO PENYESUAIAN
NO. 40/MP-JP/XII/23

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Eselon I : Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Wilayah : -
Satuan kerja : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
No Dokumen :
Tanggal : 31-Dec-23
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Beban Dibayar Di Muka

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Pendapatan Diterima Di Muka | <input type="checkbox"/> | Koreksi Beban Aset |
| <input type="checkbox"/> | Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | <input type="checkbox"/> | Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Beban Dibayar Di Muka | <input type="checkbox"/> | Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> | Beban Yang Masih Harus Dibayar | <input type="checkbox"/> | Piutang Jangka Panjang |
| <input type="checkbox"/> | Penyisihan Piutang | <input type="checkbox"/> | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih |
| <input type="checkbox"/> | Penghapusan Piutang | <input type="checkbox"/> | Transfer Masuk |
| <input type="checkbox"/> | Penyusutan Aset | <input type="checkbox"/> | Transfer Keluar |
| <input type="checkbox"/> | Kas Di Bendahara Penerimaan | <input type="checkbox"/> | Reklasifikasi Neraca |
| <input type="checkbox"/> | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> | Koreksi |
| <input type="checkbox"/> | Persediaan | <input type="checkbox"/> | Hibah Langsung |

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	DEBIT	114111	Belanja Pegawai Dibayar di Muka (prepaid)	13.899.090	-
2	KREDIT	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	-	13.899.090

Jurnal Penyesuaian potongan tunjangan kinerja bulan Desember 2023 yang sudah dibayarkan penuh di Desember TA 2023

Dibuat oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Teresia Arta Pangestu
NIP 199806182022032012

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bagian Keuangan

Amalia Kurniasih
NIP 197502023005022001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam Oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Andi Prawira
NIP 199003302022031003

Tanggal : 31 Desember 2023



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MEMO PENYESUAIAN
NO. 41/MP-JP/XII/23

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Eselon I : Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Wilayah : -
Satuan kerja : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
No Dokumen :
Tanggal : 31-Dec-23
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Piutang Jangka Panjang

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Di Muka	<input type="checkbox"/>	Koreksi Beban Aset
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/>	Beban Dibayar Di Muka	<input type="checkbox"/>	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/>	Beban Yang Masih Harus Dibayar	<input checked="" type="checkbox"/>	Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/>	Transfer Masuk
<input type="checkbox"/>	Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/>	Transfer Keluar
<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/>	Koreksi
<input type="checkbox"/>	Persediaan	<input type="checkbox"/>	Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	DEBIT	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	3.756.650	-
2	KREDIT	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	-	3.756.650

Koreksi atas kelebihan pencatatan bagian lancar piutang TGR an NAN

Dibuat oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Teresia Arta Pangestu
NIP 199806182022032012

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bagian Keuangan

Amalia Kurniasih
NIP 197502023005022001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam Oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Andi Prawira
NIP 199003302022031003

Tanggal : 31 Desember 2023



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MEMO PENYESUAIAN
NO. 42/MP-JP/XII/23

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Eselon I : Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Wilayah : -
Satuan kerja : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
No Dokumen :
Tanggal : 31-Dec-23
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Di Muka	<input type="checkbox"/>	Koreksi Beban Aset
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/>	Beban Dibayar Di Muka	<input type="checkbox"/>	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/>	Beban Yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/>	Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang	<input checked="" type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/>	Transfer Masuk
<input type="checkbox"/>	Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/>	Transfer Keluar
<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/>	Koreksi
<input type="checkbox"/>	Persediaan	<input type="checkbox"/>	Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	DEBIT	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	18.783	
2	KREDIT	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi		18.783

Koreksi atas kesalahan jurnal penyesuaian penyisihan piutang TGR-bagian lancar

Dibuat oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Teresia Arta Pangestu
NIP 199806182022032012

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bagian Keuangan

Amalia Kurniasih
NIP 197502023005022001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam Oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Andi Prawira
NIP 199003302022031003

Tanggal : 31 Desember 2023



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MEMO PENYESUAIAN
NO. 43/MP-JP/XII/23

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Eselon I : Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Wilayah : -
Satuan kerja : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
No Dokumen :
Tanggal : 31-Dec-23
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran


Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Pendapatan Diterima Di Muka | <input type="checkbox"/> | Koreksi Beban Aset |
| <input type="checkbox"/> | Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | <input type="checkbox"/> | Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> | Beban Dibayar Di Muka | <input type="checkbox"/> | Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> | Beban Yang Masih Harus Dibayar | <input type="checkbox"/> | Piutang Jangka Panjang |
| <input type="checkbox"/> | Penyisihan Piutang | <input type="checkbox"/> | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih |
| <input type="checkbox"/> | Penghapusan Piutang | <input type="checkbox"/> | Transfer Masuk |
| <input type="checkbox"/> | Penyusutan Aset | <input type="checkbox"/> | Transfer Keluar |
| <input type="checkbox"/> | Kas Di Bendahara Penerimaan | <input type="checkbox"/> | Reklasifikasi Neraca |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> | Koreksi |
| <input type="checkbox"/> | Persediaan | <input type="checkbox"/> | Hibah Langsung |

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	DEBIT	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	424.792	-
2	KREDIT	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	424.792


Koreksi atas kekurangan jurnal pencatatan jasa giro Desember 2023 di Rekening Hibah

Dibuat oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan


Teresia Arta Pangestu
NIP 199806182022032012

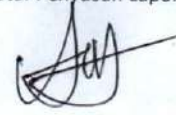
Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bagian Keuangan


Amalia Kurniasih
NIP 197502023005022001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam Oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan


Andi Prawira
NIP 199003302022031003

Tanggal : 31 Desember 2023



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MEMO PENYESUAIAN
NO. 44/MP-JP/XII/23

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Eselon I : Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Wilayah : -
Satuan kerja : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
No Dokumen :
Tanggal : 31-Dec-23
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Di Muka | <input type="checkbox"/> Koreksi Beban Aset |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> Beban Dibayar Di Muka | <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> Beban Yang Masih Harus Dibayar | <input type="checkbox"/> Piutang Jangka Panjang |
| <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang | <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang Tidak Tertagih |
| <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang | <input type="checkbox"/> Transfer Masuk |
| <input type="checkbox"/> Penyusutan Aset | <input type="checkbox"/> Transfer Keluar |
| <input type="checkbox"/> Kas Di Bendahara Penerimaan | <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> Koreksi |
| <input type="checkbox"/> Persediaan | <input type="checkbox"/> Hibah Langsung |

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	DEBIT	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	424.792	
2	KREDIT	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		424.792

Koreksi atas kekurangan jurnal balik pencatatan penyetoran jasa giro tayl

Dibuat oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Teresia Arta Pangestu
NIP 199806182022032012

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bagian Keuangan

Amalia Kurniasih
NIP 197502023005022001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam Oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Andi Prawira
NIP 199003302022031003

Tanggal : 31 Desember 2023



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MEMO PENYESUAIAN
NO. 45/MP-JP/XII/23

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Eselon I : Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Wilayah : -
Satuan kerja : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
No Dokumen :
Tanggal : 31-Dec-23
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Beban Dibayar Di Muka

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Di Muka	<input type="checkbox"/>	Koreksi Beban Aset
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input checked="" type="checkbox"/>	Beban Dibayar Di Muka	<input type="checkbox"/>	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/>	Beban Yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/>	Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/>	Transfer Masuk
<input type="checkbox"/>	Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/>	Transfer Keluar
<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/>	Koreksi
<input type="checkbox"/>	Persediaan	<input type="checkbox"/>	Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	DEBIT	114112	Belanja Barang yang Dibayar di Muka (prepaid)	79.662.400	-
2	KREDIT	521111	Beban Keperluan Perkantoran	-	79.662.400

Koreksi Beban Dibayar Dimuka yang belum tercatat di Neraca dan koreksi Beban di LO per 31 Desember 2023

Dibuat oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Teresia Arta Pangestu
NIP 199806182022032012

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bagian Keuangan

Amalia Kurniasih
NIP 197502023005022001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam Oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Andi Prawira
NIP 199003302022031003

Tanggal : 31 Desember 2023



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MEMO PENYESUAIAN
NO. 46/MP-JP/XII/23

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Eselon I : Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Wilayah : -
Satuan kerja : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
No Dokumen :
Tanggal : 31-Dec-23
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Beban Dibayar Di Muka

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Di Muka	<input type="checkbox"/>	Koreksi Beban Aset
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input checked="" type="checkbox"/>	Beban Dibayar Di Muka	<input type="checkbox"/>	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/>	Beban Yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/>	Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/>	Transfer Masuk
<input type="checkbox"/>	Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/>	Transfer Keluar
<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/>	Koreksi
<input type="checkbox"/>	Persediaan	<input type="checkbox"/>	Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	DEBIT	114112	Belanja Barang yang Dibayar di Muka (prepaid)	8.328.145	-
2	KREDIT	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	8.328.145

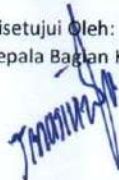
Koreksi Beban Dibayar Dimuka yang belum tercatat di Neraca dan koreksi Beban di LO per 31 Desember 2023

Dibuat oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan


Teresia Arta Pangestu
NIP 199806182022032012

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bagian Keuangan


Amalia Kurniasih
NIP 197502023005022001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam Oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan


Andi Prawira
NIP 199003302022031003

Tanggal : 31 Desember 2023



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MEMO PENYESUAIAN
NO. 47/MP-JP/XII/23

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Eselon I : Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Wilayah : -
Satuan kerja : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
No Dokumen :
Tanggal : 31-Dec-23
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Beban Dibayar Di Muka

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Di Muka	<input type="checkbox"/>	Koreksi Beban Aset
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input checked="" type="checkbox"/>	Beban Dibayar Di Muka	<input type="checkbox"/>	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/>	Beban Yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/>	Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/>	Transfer Masuk
<input type="checkbox"/>	Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/>	Transfer Keluar
<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/>	Koreksi
<input type="checkbox"/>	Persediaan	<input type="checkbox"/>	Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	DEBIT	114112	Belanja Barang yang Dibayar di Muka (prepaid)	8.733.850	-
2	KREDIT	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	8.733.850

Koreksi Beban Dibayar Dimuka yang belum tercatat di Neraca dan koreksi Beban di LO per 31 Desember 2023

Dibuat oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Teresia Arta Pangestu
NIP 199806182022032012

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bagian Keuangan

Amalia Kurniasih
NIP 197502023005022001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam Oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan

Andi Prawira
NIP 199003302022031003

Tanggal : 31 Desember 2023



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
MEMO PENYESUAIAN
NO. 48/MP-JP/XII/23

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Eselon I : Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Wilayah : -
Satuan kerja : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
No Dokumen :
Tanggal : 31-Dec-23
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Beban Dibayar Di Muka

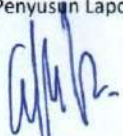
Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Di Muka	<input type="checkbox"/>	Koreksi Beban Aset
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input checked="" type="checkbox"/>	Beban Dibayar Di Muka	<input type="checkbox"/>	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/>	Beban Yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/>	Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/>	Transfer Masuk
<input type="checkbox"/>	Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/>	Transfer Keluar
<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/>	Koreksi
<input type="checkbox"/>	Persediaan	<input type="checkbox"/>	Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	DEBIT	114112	Belanja Barang yang Dibayar di Muka (prepaid)	3.301.788	-
2	KREDIT	522191	Beban Jasa Lainnya	-	3.301.788


Koreksi Beban Dibayar Dimuka yang belum tercatat di Neraca dan koreksi Beban di LO per 31 Desember 2023

Dibuat oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan


Teresia Arta Pangestu
NIP 199806182022032012

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:
Kepala Bagian Keuangan


Amalia Kurniasih
NIP 197502023005022001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam Oleh:
Staf Penyusun Laporan Keuangan


Andi Prawira
NIP 199003302022031003

Tanggal : 31 Desember 2023



Laporan Keuangan Audited 2023

